



Sengketa Tanah di Desa Tukadmungga

Ratusan Warga Datangi PN Singaraja

Singaraja (Bali Post) -

Sekitar seratus warga Desa Pakraman Dharmajati, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng datang ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Selasa (7/5) kemarin. Kehadiran warga guna memberikan dukungan moril terkait mediasi gugatan sengketa tanah yang disertifikatkan oleh perorangan. Warga meminta tanah seluas 13,5 are yang disertifikatkan itu dikembalikan kepada desa pakraman. Alasannya karena, permohonan sertifikat itu cacat hukum terutama dalam penentuan batas-batas dengan tanah milik perorangan.

Warga menggunakan pakaian adat madia tiba di gedung PN Singaraja sekitar pukul 10.00 Wita. Mereka menaiki sepeda motor, mobil pribadi, dan truk diiringi gong baleganjur. Tak pelak, situasi di PN Singaraja berubah menjadi riuh. Di halaman PN, warga berorasi dan membentangkan sepanduk. Tema sepanduk itu pada intinya menegaskan desa pakraman keberatan tanah itu disertifikatkan. Warga meminta tanah itu dikembalikan untuk kepentingan di Desa Pakraman Dharmajati. Warga siap mempertahankan tanah itu dan tidak memberikan kepada siapa pun yang ingin menguasai sebagai milik pribadi. Saat mediasi dibuka, hanya perwakilan warga yang diizinkan masuk ke dalam gedung. Sedangkan warga lainnya menunggu di halaman depan gedung PN.

Klian Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga Jro Ketut Wicana mengatakan,

sengketa ini bergulir cukup lama. Warga mengetahui tanah di kawasan Pantai Hepi Desa Tukadmungga itu disertifikatkan oleh Wayan Angker. Tanah milik Wayan Angker itu sebenarnya di sebelah selatan, batas di utaranya adalah tanah Desa Pakraman Dharmajati. Secara turun-temurun warga mengetahui tanah itu merupakan aset desa pakraman untuk melaksanakan upacara agama.

Meski diketahui milik desa pakraman, namun Wayan Angker menyertifikatkan tanah *pelaba* pura seluas 13,5 are itu. Keberatan penyertifikatan itu, warga lalu sepakat menggugat Wayan Angker ke PN Singaraja. Sebelum menempuh jalur hukum, desa pakraman dengan Wayan Angker sempat tiga kali melakukan mediasi di kantor Perbekel Desa Tukadmungga dan juga di Kecamatan Buleleng. Mediasi itu gagal menyelesaikan masalah, sehingga sengketa ini kemudian bergulir

ke PN Singaraja sejak Februari 2019 lalu, dengan didampingi Kuasa Hukum Gede Indria.

Pernah Warga Digusur

"Tanah itu adalah warisan turun-temurun pendahulu kami. Dulu ada warga kami yang diizinkan tinggal di sana, tetapi karena Pak Wayan Angker punya tanah di belakangnya warga itu lalu digusur. Kami sepakat untuk mempertahankan tanah itu. Tanah itu difungsikan ketika ada upacara *melasti* atau upacara agama lainnya," katanya.

Wicana menambahkan, secara bukti hukum apakah tanah itu milik desa pakraman, memang sampai sekarang belum ada. Namun, berdasarkan dokumen peta Desa Tukadmungga, disebutkan kalau tanah itu *pelaba* pura. Selain itu, bukti para tokoh masyarakat yang mengetahui kalau tanah itu merupakan daratan pasir yang dari dahulu digunakan untuk upacara agama. Pada

permohonan sertifikat yang dilakukan Wayan Angker, ada beberapa kejanggalan. Saat penyertifikatan penentuan batas antara tanah milik Wayan Angker dengan tanah yang sekarang disengketakan itu belum jelas. Permohonan sertifikat itu disebutkan berdasarkan konversi. Hal itu bisa untuk tanah warisan. Faktanya yang bersangkutan tidak ada hubungan ahli waris dengan pemilik tanah yang sekarang disengketakan.

Dengan pertimbangan itu, warga menggugat agar Wayan Angker bersedia menyerahkan tanah seluas 13,5 are di luar dari tanah miliknya sekitar 1,5 hektar.

"Proses penyertifikatan ini tidak pas, sehingga kami menggugat dan mudah-mudahan Pak Wayan Angker mengembalikan tanah itu agar kemudian tanah itu bisa dimanfaatkan bersama," jelasnya.

Tergugat Wayan Angker sebelum sidang mediasi mengatakan, pada Januari 1979 dirinya membeli tanah dari almarhum Wayan Saria asal Desa Pamaron yang kesehariannya yang tinggal di Desa Tukadmungga. Dalam akta jual beli itu tercantum dua bidang tanah masing-masing seluas 2.650 meter persegi,

8.050 meter persegi. Dia, kemudian mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena berkasnya lengkap sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohon itu terbit. Soal gugatan warga itu, Wayan Angker menyerahkan kepada PN. Terkait legalitas sertifikat yang dimohon itu, dirinya juga menyerahkan kepada BPN. Termasuk tuntutan warga harus mengembalikan tanah seluas 13,5 are kepada desa pakraman, Angker menyebut keputusan itu diserahkan kepada aparat pemerintah apapun menyangkut persoalan ini.

"Sah-sah saja kalau ada pengakuan seperti itu. Masih tahap sengketa dan menunggu pembuktian. Namun, saya menyerahkan proses ini kepada PN. Soal sertifikat atau keputusan mengembalikan tanah itu saya serahkan kepada BPN," jelasnya. Setelah sidang mediasi berlangsung, diputuskan sengketa itu berlanjut ke persidangan masuk materi gugatan dengan Perkara No. 187/Pdt.G/2019 PN Sgr. Atas hasil mediasi itu, warga kemudian meninggalkan gedung PN dengan tertib. Aksi ini dijaga ketat personel Polsek Kota Singaraja dan Polres Buleleng. (kmb38)

Edisi : Rabu 8 Mei 2019

Hal : 8



Kenaikan NJOP 1.000 Persen agar Dikaji Ulang

Wajib Pajak Bayar PBB P2 dari Rp 130 Ribu Meroket Jadi Rp 1,3 Juta

Kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh Pemkab Buleleng belakangan ini mulai memicu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan baik di pedesaan maupun perkotaan (PBB P2). Akibat kebijakan ini, wajib pajak (WP) terutama dari kalangan petani sangat keberatan. Dikhawatirkan hal itu memicu sikap putus asa para WP dan kemudian mereka nekat tidak membayar PBB P2. Ujung-ujungnya capaian target menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa saja tidak tercapai sesuai harapan. Bagaimanakah atensi Bupati terkait ada ancaman warga tidak akan membayar pajak karena pajak melesat naik?

MENYUSUL keberatan kenaikan PBB P2 itu, perbekel mulai turun tangan menyampaikan aspirasi kepada para WP di daerahnya. Salah satunya dilakukan Perbekel Desa Tamblang, Kubutambahan, Nengah Sudarsana. Di sela-sela peringatan Hari Kearsipan yang ke-48 tahun 2019 di Lovina, Selasa (21/5) kemarin, Sudarsana mengatakan sejak pihaknya membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) banyak WP yang

mengaku keberatan setelah mengetahui tarif PBB P2 harus dilunasi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dia mencontohkan, ada petani yang sebelumnya membayar PBB P2 Rp 130.000, sekarang pajaknya naik menjadi Rp 1,3 juta. Ini karena perhitungan NJOP naik antara 400 sampai 1.000 persen. Atas fakta ini, dirinya banyak menerima pengaduan warga kalau para WP akibat pajak melesat tinggi, tidak akan melunasi PBB.

ada solusi untuk tidak memperlakukan sama semua kepada objek pajak. Untuk itu, Sudarsana mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi penetapan NJOP ini. Langkah ini penting diambil agar WP tidak dirugikan. Apalagi sampai tidak mau membayar PBB P2. Kalau itu sampai terjadi, pihaknya pesimis target pemerintah dan DPRD yang ingin menaikkan pajak untuk meningkatkan PAD itu tidak akan tercapai. Ketika terjadi transaksi jual beli saja, pemerintah baru bisa memungut pajak sesuai NJOP yang terbaru itu. "Harusnya penentuan NJOP dievaluasi, bisa saja WP yang keberatan ini tidak mau bayar pajak. Kalau ini terjadi target kenaikan PAD yang diinginkan akan sulit dicapai," jelasnya.

Menanggapi keberatan kenaikan PBB P2, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) mengatakan, kenaikan PBB tahun ini memang memberatkan. Sebenarnya, penghitungan NJOP berdasarkan blok lokasi objek pajak. Hal

itu dihitung oleh tim *appraisal* Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Sudah pasti hal itu dianggap sudah baik dan jauh lebih baik dibandingkan sistem zona seperti penghitungan NJOP tahun sebelumnya.

Terhadap keberatan yang diajukan WP, pemerintah daerah menyiapkan tim untuk mengkaji hal itu. Kalau nantinya dipandang realistis, WP tidak bisa melunasi pajak, tentu pemerintah mengambil keputusan ada

"Warga kami dan WP lainnya keberatan karena PBB P2 membengkak lantaran terjadi kenaikan NJOP sangat drastis. Warga tidak saja keberatan, tetapi ada ancaman dari mereka tidak mau membayar pajak. Sebab faktanya tidak sesuai penghasilan objek tanah warga dengan nilai pembayaran pajak itu," katanya.

Kebijakan kenaikan NJOP oleh pemerintah daerah bersama DPRD Buleleng itu, kata Sudarsana, semangatnya semata-mata meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terhadap hal itu, pihaknya sendiri setuju. Akan tetapi, terkait pertimbangan pemerintah menaikkan NJOP dinilai seperti dipukul rata. Dia mencontohkan, ada tanah di pinggir jalan nasional dan tidak produktif. Kebetulan di lokasi itu ada bangunan akomodasi wisata. Kemudian PBB yang wajib dibayar oleh pemilik tanah itu menyamai PBB yang dibayar pemilik akomodasi wisata tersebut.

Terhadap masalah ini, pihaknya mengusulkan perlu

keringanan pajak. Untuk itu, pihaknya mempersilakan WP melakukan keberatannya. Di sisi lain untuk SPPT yang nilai pajaknya sudah sesuai, Bupati meminta agar dilunasi sebelum jatuh tempo.

"Kenaikan PBB ini sudah menjadi kebijakan. Kalau sudah sesuai saya harapkan pajaknya dilunasi. Seperti saya PBB-nya juga naik dari sebelumnya. Kalau yang mengajukan keberatan silakan ajukan, kami akan melakukan kajian sebelum nanti diputuskan," katanya. (mud)

Edisi : Rabu 22 Mei 2019

Hal : 8



Pusat Cairkan Klaim Pengobatan Rp 883 Juta

Amlapura (Bali Post) -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat akan mencairkan dana siap pakai (DSP) bulan ini. Dana yang dicairkan itu merupakan klaim biaya pengobatan untuk para pengungsi Gunung Agung. Kepastian pencairan dana itu setelah pihak BNPB melakukan rapat koordinasi dengan BPBD Karangasem dan juga Dinas Kesehatan Karangasem, Selasa (21/5) kemarin.

Kepala BPBD Karangasem Ida Bagus Arimbawa mengatakan, jumlah klaim biaya pengobatan pengungsi Gunung Agung sebesar Rp 4.207.077.402. Rencananya pusat akan mencairkan dana itu Rp 883.022.800.

"Pencairan DSP itu dari hasil *review* Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan sisanya dirapatkan 29 Mei oleh BPKP, BNPB, serta RS," tambahnya.

DSP itu akan segera dicairkan melalui BPBD Karangasem. Sekarang masih

proses pembuatan rekening. Setelah pembuatan rekening itu tuntas, kata Arimbawa, maka dana itu siap dicairkan.

Untuk pencairan DSP itu, tambah Arimbawa, berpedoman pada hasil *review* BPKP. Biaya pengobatan pengungsi yang ada di sejumlah rumah sakit di Bali atau di setiap puskesmas itu memang tidak dibayar penuh.

"Melainkan hanya dibayarkan sebagian. Hal itu sesuai *review* BPKP. Sisanya akan dibayar pada tahap kedua," jelas Arimbawa. (kmb41)

Edisi : Rabu 22 Mei 2019

Hal : 11



WARUNG GLOBAL

Jangan Gara-gara Aturan Berubah Proyek Fisik Tersendat

SERING berubahnya peraturan di pusat menyebabkan sejumlah kegiatan proyek fisik di Kabupaten Bangli tersendat, bahkan ada yang masih nihil. Sejauh ini sejumlah proyek yang direncanakan terlaksana tahun ini masih berproses. Atas kejadian ini, para pendengar Radio *Global 96,5 FM* mengutarakan sejumlah pendapat dalam acara dialog interaktif Warung Global. Berikut rangkuman opininya.

Wilayah Bangli, menurut Budiada di Tabanan, banyak sejarahnya dan berpotensi baik untuk tujuan wisata. Mengenai aturan yang berubah, mestinya ada batas waktu. Jika ada proyek fisik masih berjalan, jangan ubah aturan menjadi aturan baru. Jadi jangan salahkan yang membangun menanggung kesalahan ini. Membangun proyek fisik tentu ada jangka waktunya. Ini masalahnya ada uang, tapi aturan banyak dan tidak profesional. Semoga peraturan ini adalah

sebuah solusi.

Siapa yang salah dalam hal ini? Demikian menurut Suardana di Tabanan. Jika proyek fisik sudah berjalan, selesaikan dulu. Ubah birokrasinya dan pemimpin harus mengakui kesalahan ini. Karena ini akan mengakibatkan semua tersendat.

Tanpa menyinggung tentunya berubah aturannya, Made Jemet di Denpasar berharap pemerintah fokus garap potensi wisata di Bangli. Kalau mau pasti bisa. Misalnya kawasan Batur dikelola dengan baik.

"Kalau sudah maju semua kan bagus," tambahnya.

Kenapa aturan di pusat sering berubah? Bukan hanya kegiatan proyek fisik saja, lain pejabat, lain juga cara main dan aturannya. Demikian menurut Ayu di Petang. Aturan yang bagus dipatenkan, berlaku untuk semua wilayah. Perubahan-perubahan ini akan membuka peluang untuk melakukan korupsi.

Yang menjadi pertanyaan dari Werdha di Gianyar, jika aturan berubah lalu bagaimana dengan daerah lain? Pasti tunduk dengan aturan pusat. Pasti proyek mangkrak semua dong? Jangan sampai gara-gara aturan jadi mangkrak. Ini lucu jadinya. Sudah terbangun tapi gara-gara aturan, proyek fisik tersendat. Ia menyarankan setiap pimpinan daerah agar menggunakan hak otonomi daerahnya dengan bijak. (sikha)

Edisi : 29 Mei 2019

Hal : 5



Perbaiki Infrastruktur Dampak Banjir Diperkirakan Rp 550 Juta

Negara (Bali Post) -

Dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir pekan lalu, merusak sejumlah infrastruktur. Salah satunya jalan putus di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara. Meskipun saat ini secara darurat jalan sudah difungsikan. Perbaikan secara keseluruhan infrastruktur yang rusak akibat banjir diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 550 juta.

"Sekarang sudah diperbaiki sementara. Tapi baru sebatas menguruk tanpa senderan beton. Hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan mobil. Kalau kendaraan berat belum bisa," ujar Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jembrana I Wayan Darwin, Selasa (28/5) kemarin.

Meskipun hanya ditimbun dengan batu dan tanah,

paling tidak jalan tersebut sudah bisa dilalui sehingga mempercepat akses warga antarkelurahan. Selain menimbun, juga dibuatkan jalan sementara dengan cara menambah lebar jalan di sisi

utara. Selanjutnya ke depan untuk perbaikan secara permanen, diperkirakan perlu anggaran sekitar Rp 550 juta.

Perkiraan anggaran itu bukan hanya untuk perbaikan jalan yang putus saja. Tetapi juga di empat titik kerusakan jalan maupun bendung baik di BB Agung maupun di Desa Kaliakah dan desa lain yang terdampak banjir.

Diberitakan sebelumnya

banjir bandang yang terjadi di dua hulu sungai yang bermuara di Sungai Ijogading, menggenangi ratusan rumah di delapan desa. Beberapa infrastruktur juga mengalami dampak yang terparah putus-nya jalan di Pangkung Manggis, BB Agung. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun banjir akhir pekan lalu merupakan yang terbesar selama kurun waktu 10 tahun terakhir. (kmb26)

Edisi : Rabu, 29 Mei 2019

Hal : 9



BNPB Tak Penuhi Tunggakan Rp 1,6 Miliar

RSUD Bersurat ke KPLN

Semarang (Bali Post) -

RSUD Klungkung terus berupaya memperoleh dana Rp 1,6 miliar yang dipakai menangani pengungsi Gunung Agung. Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tak merespons cepat suratnya, pihak rumah sakit berencana mengupayakannya ke Kantor Penagihan dan Lelang Negara (KPLN).

Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma, Jumat (10/5) kemarin, mengatakan pihaknya segera bersurat ke KPLN. Sebab, penggunaan dana itu harus jelas dapat dipertanggungjawabkan. Karena sebelumnya penggunaannya ditangani dari pendapatan layanan pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan. "Kami sesalkan, kenapa surat resmi Bapak Bupati kepada BNPB tidak ditanggapi. Mestinya ditanggapi, agar kami punya rujukan yang legal untuk penanganan selanjutnya.

Selain itu, kami juga bisa melakukan penelusuran," katanya.

Saat itu, kata dr. Kesuma, ketika terjadi kekacauan, banyak warga mengungsi ke Klungkung. Saat itu warga pengungsi dari Karangasem mendapat penanganan serius dari petugas medis, sehingga banyak mengeluarkan biaya. Seperti biaya pelayanan kesehatan pengungsi untuk rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, dan pelayanan jenazah. Bahkan, pengungsi yang saat itu dipusatkan di Rendang,

saat berobat juga ke RSUD Klungkung. Sehingga biaya penanganan pengungsi menjadi paling tinggi di Klungkung mencapai Rp 1,6 miliar dibandingkan RSUD kabupaten lain, seperti Karangasem, Bangli, Gianyar maupun Buleleng.

Waktu itu dalam pengajuan anggaran kepada BNPB setiap kabupaten terlibat dalam penanganan pengungsi, usulan seluruh kebutuhan rumah sakit dikordinir oleh BPBD Karangasem. Namun, dr. Kesuma mengaku setelah itu tidak

ada penjelasan lagi. Berapa anggaran turun, kapan turunnya, dan digunakan untuk apa saja. Dia menegaskan akan terus berupaya untuk memperoleh dana itu lagi. Kalau pembahasan BNPB di pusat benar-benar mentok, maka pihaknya memastikan akan secepat mungkin bersurat ke KPLN itu.

Sebelumnya Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, kata dr. Kesuma, sudah menindaklanjutinya dengan bersurat langsung kepada BNPB di Jakarta sekitar Februari lalu. Tetapi, pihak rumah sakit belum mendapat jawaban jelas. Padahal, piutangnya cukup besar.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho yang dimintai kon-

firiasi perihal persoalan ini mengaku tidak tahu perihal piutang itu. Sebab, seluruh bantuan BNPB saat penanganan pengungsi Gunung Agung tersalurkan langsung ke BPBD. Jadi, semestinya segala penanganannya di daerah, tertanggung oleh BPBD.

"Saya tidak tahu. Coba tanya BPBD karena bantuan dari BNPB disalurkan kepada BPBD. Kemudian BPBD yang menggunakan bantuan tersebut, termasuk ke rumah sakit," terang Sutopo. (kmb31)

Edisi : Sabtu 11 Mei 2019

Hal : 12



Infrastruktur PPI Sangsit Rusak

DKP Bali Belum Agendakan Perbaikan

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Dusun Pabean Desa Sangsit, Kecamatan Sawan saat ini sudah diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kenyataannya PPI itu belum dapat dikelola dalam waktu dekat ini. Bukan hanya itu, pemprov juga belum melaksanakan agenda program pemeliharaan fasilitas di areal PPI yang sekarang kondisinya rusak berat. Bagaimanakah kira-kira prospek ke depan keberadaan PPI di Dusun Pabean Desa Sangsit yang saat ini dikelola Pemprov Bali itu?

KARENA belum ada perbaikan infrastruktur, tidak pelak situasi tersebut membuat aktivitas di PPI itu terkesan vakum. Sebab, tidak ada pengelola yang mengurus aset PPI yang tadinya dibangun dengan dana APBD Buleleng itu. PPI Sangsit itu dibangun beberapa kali menggunakan dana APBD Buleleng. PPI ini sempat beroperasi dengan baik. Tidak saja dimanfaatkan para nelayan tradisional di Buleleng, juga beberapa pengusaha kapal ikan dari Kepulauan Sepeken, Madura (Jawa Timur). Termasuk juga kapal dari daerah lain kerap kali bongkar muatan ikan di PPI. Di PPI juga sempat beroperasi Solar Pekid Dealer Nelayan (SPDN). Fasilitas ini dibangun membantu nelayan lokal dan pengusaha kapal guna mendapatkan pasokan bahan bakar kapal, tanpa harus membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah terbaru, pengelo-

laan kelautan kemudian dialihkan ke pemprov. Menyusul kebijakan itu, mau tidak mau Pemkab Buleleng melepaskan aset yang dibangun secara bertahap itu. Berdasarkan perhitungan, total aset PPI yang diserahkan kepada pemprov pada Desember 2018 lalu sebesar Rp 13,7 miliar.

Bersamaan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan PPI itu, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Kerusakan antara lain disebabkan bencana alam. Salah satunya dermaga sandar kapal ikan itu ambruk setelah diempaskan gelombang pasang. Dua buah kapal patroli berikut perlengkapannya juga ikut rusak. Bahkan hanyut karena bencana alam.

Kepala Dinas Perikanan Kelautan (DPK) Provinsi Bali I Made Sudarsana, belum lama ini mengatakan, aset PPI Sangsit itu sekarang ini memang sudah diserahkan ke provinsi. Hanya, pihaknya belum melaksanakan program pemeliharaan aset dan

pengelolaan. Dokumen pencatatan aset itu sepertinya belum *clear* prosedur administrasinya diserahkan dari Dinas Perikanan Buleleng. Jadi, masih ada jenis aset yang kondisinya rusak yang tidak mungkin dimanfaatkan kembali. Aset itu berupa kapal *boat*. Kapal *boat* itu sebelumnya difungsikan untuk patroli. Namun saat ini, hanya tinggal catatan nama barangnya. Seharusnya, aset itu sudah dihapuskan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan setelah pengelolaan PPI 100 persen dilakukan di pihak pemprov. "Catatan asetnya sudah kita terima. Namun, masih ada yang tercatat nama barangnya saja, tetapi faktanya tidak kami temukan asetnya itu di lapangan," ujarnya.

Karena alasan itu, pihaknya tidak berani menerima. Sebab, hanya nama saja, tetapi barangnya tidak ada. Sehingga aset itu disarankan untuk segera dihapuskan, sehingga tidak memicu masalah

setelah PPI itu dikelola secara penuh.

Selain soal data aset itu, Sudarsana mengaku pejabat dan sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan mengelola PPI Sangsit itu sejauh ini belum siap. Sekarang ini, pemprov masih menunggu penunjukan pejabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Sangsit bersama staf teknis terkait lainnya. Pihaknya menargetkan, paling lambat akhir tahun ini, aset dan SDM sudah *clear*. Sehingga penanganan kerusakan infrastruktur dermaga dan fasilitas lainnya itu bisa dilakukan. "Kami masih menunggu pejabat UPTD dan staf lain dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali. Sekarang masih konsolidasi ke dalam. Target kami tahun ini SDM dilengkapi, program perbaikan dan pengoperasian PPI akan kita lakukan," jelasnya.

Kepala Dinas Perikanan Buleleng Ni Made Arnika mengatakan, seluruh aset PPI itu sudah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dan diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Aset dengan nilai total Rp 13,7 miliar itu diserahkan ke Pemprov Bali Desember 2018 lalu. Pada dokumen itu, dua unit kapal *boat* sudah diusulkan penghapusan melalui Ba-

dan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng. Kapal *boat* itu sebelumnya digunakan untuk melakukan pengawasan aktivitas pelayaran kapal ikan. Kapal bersama perangkatnya dibeli dari dana APBD. Namun, *boat* itu sudah rusak karena usia. Karena tidak

bisa difungsikan lagi, kapal itu rencananya dihapuskan dari catatan kekayaan pemerintah. Sebelum administrasi penghapusan tuntas, kedua kapal itu tenggelam akibat bencana gelombang pasang.

"Sudah kita sampaikan kapal yang tadinya untuk pa-

troli itu rusak. Asetnya akan kita hapus. Kapalnya sudah tenggelam karena gelombang pasang. Saat penyerahan aset PPI, hal itu sudah dilaporkan ke pimpinan di daerah dan provinsi yang sekarang mengelola PPI itu," jelasnya. (mud)

Edisi : Sabtu 11 Mei 2019

Hal : 8



Tembus Rp 677 Juta Klaim Piutang Pasien Gunakan Dana Tak Terduga

Amlapura (Bali Post) -

Klaim piutang pasien yang memakai dana tak terduga dari Dinas Sosial menembus angka Rp 677.890.906. Atas kondisi itu, pihak Rumah Sakit Karangasem berharap piutang itu segera dibayarkan. Dipercaya kondisi seperti itu mengganggu operasional di internal rumah sakit.

Direktur RSUD Karangasem I Wayan Suardana, Jumat (10/5) kemarin mengungkapkan, untuk tahun 2017 piutangnya mencapai Rp 107.694.733, tahun 2018 (Rp 501.492.740), dan 2019 (Rp 68.703.495). Atas kondisi piutang seperti itu, berharap dapat segera terbayarkan, sehingga tidak ada piutang lagi.

"Pengajuan sudah dilakukan oleh masyarakat yang

menerima bantuan itu kepada bupati agar bantuan sosial itu segera cair," ujarnya.

Jadi, pihaknya sifatnya hanya menunggu. Semoga piutang ini segera dibayarkan. Proses pembayarannya nanti dilakukan oleh masyarakat. Uangnya tetap bersumber dari pemerintah daerah.

Suardana menambahkan, dengan adanya piutang itu dipercaya cukup berdampak

terhadap biaya operasional rumah sakit. Diyakini, piutang itu dapat berimplikasi terhadap pengobatan pasien itu sendiri. Apalagi, mereka yang melakukan pengobatan berulang-ulang. Maka mereka masuk dalam aplikasi catatan utang. Dengan demikian, maka tidak akan dapat membuka *billing* sistem terhadap pasien ini. Karena datanya sudah *di-input* di sistem aplikasi.

"Karena nama sudah tersimpan di sistem. Bila mereka memiliki utang, maka akan kelihatan di sana. *Billing*-nya jelas tidak bisa dibuka. Tetapi, khusus pasien *emergency* tetap kita layani. Kami harap, piutang itu segera bisa dilunasi, sehingga *billing* bisa dibuka," pintanya. (kmb41)

Edisi : Sabtu 11 Mei 2019

Hal : 11



Hasil Riset LD FEB UI 2018

Gojek Sumbang Rp 1,9 Triliun pada Perekonomian Denpasar

LEMBAGA Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) memaparkan, pada 2018 Gojek memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Mitra Gojek berkontribusi Rp 44,2 triliun per tahun dalam perekonomian Indonesia di tahun 2018. Terdiri dari Rp 16,5 triliun per tahun ke perekonomian melalui penghasilan Go Ride, Rp 8,5 triliun melalui penghasilan mitra Go Car, Rp 1,2 triliun melalui mitra Go Life dan Rp 18 triliun melalui omzet mitra UMKM Go Food. Sementara bagi Kota Denpasar sumbangannya mencapai Rp 1,9 triliun.

Wakil Kepala LD FEB UI Dr. Paksi C.K. Walandouw menjelaskan, khusus di Denpasar, kontribusi mitra ojek aplikasi (Gojek) kepada perekonomian Denpasar pada 2018 mencapai Rp 1,9 triliun. Sebelumnya, pada 2017 studi serupa juga dilakukan di Denpasar. Dari dua layanan yaitu roda dua dan UMKM kontribusinya mencapai Rp 882 miliar. Paksi mengatakan kontribusi yang semakin besar dari Gojek menunjukkan teknologi mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya ke perekonomian daerah.

"Gojek sebagai pemain utama industri teknologi di Indonesia telah menunjukkan bagaimana inovasi teknologinya dapat memperluas peluang penghasilan bagi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia," ungkapnya saat *press conference* bertajuk "Dampak Gojek terhadap Perekonomian Denpasar" pada Kamis (16/5) lalu.

Adapun angka kontribusi ekonomi mitra Gojek terhadap perekonomian Denpasar pada 2018 yaitu pengemudi Go Car berkontribusi Rp 190 miliar, mitra pengemudi Go Ride menyumbang Rp 814 miliar, mitra UMKM Go Food kontribusinya Rp 892 miliar, mitra Go Life (Go Clean dan Go Massage) kontribusinya Rp 48 miliar.

Dibanding penelitian 2018, kontribusi mitra Go Ride ke perekonomian Denpasar naik dua kali lipat lebih. Pertumbuhan juga terjadi pada kontribusi mitra UMKM Go Food yang naik lebih dari 60 persen sejak 2017. "Pertumbuhan kontribusi mitra UMKM Go Food ini antara lain disebabkan optimalisasi fitur teknologi Gojek dan Go Food yang semakin gencar

digunakan mitra UMKM," kata Paksi. Rata-rata penghasilan mitra Gojek dalam penelitian ini di atas UMK Denpasar.

Rata-rata pendapatan mitra Go Car di Denpasar sebesar Rp 5,8 juta atau hampir lebih tinggi 2,5 kali dari UMK Denpasar tahun 2018. Rata-rata pendapatan mitra Go Ride di Denpasar Rp 4,6 juta atau hampir lebih tinggi dua kali dari UMK Denpasar pada 2018. Kemudian rata-rata pendapatan mitra Go Life Di Denpasar sebesar Rp 4,9 juta atau lebih tinggi dua kali dari UMK Denpasar tahun 2018.

Kontribusi mitra Go Car ke perekonomian daerah Denpasar mengalami peningkatan pendapatan tertinggi yaitu 75 persen, jika dibandingkan dengan pendapatan mereka sebelum bergabung dengan Gojek. Selebihnya, para mitra Go Car juga menggerakkan

roda perekonomian daerah. Terlihat dari peningkatan pengeluaran sebesar 32 persen sejak bergabung di Gojek.

"Rata-rata pendapatan mitra Go Car yang mencapai hampir 2,5 kali lebih tinggi daripada UMK Denpasar menunjukkan adanya permintaan (*demand*) masyarakat di Denpasar terhadap layanan jasa roda empat *online*. Melalui penghasilannya, mitra Go Car juga berkontribusi cukup signifikan ke perekonomian daerah," jelas Paksi.

Tidak hanya kontribusi secara ekonomi, penelitian ini juga menunjukkan tiga manfaat utama yang dirasakan sebagai mitra pengemudi di Gojek adalah bisa mengatur waktu kerja, bisa memiliki waktu lebih bersama keluarga dan mempunyai waktu lebih untuk menabung atau bekerja sambilan yang lain. (bns1)

Edisi : Sabtu 18 Mei 2019

Hal : 5



Anggaran Pemeliharaan Jalan

Hanya Rp 3,1 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Persoalan jalan rusak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan Pemkab Tabanan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Tabanan kerap dibuat kerepotan dengan masalah jalan rusak. Terlebih ketika keluhan masyarakat marak dan meminta jalan yang rusak segera diperbaiki.

Kepala Dinas PUPRKP Tabanan I Made Yudiana mengatakan, panjang jalan kabupaten di Tabanan sepanjang 863,218 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 663,110 kilometer sudah di-*hotmix*. Namun di tengah keterbatasan anggaran dan skala prioritas pembangunan lainnya, tentu saja tidak serta merta seluruh jalan kabupaten bisa tuntas untuk program *hotmix*, melainkan dilakukan bertahap.

Di tahun anggaran 2019, anggaran masih dikonsentrasikan untuk pemeliharaan jalan sebagai upaya menjaga kualitas jalan. "Biaya pemeliharaan jalan tahun ini dapat pagu Rp 3,1 miliar. Itu untuk pengadaan material dan upah tenaga," terangnya, Senin (6/5) kemarin.

Kata Yudiana, anggaran pemeliharaan menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak Rp 3,5 miliar. Biaya pemeliharaan rutin ini digunakan untuk melakukan perbaikan ruas jalan dengan kondisi kerusakan tidak lebih dari lima persen dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan ruas jalan sesuai dengan tingkat kerusakan. Perbaikan jalan juga dilakukan menyesuaikan faktor cuaca, ketersediaan bahan serta tingkat kerusakan.

Selain pemeliharaan jalan, pejabat asal Baturiti ini juga menyampaikan, tahun ini program *hotmix* akan direncanakan untuk empat ruas jalan yang didanai dari DAK, BKK provinsi dan BKK Kabupaten Badung. Namun untuk bantuan BKK provinsi serta Badung, masih menunggu SK untuk ruas yang akan mendapatkan alokasi dana tersebut. "Untuk DAK, ruas jalan yang ditangani yakni ruas Selabih-Bukit Tumpeng, ruas Mekayu-Pancoran, ruas Serampingan-Kelecung dan ruas Jelijih-Munduk Ulan," terangnya.

Proyek empat ruas jalan tersebut masih ditenderkan. Jika tidak ada kendala, pertengahan Juni mendatang proyek tersebut sudah teken kontrak. (kmb28)

Edisi : Selasa 7 mei 2019

Hal : 7



Bupati Jamin UHC JKN Dialokasikan 100 Persen

Singaraja (Bali Post) –

Pemkab Buleleng memastikan sisa anggaran *Universal Health Coverage* (UHC) dalam aplikasinya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dialokasikan di APBD Perubahan 2019. Jadi, sisa anggaran Rp 28,5 miliar itu diagendakan pada APBD Pe-

rubahan tahun ini. Kebijakan itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap penduduk kesehatannya dilindungi hingga 95 persen.

Tidak hanya pemenuhan anggarannya, tetapi juga pelayanan kesehatan itu dijamin peripurna baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pelayanan di rumah sakit.

Bupati Agus Suradnyana (PAS) mengatakan hal itu pada pembukaan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sehat (JKN-KBS) di aula RSUD Buleleng Senin (20/5) kemarin. Menurutnya, masalah kesehatan merupa-

ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Bahkan, dirinya juga sudah menandatangani surat pernyataan komitmen pemerintah daerah untuk membayar iuran PBI Daerah bagi penduduk di Buleleng yang didaftarkan dalam program UHC.

Komitmen Pemkab

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Elly Widiyani mengatakan, pihaknya tidak meragukan komitmen Pemkab Buleleng dalam memenuhi kewajiban program UHC. BPJS Kesehatan memberikan apresiasi atas upaya Pemkab Buleleng menjamin seluruh penduduk Buleleng dalam program UHC ini. Sampai saat ini, kepesertaan masyarakat Buleleng yang sudah ber-JKN 96,58 persen. Jadi, penduduk yang belum ber-JKN tinggal sekitar 3 persen.

Terkait akses masyarakat ke RSUD, Elly menjelaskan sistem rujukan terintegrasi dan sistem rujukan berjen-

kan hal penting yang harus diurus pemerintah daerah lewat kebijakan yang disusun terkait menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hanya, kebijakan penganggaran, UHC JKN tahun ini mengikuti program yang dituangkan pada APBD.

Pertimbangan pemkab belum mengalokasikan anggaran UHC JKN sebesar Rp 42,8 miliar pada APBD Induk 2019, karena pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran pembangunan yang memerlukan dana cukup besar. Seperti pembangunan di bidang infrastruktur, pasar, pertanian, dan kebijakan pembangunan lainnya. Meski demikian, pemerintah memas-

tikan anggaran UHC Rp 28,5 miliar akan dialokasikan pada APBD perubahan tahun 2019 ini. Sumber anggaran untuk menambah sisa UHC ini diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD,

yang secara *online*. Peserta JKN-KIS sudah didaftarkan pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama mulai dari puskesmas, klinik, dan dokter keluarga. Untuk peserta yang didaftarkan pemkab memakai faskes tingkat pertama di puskesmas. Dengan kebijakan ini, peserta JKN tidak bisa ditangani di faskes pertama, tetapi pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan lanjutan di rumah sakit tipe D, C, B, dan tipe A. "Dari puskesmas bisa saja langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B, kalau kompetensi dokter yang diperlukan tidak ada di rumah sakit tipe C atau tipe A. Contohnya, spesialis Onkologi dan Urologi, adalah dokter-dokter yang tidak ada di rumah sakit tipe C dan tipe D. Jadi, untuk *case* seperti ini, masyarakat dari faskes pertama bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017

efisiensi anggaran, dan mengingatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya itu, pemerintah menjamin kalau kemungkinan terburuk tidak bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan, maka sesuai regulasi kebijakan pemerintah akan menganggarkan tahun berikutnya.

"Ini harus dipahami menyangkut proses penganggaran tidak konservatif, tidak akan saya pasang di depan (APBD Induk - red). Kami masih ada anggaran perubahan. Kami sudah mengupayakan sumber-sumber pendapatan dengan baik. Sehingga UHC pasti akan ter-cover di APBD Perubahan. Itu memang tanggung jawab pemerintah daerah," katanya.

Bupati meminta BPJS untuk tidak khawatir atas

mewajibkan pemerintah menanggung JKN kesehatan setiap warga hingga 95 persen penduduk di setiap daerah. Di Buleleng tercatat 316.161 orang penduduk di-cover JKN. Untuk memenuhi anggaran seluruh peserta JKN di Bali Utara itu, selama 12 bulan memerlukan anggaran Rp 87,4 miliar lebih. Sesuai amanat inpres itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan *sharing* anggaran Rp 44,5 miliar lebih atau 51 persen.

Pemkab juga memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran UHC Rp 42,8 miliar. Sejauh ini, baru menyiapkan anggaran Rp 14,5 miliar. Sedangkan sisa anggaran lagi Rp 28 miliar, belum dialokasikan. Atas kondisi ini, Komisi IV DPRD Buleleng berharap, dalam pembahasan APBD Perubahan nanti, eksekutif mengalokasikan sisa anggarannya, sehingga masyarakat yang ber-JKN kesehatannya dapat dilindungi secara penuh. (kmb38)

Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 8



Hajatan Pilkada 2020, KPU Ajukan Rp 35 Miliar Tingkat TAPD Disetujui Sekitar Rp 54 Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem telah menyusun proposal anggaran pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, KPU mengajukan anggaran ke daerah Rp 35 miliar. Ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, mengatakan, anggaran yang telah diajukan ke Pemkab Karangasem itu Rp 35 miliar. Anggaran sebanyak itu nantinya dipergunakan untuk honor petugas KPPS, PPS, PPK yang jumlah TPS-nya mencapai 950 TPS. Selain itu, juga logistik serta media *gathering*. Anggaran Pilkada telah diajukan ke Pemkab Karangasem.

"Pilkada nanti rencananya akan digelar September 2020. Setahun sebelum pelaksanaan Pilkada, anggaran sudah harus dipersiapkan. Karena sesuai mekanisme memang seperti itu. Setahun menjelang Pilkada, anggarannya memang harus sudah ada, sehingga kita bisa langsung bekerja," ungkapnya.

Krisna menambahkan sampai saat ini, pihaknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Tingginya

anggaran yang diajukan kata Krisna, karena beberapa kelengkapan logistik harus dibeli KPU. Selain kelengkapan logistik yang banyak menyedot anggaran yang sifatnya *ad hoc*. Pihaknya sendiri menyerahkan keputusan anggaran kepada Pemkab Karangasem.

"Untuk pembayaran KPPS, PPS, dan PPK paling banyak yang nyerap anggaran. Berapa pun disetujui nantinya kita siap. Semuanya tergantung pada pemkab. Kita berharap dana yang kita ajukan itu bisa disetujui," harap Krisna.

Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pihaknya bisa memastikan berapa anggaran yang akan disetujui untuk pelaksanaan Pilkada nanti. Pasalnya, persetujuan anggaran itu harus dilakukan dengan rapat koordinasi antara eksekutif dan dewan

"Belum final berapa anggaran yang disetujui untuk Pilkada itu. Kami baru membahas anggaran di TAPD saja. Sejauh ini belum ada persetujuan dari bupati dan DPRD," terang Sekda Gede Adnya Mulyadi.

Dari usulan anggaran KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim sebesar Rp 70 miliar lebih.

"Sedangkan di tingkat TAPD baru disetujui sekitar Rp 54 miliar lebih," ujar Adnya Mulyadi. (kmb41)



Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 12



Jalan Kabupaten Masuk Tahap Tender

Perbaiki 29 Paket Telan Biaya Rp 25 Miliar

Singaraja (Bali Post) -

Sebanyak 29 paket proyek perbaikan jalan kabupaten di Buleleng saat ini memasuki tahap pengumuman lelang di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang Jasa Pemkab Buleleng. Puluhan paket perbaikan jalan kabupaten itu diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari Rp 25 miliar. Konstruksi pelaksanaan proyek ini mulai dari pelapisan jalan menggunakan aspal hot-mix selain itu pembangunan fondasi badan jalan itu sendiri.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Buleleng, 29 paket proyek infrastruktur jalan itu, 10 di antaranya dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019. Untuk paket perbaikan jalan ini sudah

diumumkan di BLP. Dipastikan, rekanan pemenang lelang itu diumumkan sehingga proyek akan secepatnya bisa dilaksanakan. Dari paket yang dibiayai DAK tersebut, beberapa di antaranya adalah perbaikan jalan di Desa Bongon Cina menuju Desa Tista, Kecamatan Busungbiu. Ruas jalan ini mengalami kerusakan berat, sehingga tahun ini ditangani dengan volume panjang 4 Km. Jalan Dapdap Tebel menuju Sembung, dan jalan Penyusuhan menuju Desa Bulian Ke-

camatan Kubutambahan juga tahun ini akan dikerjakan dengan volume 3 km.

Sedangkan, paket perbaikan jalan yang dibiayai APBD Buleleng ditetapkan sebanyak 19 paket. Untuk paket yang dibiayai dari APBD murni, belum semuanya dilelang. Penyebabnya karena beberapa paket proyek itu belum dilengkapi *Detail Engineering Design (DED)*.

Kepala Dinas PUPR Ketut Suparta Wijaya mengatakan, puluhan paket perbaikan jalan itu sesuai dengan perencanaan program pembangunan. Penetapan paket itu juga sesuai usulan berjenjang mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Dalam penentuan paket jalan itu, tingkat kerusakan menjadi pertimbangan utama.

Ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Selain

itu, rata-rata biaya perbaikan jalan saat ini mengalami kenaikan signifikan. Jadi, hal itu berdampak pada sasaran perbaikan jalan yang sudah direncanakan. Dia mencontohkan, jika sebelumnya rata-rata untuk satu kilometer, perbaikan jalan itu memerlukan biaya Rp 1 miliar. Namun tahun ini naik menjadi Rp 1,2 miliar.

"Perbaikan jalan itu idealnya dilakukan ketika jalan mengalami kerusakan sedang. Sebab, kalau kondisinya sudah rusak berat, otomatis membutuhkan biaya jauh lebih mahal," ujarnya.

Tahun ini, banyak jalan rusak berat harus ditangani. Namun, hal itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah. "Kita dihadapkan pada kenaikan harga perbaikan setiap satu kilometer jalan yang rusak," ujarnya. (kmb38)

Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 8



Terkait Biaya Pengungsi Gunung Agung

RSUD Punya Piutang Rp

130 Juta, Dibayar Rp 4 Juta ✓

Pembahasan pelunasan piutang biaya perawatan pasien pengungsi erupsi Gunung Agung, nampaknya masih menjadi tarik ulur. Usulan pelunasan biaya itu belum dipenuhi sesuai usulan dari masing-masing rumah sakit yang merawat pengungsi Gunung Agung itu. Seperti yang dialami manajemen RSUD Buleleng yang memiliki piutang perawatan pengungsi lebih dari Rp 130 juta. Namun ternyata, hanya dilunasi Rp 4 juta. Atas keputusan ini, membuat manajemen RSUD mengalami kerugian lumayan besar. Lalu, bagaimanakah solusi efektif penyelesaian sisa piutang tersebut?

DIREKTUR Utama (Dirut) RSUD dr Gede Wiartana, M.Kes. didampingi Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Mobilisasi Dana I Gusti Ngurah Ketut Suhastika, Senin (20/5) kemarin, membenarkan kalau usulan

pelunasan piutang itu belum seratus persen. Wiartana mengatakan, saat menerima kiriman pengungsi, pihaknya sudah mencatat dan memastikan data kependudukan dan status asal pengungsi masuk radius terdampak erupsi Gu-

nung Agung. Bahkan, untuk memastikan data pengungsi itu, manajemen rumah sakit berkoordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena data itu dinyatakan valid, pengungsi yang membutuhkan perawatan baik rawat jalan maupun opname dilayani berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di rumah sakit itu.

"Kami sudah memastikan kalau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengungsi masuk daerah terdampak erupsi Gunung Agung. Kami sudah cocokkan ke BPBD. Semua berkas itu kami usulkan dalam permohonan biaya perawatan ke Pemkab Karangasem yang diteruskan ke BPBD Bali," katanya.

Setelah menghadiri rapat yang membahas pelunasan biaya perawatan pengungsi

akhir pekan lalu kata Wiartana, ternyata dari usulan pelunasan lebih dari Rp 130 juta itu diputuskan baru dibayar Rp 4 juta. Apa alasan usulan itu hanya disetujui kecil sekali. Sebab, usulan yang dilunasi itu yang berkasnya dianggap layak. Atas keputusan itu, pihaknya mengaku heran. Sebab, usulan yang diajukan itu sudah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami tidak tahu kok sebagian besar data itu dianggap tidak layak. Padahal, semua pasien pengungsi itu kita pastikan ke BPBD dan sudah diperiksa BPKP. Malah sekarang dibilang tidak layak," jelasnya.

Wiartana menambahkan, atas keputusan pembayaran yang belum seratus persen itu, manajemen rumah sakit masih melakukan kajian. Selain itu, juga meminta petunjuk lebih

lanjut dari Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS). Hal ini dilakukan karena, setelah mengikuti rapat di Pemkab Karangasem, diputuskan sisa piutang yang belum dilunasi itu akan ditelusuri ulang data perawatan pengungsi Gunung Agung di beberapa rumah sakit di Bali termasuk RSUD Buleleng. Untuk penelusuran data itu akan difasilitasi Dinas Kesehatan (Diskes) Bali.

"Kami menunggu keputusan lanjutan yang difasilitasi provinsi. Termasuk kondisi saat ini akan kami mintakan petunjuk ke pimpinan kita di daerah, sehingga ada solusi terbaik terkait masalah itu," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, RSUD Buleleng menunggu realisasi pembayaran biaya perawatan pengungsi Gunung Agung yang dirawat di rumah sakit. Dari 80 orang pengungsi. Total biaya pengobatan itu Rp

142.768.900. Setelah diaudit BPKP, nilai piutang yang dinyatakan layak Rp 130.876.300, sehingga ada kelebihan lagi Rp 11.892.600.

Setelah pengungsi kembali ke Karangasem, RSUD mengajukan permohonan pembayaran biaya perawatan kepada Pemkab Karangasem. Permohonan itu kemudian diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Setelah lama tidak jelas kapan akan dilunasi, RSUD menghadiri pembahasan pembayaran biaya perawatan pengungsi Gunung Agung di Pemkab Karangasem belum lama ini. Sayangnya, dari usulan itu, baru bisa dilunasi sebagian kecilnya saja. Anehnya, sisa piutang hampir Rp 126 juta malah dinyatakan tidak layak dilunasi. (mud)

Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 8



Kasus Pengadaan Tanah Gedung Perbekel Selat

Lima Orang Saksi Diperiksa

Semarapura (Bali Post) -

Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan tanah gedung baru Perbekel Desa Selat, Klungkung, kembali dilanjutkan Polda Bali. Unit 3 Ditreskrimsus Polda Bali kembali melakukan pemeriksaan lima orang saksi. Salah satunya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Wayan Suteja juga ikut dipanggil untuk dimintai keterangan di aula Polsek Klungkung, belum lama ini.

Proses pemeriksaan dipimpin langsung Kanit 1 Kompol I Gede Arianta. Saat dihubungi Minggu (5/5) kemarin, proses pemeriksaan itu dikatakan sudah dilakukan pada dua orang saksi dari Pempdes (Pemerintah Desa), dua orang dari Inspektorat, dan satu orang dari Pjs. Perbekel Desa Selat. Mereka diperiksa untuk mendalami peran masing-masing, sampai muncul informasi ada dugaan *mark-up* harga tanah dari hasil penjualan tanah untuk pembangunan gedung per-

bekel baru tersebut.

"Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Seluruh keterangan saksi akan dipelajari dulu. Saat ini masih tahap penyelidikan. Belum ada penetapan status tersangka," kata Arianta sebagai Ketua Tim Penyelidik kasus ini. Sementara apa hasil penggalian yang dilakukan pada masing-masing saksi, juga enggan dibicarakan. Pihaknya menegaskan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan.

Di sisi lain, Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Wayan Suteja, Minggu kemarin, mengaku sempat dimintai keterangan oleh penyidik Unit 3 Ditreskrimsus Polda Bali di aula Polsek Klungkung. Dia mengaku banyak ditanya pada seputar proses pengadaan tanahnya. Saat itu, dia mengaku proses pengadaan tanah tersebut sudah masuk ke dalam APBDes Selat. Pelaksanaannya juga dikatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung. (kmb31)

Edisi : Senin 6 Mei 2019

Hal : 12



Pusat Kucurkan DAK Nonfisik untuk Museum Subak

Tabanan (Bali Post) -

Mengoptimalkan pengelolaan museum, pemerintah pusat tahun ini menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp 450 juta. Dana dari Kemendikbud itu akan digunakan untuk pembiayaan tiga komponen, salah satunya untuk kajian dan konservasi tiga koleksi yaitu *tika*, *okokan* dan *janggi*.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Subak Ida Ayu Nyoman Ratna Pawitrani mengatakan, dana ini diberikan karena museum memiliki layanan publik yang diharapkan mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa. Dana ini turun untuk semua museum pemerintah di Indonesia dan tergantung pada tipe museumnya. Museum Subak di Kabupaten

Tabanan dalam standarisasi museum masuk kategori museum daerah dengan tipe C.

"Tidak hanya museum, taman budaya juga diberikan. Tetapi di Tabanan memang tidak ada taman budaya dan dana ini untuk bantuan operasional penyelenggaraan museum," terangnya, Minggu (5/5) kemarin.

Untuk Museum Subak, kata Dayu Ratna, dana tersebut akan digunakan untuk tiga komponen pembiayaan. Yakni pengelolaan koleksi yang terdiri dari kajian koleksi dan konservasi. Ada tiga koleksi yang akan diuji yaitu *tika* (kalender tradisional di Bali yang terbuat dari kayu), *okokan* dan *janggi* (tempurung kelapa yang di bawahnya diberi lubang kecil untuk pengukur waktu dan pengukur sanksi bagi anggota subak), dan akan dilanjutkan

dengan penyelenggaraan diskusi. "Kajian ini untuk mengetahui apa filosofinya, kegunaannya serta hal-hal khusus lainnya," terangnya.

Sementara untuk konservasi koleksi akan dilakukan fumigasi dan injeksi bambu serta pendanaan program publik yang akan dikemas dalam kegiatan pameran foto dan lukisan tentang subak, sosialisasi Museum Subak, belajar bersama di museum dan program museum masuk sekolah. Untuk program museum *goes to school* ini rencananya menyoal satu SMA di masing-masing kecamatan.

Di samping itu, anggaran tersebut juga untuk pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana. "Di sini hanya akan ada perbaikan kecil-kecilan di museum karena fokus dari dana ini adalah nonfisik," terangnya.

Disinggung tentang jumlah kunjungan, Ratna menyebutkan, masih didominasi wisatawan domestik karena sekali kunjungan sifatnya rombongan. "Tiap hari wisatawan mancanegara ada saja yang datang dewasa asing rata-rata 5 sampai 10 orang, jadi masih dominan domestik," jelasnya.

Seperti diketahui, Museum Subak yang berlokasi di Sanggulan, Tabanan selama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelajar. Para pelajar terutama ingin mengetahui tentang sistem persubakan di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Dengan luas lahan 6,28 hektar, lahan Museum Subak merupakan aset Pemprov Bali, sedangkan gedung museum dibangun Kementerian PU. Pemkab Tabanan hanya bertugas mengelola museum. (kmb28)

Edisi : Senin 6 Mei 2019

Hal : 7



Bangun Desa Wisata Desa Sayan ✓ Anggarkan Rp 134 Juta

Gianyar (Bali Post) -

Bermodal kondisi geografis yang berdampingan dengan kampung turis Ubud, Desa Sayan kini serius mengembangkan desa wisata. Salah satu yang akan dikembangkan adalah Desa Wisata Alam Bija. Untuk mengoptimalkan pengembangan potensi wisata itu, pihak desa sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 134 juta. Perbekel Desa Sayan I Made Andika mengatakan hal itu, Minggu (19/5) kemarin.

Menurut Andika, dana ratusan juta rupiah itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019. Desa Wisata Alam Bija Sayan mengandalkan wisata rekreasi *water tubing* dan restoran. Ide pengembangan desa wisata tersebut digagas oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sayan. "Hasil dari musyawarah desa terkait, pengembangan alam Bija yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Sayan itu disepakati sebagai destinasi desa wisata," katanya.

Andika mengatakan, pengembangan Desa Wisata Alam Bija Sayan ini sesungguhnya sudah digarap sejak setahun lalu. Pengembangan ini dilakukan dengan membuka akses jalan seperti pavingisasi. "Tahun ini dilanjutkan dengan pembangunan restoran dan *water tubing*. Kemungkinan akan di-*launching* pada 1 Juni 2019 mendatang," ujarnya.

Andika menambahkan, saat ini pihaknya melakukan pengawasan penuh terhadap pengembangan Desa Wisata Alam Bija ini. Terutama dalam pengawasan penggunaan anggaran yang nilai mencapai ratusan juta rupiah. "Pengelola desa wisata sudah jelas dari BUMDes yang diawasi oleh desa," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Senin 20 Mei 2019

Hal : 9



Buleleng Kekurangan Anggaran UHC Rp 28 Miliar

Singaraja (Bali Post) - Pemkab Buleleng belum mampu menyiapkan anggaran *Universal Health Coverage* (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga seratus persen. Dalam anggaran APBD Buleleng 2019, dari anggaran yang harus disiapkan Rp 42,8 miliar lebih, baru dianggarkan Rp 14,5 miliar lebih. Itu artinya, Buleleng masih kekurangan anggaran Rp 28 miliar lebih.

Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017, di mana pemerintah wajib menanggung JKN setiap warga hingga 95 persen penduduk di setiap daerah. Di Buleleng sendiri tercatat 316.161 orang penduduk yang di-cover JKN. Untuk memenuhi anggaran seluruh peserta JKN di Bali Utara selama 12 bulan membutuhkan anggaran Rp 87,4 miliar lebih. Sesuai dengan amanat inpres itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah mengalokasikan *sharing* anggaran sebesar Rp 44,5 miliar lebih.

tapi kami tidak tahu mengapa jatah anggaran UHC yang harusnya seratus persen dialokasikan, tapi dalam APBD 2019 baru dianggarkan Rp 14,5 miliar. Mengapa belum 100 persen," katanya.

Menurut politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, kekurangan anggaran UHC ini menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah dan DPRD. Untuk itu, pihaknya mendorong agar dalam APBD Perubahan yang segera akan dibahas ada solusi, agar sisa anggaran itu dialokasikan penuh seratus persen. Dengan demikian, seluruh warga sebagai peserta JKN bisa mendapatkan perlindungan secara penuh dari pemerintah sesuai kebijakan nasional. "Memang ada sekema akan dialokasikan dalam APBD Perubahan dan kita dorong hal itu. Dan dari mana sumber

Anggaran ini dianggarkan penuh 100 persen.

Sedangkan, Pemkab Buleleng yang juga memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran UHC Rp 42,8 miliar baru menyiapkan anggaran Rp 14,5 miliar, sehingga ada kekurangan lagi Rp 28 miliar. Jumlah ini belum seratus persen, seperti apa yang sudah dilakukan Pemprov Bali.

Menyusul kekurangan anggaran itu, Komisi IV DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) akhir pekan lalu. RDP dipimpin Ketua Komisi IV Gede Wisnaya

anggaran untuk menutup kita masih menunggu kebijakan pemerintah daerah," jelasnya.

Wisnaya menambahkan, meskipun 95 persen warga sudah dipastikan di-cover JKN, namun pihaknya meyakini masih ada warga yang belum menjadi peserta JKN. Untuk itu, dia mengusulkan agar BPJS melakukan kebijakan *cat of*. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh warga yang dalam keadaan sakit, tetapi belum terdaftar sebagai peserta JKN. Untuk membantu kondisi warga dengan kondisi itu, Komisi IV meminta agar BPJS menerbitkan kartu JKN. "Kami harap ini diperjuangkan dan sedang dalam proses dan mudah-mudahan bisa direalisasikan. Sebab banyak warga sakit tidak punya kartu JKN-KIS. Dengan direalisasikannya ini, kesehatan masyarakat dilindungi," jelasnya. (kmb38)

Wisna bersama anggotanya, Nyoman Gede Wandira Adi. Sedangkan eksekutif diwakili Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) dr. IGN Mahapramana, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gede Sandhiyasa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Made Subur, dan perwakilan BPJS Cabang Buleleng.

Wisnaya Wisna mengatakan, mengacu Inpres No. 8 Tahun 2017 Pemerintah Daerah harusnya konsisten mengalokasikan anggaran UHC JKN penuh selama 12 bulan. Meski demikian, dalam pembahasan APBD 2019 sebelumnya, Pemkab belum mengalokasikan anggaran UHC ini penuh 100 persen. Bahkan, dia sendiri tidak tahu apa pertimbangan dalam APBD 2019 anggaran UHC dialokasikan Rp 14,5 miliar lebih.

"Harusnya genap 12 bulan,



Perbup Belum Turun

Wisatawan ke Jungut Batu Tak Bisa Dipungut Retribusi

Semarang (Bali Post) -

Kunjungan wisatawan cukup tinggi ke Nusa Penida, khususnya Lembongan dan Jungut Batu. Kondisi demikian diakui Perbekel Jungut Batu Made Gede Suryawan, bahwa setiap harinya cukup banyak wisatawan yang datang berwisata ke Jungut Batu. Dalam pengamatannya, setiap harinya ada sekitar 3.000 wisatawan turun dari *boat* di Pelabuhan Jungut Batu. Mayoritas wisatawan asing asal Tiongkok. Namun, tingginya kunjungan, mereka sementara belum bisa dikenakan retribusi.

Sejak pungutan dari desa adat dihentikan tahun lalu, praktis wisatawan yang turun di sana, tidak dikenakan pungutan apapun. Lebih parah lagi, ribuan wisatawan ini datang berlibur ke Jungut Batu-Lembongan, tidak sampai menginap. Datang pagi, siang atau sore sudah balik lagi ke Sanur. "Ini baru hari-hari biasa. Kalau saat *high season*, Juni, Juli, Agustus dan September, kunjungannya cukup membludak," kata Suryawan, belum lama ini.

Dia berharap Perda tentang Pungutan Retribusi Daerah ini bisa diterapkan sepenuhnya. Agar, kunjungan wisatawan ke Jungut Batu maupun Lembongan bisa menghasilkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Dinas Pariwisata Klungkung terus menggodok berbagai regulasi untuk menarik pungutan retribusi bagi turis yang berwisata ke Klungkung, khususnya ke Kawasan Pariwisata Nusa Penida. Setelah melahirkan Perda, Dinas Pariwisata sedang mempersiapkan Perbup sebagai turunan regulasinya. Upaya ini untuk mencegah semakin melebar kebocoran pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Nengah Sukasta

belum lama ini mengatakan, pasca-adanya gejala penertiban pungutan oleh desa adat lantaran tak berbadan hukum, pemerintah daerah telah menelurkan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pungutan Regulasi Daerah. Di sana sudah diatur nilai pungutan sebesar Rp 25 ribu bagi wisatawan dewasa dan Rp 15 ribu untuk anak-anak. Perda tersebut

belum bisa diterapkan sepenuhnya pada objek pajak, lantaran regulasi turunnya berupa Perbup sedang digodok dengan Bagian Hukum Pemkab Klungkung.

Sukasta menambahkan, dalam proses pemungutan-nya, sebagaimana instruksi dari Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, pihaknya bakal merancang kerja sama yang

baik dengan para pemilik *boat*. Tujuannya, agar tidak melakukan pungutan langsung kepada wisatawan di lokasi kawasan pariwisata Nusa Penida. Sebab, cara demikian dianggap mengganggu. "Kami sudah banyak menerima masukan dari para pengusaha *boat*, kami sedang rancang bagaimana sistemnya, agar berjalan baik dan tidak melanggar hukum," kata Sukasta.

Dia mengakui, sebelum Perbup ini terbit, maka pihaknya tidak bisa melakukan pungutan. Demikian juga pihak desa, baik desa adat maupun desa dinas. Sehingga, ini amat mendesak agar segera bisa direalisasikan. (kmb31)



Di RSUD Buleleng

Tunggakan Pengobatan Pengungsi Gunung Agung Rp 142 Juta

Singaraja (Bali Post) -

Pascamenerima pengungsi erupsi Gunung Agung, beberapa waktu lalu, sekarang RSUD Buleleng masih menunggu realisasi pembayaran biaya perawatan pengungsi Gunung Agung yang sempat dirawat di RSUD. Berdasarkan data yang ada, RSUD tercatat memiliki piutang biaya perawatan pengungsi dari Kabupaten Karangasem itu senilai Rp 142.768.900.

Pascapengungsi kembali ke Karangasem, RSUD mengajukan permohonan pembayaran biaya perawatan kepada Pemkab Karangasem. Permohonan itu kemudian diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Setelah lama tidak jelas kapan tunggakan pengobatan itu akan dilunasi, RSUD telah

mendapat surat dari Pemkab Karangasem diminta hadir pada rapat pembahasan pembayaran perawatan pengungsi minggu depan.

Direktur Utama (Dirut) dr. Gede Wiartana, M.Kes., Kamis (9/5) kemarin, membenarkan kalau rumah sakit memiliki piutang biaya perawatan pengungsi Gunung Agung. Sejak pengungsi bertahan di Buleleng kata Wiartana, pihaknya sempat merawat pasien yang masuk ke rumah sakit saat mengungsi ke Buleleng. Perawatan itu tercatat periode pertama, dari 18 September sampai 1 Oktober 2017. Periode kedua, tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober 2017. Periode ketiga, dari 16 Oktober sampai 29 Oktober 2017. Periode keenam, dari 27 November sampai 10 Desember 2017. Periode ketujuh, dari 11 Desember sampai 24 Desember 2017.

Seain itu, susulan periode pertama dari 18 September sampai 1 Oktober 2017, susulan periode ketujuh dari 18 September sampai 1 Oktober 2017. Periode delapan, terhitung 25 Desember 2017 sampai 7 Januari 2018, periode kesembilan, pada 8 Januari sampai 21 Januari 2018 dan periode kesepuluh, dari 22 Januari sampai 20 Februari 2018.

"Pada periode itu ada 80 kasus kami tangani. Rinciannya biaya sudah diajukan ke Pemkab Karangasem, untuk ditindaklanjuti," kata Wiartana didampingi Humas RSUD Buleleng Ketut Budi-antara

Setelah mengusulkan permohonan pelunasan biaya perawatan itu, pihaknya tambah Wiartana, diundang mengikuti rapat membahas realisasi pembayaran perawatan korban erupsi Gunung

Agung minggu depan. Dari informasi awal yang diterimanya, sebelum usulan biaya perawatan itu disetujui, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memverifikasi usulan yang diajukan 14 rumah sakit di Bali termasuk RSUD Buleleng. Konon, hasil verifikasi itu menentukan status pasien dan usulan biaya perawatan yang dinyatakan layak dilunasi. Ini karena, antara usulan dari rumah sakit yang merawat pengungsi dengan ketersediaan anggaran hal itu tidak sebanding, sehingga dipastikan ada biaya yang tidak dilunasi pemerintah.

"Kami tidak tahu apakah usulan kita disetujui atau tidak. Dari info awal yang kita terima itu tidak semua usulan itu dilunasi karena biaya yang tersedia dan usulan rumah sakit itu tidak mencukupi," tegasnya. (kmb38)

Edisi : Jumat 10 Mei 2019

Hal : 8



Asuransi Cairkan Anggaran Rp 1,6 M ke Kas Daerah

Gedung Pemerintahan Rusak akibat Gempa Lombok akan Direnovasi

Amlapura (Bali Post) -

Sejumlah gedung pemerintahan di Lingkungan Pemkab Karangasem yang rusak akibat diguncang gempa Lombok beberapa waktu lalu segera direnovasi. Perbaikan gedung gedung itu menyusul telah dicairkannya anggaran dari pihak asuransi Rp 1,6 miliar ke kas daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BP-KAD) Karangasem I Nengah Mindra, Kamis (9/5) kemarin mengatakan, dana asuransi

yang telah dicairkan akan dipakai untuk perbaikan sejumlah gedung pemerintahan. Seperti rumah jabatan bupati, wakil bupati, sekda, Kantor UKM Center, Civic Center, dan gedung pemerintahan yang rusak lainnya.

Mindra menambahkan, kendati anggaran yang diberikan dari asuransi umum Bumi Putera Muda mencapai Rp 1.673.403.668, akan tetapi dana itu dinilai masih kurang. Apalagi dipergunakan untuk perbaikan semua

gedung yang rusak tersebut. Pihaknya kembali menganggarkan di APBD Induk 2019. "Kita belum dapat merinci tambahan anggaran perbaikan tersebut," ujarnya.

Plt. Asisten I Setda Pemkab Karangasem Wayan Sutapa menambahkan, sejauh ini, perbaikan itu masih tahap lelang. Pihaknya meyakini awal Juni sudah bisa dilakukan revonasi itu. "Kita dorong supaya segera dilakukan perbaikan. Dengan harapan rumah dinas

bupati, wakil bupati, sekda, serta UKM Center di bagian atas itu bisa segera ditempati dan juga dioperasikan," harapnya.

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi mendorong eksekutif agar dapat segera memperbaiki kerusakan gedung pemerintahan itu. Bila terus dibiarkan seperti itu, maka kerusakan akan semakin parah saja. "Semoga perbaikan itu segera bisa dilakukan," ujar Sumardi. (kmb41)



Hadiri "Karya Mamungkah" Balai Banjar Batuculung dan Pura Begawan Penyarikan

Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 400 Juta

BESARNYA perhatian terhadap masyarakat dan komitmen untuk menjaga, melestarikan adat seni dan budaya Bali serta meringankan beban *krama* Badung, diwujudkan Pemkab Badung dengan mendukung kegiatan hingga sarana dan prasarana upacara keagamaan. Seperti pada *Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Padagingan, Ngentegang Bale Kulkul lan Padudusan Alit Madasar Tawur Madurga Jangkep* yang dilakukan masyarakat Banjar Batuculung di Pura Begawan Penyarikan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, Kamis (16/5) kemarin, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta hadir serta memberikan bantuan ke masyarakat.

Bupati Giri Prasta didampingi anggota DPRD Badung I Wayan Sandra, Camat Kuta Utara A.A. Ngurah Arimbawa, beserta unsur tripika, Lurah Kerobokan Kaja I Made Adnyana, Bendesa Adat Kerobokan

yang menghabiskan dana Rp 150 juta yang berasal dari *krama* Banjar Batuculung.

Gede Sumadi mengatakan, pada *rahina* Buda Kliwon Sinta, Banjar Batuculung melaksanakan *Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Padagingan, Ngentegang Bale Kulkul lan Padudusan Alit Madasar Tawur Madurga Jangkep* yang menghabiskan dana kurang lebih Rp 500 juta yang bersumber dari bantuan Pemkab Badung sebesar Rp 400 juta dan dana *punia* dari *krama* banjar sebesar Rp 100 juta.

Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengapresiasi persatuan masyarakat Banjar Batuculung. Dia merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan meringankan beban *krama* Badung, khususnya *krama* Banjar Batuculung.

Bupati Giri Prasta menegaskan, Pemkab Badung akan selalu memegang teguh dan berkomitmen untuk dapat

han yang ada di desa maupun di bale banjar, ketiga pilar ini harus bisa bersatu untuk bisa membangun di daerahnya masing-masing," terangnya.

Di akhir kegiatan, Bupati

A.A. Putu Sutarja, tokoh masyarakat, I Bagus Alit Sucipta dan Klian Adat dan Dinas Banjar Batuculung, Kerobokan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta didampingi para tokoh masyarakat Batuculung menandatangani prasasti dan menyerahkan bantuan upakara sebesar Rp 400 juta.

Prawartaka Karya I Gede Sumadi mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkab Badung, khususnya Bupati Badung yang sudah berkesempatan hadir di *Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih Mupuk Padagingan, Ngantenang Bale Kulkul lan Padudusan Alit Madasar Tawur Madurga Jangkep* di Banjar Batuculung. Dijelaskannya, *karya* tersebut dilaksanakan setelah rampungnya Balai Banjar Batuculung dan Pura Begawan Penyarikan Banjar Batuculung. Lebih lanjut dijelaskannya, balai banjar itu sudah direncanakan sejak tahun 2014 melalui dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan

tahun 2016 dengan membangun, di antaranya *bale paruman* atau wantilan, *bale gong, pewaregan* dan *bale kulkul* yang menghabiskan dana Rp 1,6 miliar lebih. Bantuan diperoleh dari Pemkab Badung melalui hibah tahun 2016 sebesar Rp 500 juta, selanjutnya dari kas warga *krama* banjar sebesar Rp 300 juta, *punia* dari *krama* banjar sebesar Rp 550 juta dan dari LPD Desa Kerobokan sebesar Rp 300 juta.

Tahun 2018 dilanjutkan pembangunan tahap kedua, di antaranya *linggih Parahyangan, bale gede, gedong simpen, candi bentar* dan *tembok panyengker* yang menghabiskan dana Rp 1,3 miliar. Dana diperoleh dari Pemkab Badung melalui hibah tahun 2018 sebesar Rp 1 miliar lebih dan dari LPD Desa Kerobokan sebesar Rp 250 juta. Kemudian pada Desember 2018 dilaksanakan upacara *macaru, melaspas, mendem padagingan lan ngunggahang bale kulkul*

meringankan beban *krama* dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pribadi berupa sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebutuhan komunal yaitu pengeluaran *peson-peson, nyekah* bersama, pengeluaran *pidalan*, membangun bale banjar, wantilan dan Kahyangan Tiga dan bantuan sarana dan prasarana *upakara*.

Bupati Giri Prasta menambahkan, pengeluaran seperti ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, sehingga dana yang seharusnya dikeluarkan masyarakat dapat dikelola dalam rumah tangga. "Dalam konsep Hindu kita ada 3 pilar yaitu *Wimuda, Winata, dan Wiwerda*. *Wimuda* adalah anak-anak, *winata* adalah remaja atau *yowana*, karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan *wiwerda* adalah para orang tua. Maka dari itu untuk pemasala-

Giri Prasta menyerahkan *punia* sebesar Rp 10 juta untuk mendukung *sekaa gong* Banjar Batuculung dan Rp 20 juta untuk PKK Banjar Batuculung. (ad638)



Jalan ke Pura Ngenjung Rwa Bhinedha "Benyah"

Infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Karangasem masih banyak. Di antaranya akses menuju Pura Ngenjung Rwa Bhinedha Blungbang, di Dusun Tanah Barak, Desa Seraya Timur kondisinya saat ini *benyah latig*. Realitas itu membuat sejumlah warga saat berkendara sering terjatuh akibat licin ketika melintasi jalan tersebut. Lalu, bagaimanakah harapan warga kepada pemerintah dalam usaha merestrukturisasi akses jalan tersebut?

BERDASARKAN pantauan di lapangan, Kamis (16/5) kemarin, akses jalan itu memang sangat memprihatinkan. Sebab, nyaris sepanjang jalan itu rusak berat atau *benyah latig*. Pasalnya, batu geladak di sepanjang jalan itu yang sebelumnya berjajar rapi di bawah aspal terlihat semua bermunculan menganga ke permukaan jalan. Hal itu

karena sebagian besar aspal di atasnya itu sudah mengelupas. Bahkan, di sejumlah titik menimbulkan lubang. Tidak pelak hal itu membuat pengendara kesulitan melintas. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Bahkan, warga harus memanfaatkan bibir jalan akibat jalan aspal di tengah itu rusak berat.

Salah seorang warga, I

Wayan Pastika Yasa, mengungkapkan jalan itu rusak sebetulnya sudah lama sekitar delapan tahunan. Kerusakan jalan ini membuat dirinya harus ekstra hati-hati ketika melintas. Jika tidak, bisa-bisa ia terjatuh. "Kondisi jalan ini rusak parah. Sudah lama sekali rusaknya," ujarnya.

Kadus Tanah Barak I Made Putra mengungkapkan, jalan itu mengalami kerusakan sekitar sembilan tahun lalu. Panjang jalan rusak parah mencapai 1,5 kilometer. Jalan itu cukup padat karena setiap hari dilalui sekitar 300 KK. Jalan ini juga menghubungkan ke Pura Ngenjung Rwa Bhinedha Blungbang Tanah Barak.

"Jalan ini sering memakan korban. Warga di sini atau warga lain yang belum

tahu medan jalan itu kerap tergelincir ketika melintas akibat kerusakan jalan itu. Apalagi warga yang baru belajar mengendarai sepeda motor dan anak-anak sekolahan sering terjatuh," ujarnya.

Kerusakan jalan itu, kata Putra, membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat ketika ingin menjual hasil pertaniannya ke kota. Untuk itu, pihaknya mewakili masyarakat berharap jalan itu secepatnya diperbaiki.

"Sudah sempat dibahas pada musrembang kecamatan, tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan. Saya hanya bisa berharap supaya secepatnya jalan ini direstrukturisasi sehingga aktivitas yang dilakukan warga bisa lebih baik," ujar Putra. (nan)



Soal Klaim RS Pengungsi Gunung Agung Pekab Karangasem Tanggung Selisih Rp 3,3 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Persoalan klaim biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana erupsi Gunung Agung yang diajukan 14 rumah sakit akhirnya mendapat titik terang. Selisih klaim sebesar Rp 3.324.054.602 akan dibayarkan Pekab Karangasem lewat BPBD setempat. Mengingat, sesuai hasil *review* BPKP hanya Rp 883.022.800, yang bisa dibayar memakai Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dari total klaim keseluruhan Rp 4.207.077.402.

"Empat belas rumah sakit yang mengajukan klaim selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Pekab Karangasem melalui BPBD Kabupaten Karangasem terkait sisa pembayaran klaim tersebut," ujar Kepala BPBD Provinsi Bali I Made Rentin dikonfirmasi, Kamis (30/5) kemarin.

Apabila sisa klaim tidak dapat dibayarkan kepada RS, lanjut Rentin, maka dapat diterbitkan surat keterangan piutang dari Pekab Karangasem. Dengan demikian, RS dapat mencatat dalam neraca keuangannya yang nanti da-

pat digunakan dalam audit. Di sisi lain, Karo Keuangan BNPB juga menyatakan pemerintah daerah dapat mengajukan DSP tahap III dan IV ke BNPB jika memang tidak mampu menanggung sepenuhnya. "Dana sumbangan peduli Gunung Agung dari masyarakat sejumlah Rp 3,1 miliar dapat menjadi alternatif sumber pembayaran klaim selain DSP," imbuhnya.

Dana sumbangan tersebut, kata Rentin, menjadi alternatif yang akan dipakai karena minimnya APBD. Dari segi aturan juga membolehkan pemerintah di-*support* masyarakat dan dunia usaha dalam menangani kebencanaan. Kemudian terkait masalah NIK dapat diatasi dengan surat pernyataan dari Pekab Karangasem, bahwa benar yang ditangani tersebut adalah warga Karangasem yang terdampak bencana. Sementara desa terdampak sejumlah 28 desa sesuai data yang dikeluarkan oleh PVMBG selaku instansi berwenang dan berkompeten. (kmb32)

Edisi : Jumat, 31 Mei 2019

Hal : 11



Habiskan Anggaran Rp 16 Miliar THR Dicairkan Mulai Hari Ini

Negara (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana telah mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) ribuan pegawai. Dipastikan mulai Jumat (24/5) ini, tunjangan bagi para pegawai ini mulai dicairkan secara bertahap.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Sudiada, Kamis (23/5) kemarin mengatakan, secara umum Pemkab telah menganggarkan untuk tunjangan tahunan bagi para pegawai tersebut bersumber dari APBD 2019. Alokasi ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Untuk Gaji ke-13, disesuaikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Besaran pendapatan di antaranya gaji pokok, tunjangan

keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja (tukin).

Sementara untuk THR merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiunan. "Sudah kita anggarkan di APBD, tanggal 24 (Mei) ini sudah mulai keluar untuk THR," ujar Sudiada kemarin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, I Dewa Kusuma Antara mengatakan, untuk alokasi keseluruhan pada Jumat (24/5)

hari ini, THR akan dicairkan sebesar gaji pokok. Untuk besaran total, Dewa Kusuma mengungkapkan keseluruhan pegawai di lingkup Pemkab Jembrana dialokasikan sebesar Rp 16.047.235.900. Belum termasuk THR untuk Bupati dan Wakil Bupati selaku pejabat negara. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dialokasikan sebesar Rp 11.460.600. Selain PNS, Bupati dan wakil bupati, THR juga diberikan kepada 35 anggota DPRD dengan total anggaran Rp 143.818.700. "Mulai tanggal 24 (hari ini-red) ini sudah dicairkan," tambahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 diproyeksikan dicairkan pada bulan Juni nanti. (kmb26)

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 10



Pemkot Denpasar Dukung Proyek Instalasi Pengolahan Sampah PLTSa Sarbagita

PEMBAHASAN status kemajuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) memasuki babak baru. Rabu (22/5) digelar rapat koordinasi pembahasan proyek ini di Gedung Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Gedung Pos Ibu Kota, Jakarta. Seperti diketahui, Pengembangan Proyek Instalasi Pengolahan Sampah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sarbagita ini rencananya akan dikembangkan di kawasan TPA Suwung, Denpasar yang ditargetkan akan beroperasi mulai tahun 2021 dengan tahap konstruksinya dimulai pada tahun 2019. Dengan nilai investasi mencapai 120 juta dolar AS dan dapat menampung 1.200 ton sampah per hari.

Dalam rapat ini, Pemerintah Kota Denpasar dihadiri Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara. Hadir juga Gubernur Bali Wayan Koster serta sejumlah pimpinan kabupaten/kota di Bali, seperti Bupati Gianyar I Made Mahayatra serta Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Rapat dipimpin Direktur Proyek Sektor Energi & Ketenagalistrikan KPPIP Triharyo Soesilo, dan dihadiri juga Kabid Infrastruktur Kelistrikan Kemenko Bidang Kemaritiman Trinaldy Konnery, serta diikuti perwakilan dari Koordinator Jamdatun, PT Indonesian Power serta PT Waskita Karya.

Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengapresiasi digelarnya rapat pembahasan status kemajuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sarbagita yang dapat menjadi langkah maju bagi pengelolaan sampah terpadu khususnya di Kota Denpasar. "Meningkatkan upaya pengelolaan sampah

yang baik merupakan hal kompleks dan perlu sinergitas seluruh pihak untuk merumuskan solusinya. Tentu pengembangan proyek PLTSa Sarbagita ini sejalan dengan komitmen Pemkot Denpasar dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti juga yang telah dilakukan dengan penerapan Perwali 36 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan juga sejumlah program pelestarian lingkungan strategis lainnya yang menggendeng seluruh lapisan masyarakat," ujar Jaya Negara.

Ditambahkan dengan adanya proyek ini dirinya berharap sampah khususnya di Kota Denpasar akan bisa terurai secara lebih signifikan. Penanggulangan sampah menurut Jaya Negara adalah merupakan isu strategis yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, karena kalau tidak segera ditanggulangi akan membawa berbagai dampak yang tidak menguntungkan bagi Kota Denpasar dan Bali pada umumnya.

Sementara itu, Direktur Proyek Sektor Energi & Ketenagalistrikan KPPIP Triharyo Soesilo mengatakan telah dilaksanakan sebelumnya penandatanganan *Head of Agreement* antara PT Waskita Karya dan PT Indonesia Power terkait pengembangan PLTSa TPA Regional Sarbagita Bali pada 29 Januari 2019. "Di mana Indonesia Power akan bekerja sama dengan PT Waskita Karya dalam membangun proyek ini dengan sinergi BUMN. Serta juga dikoordinasikan dengan PT PLN serta berkonsultasi dengan Kementerian ESDM," ujar Triharyo Soesilo.

Lebih lanjut dikatakannya, dari rapat kali ini telah disepakati sejumlah poin di antaranya dokumen kajian

diselesaikan pada Juli 2019, *legal opinion* dari Jamdatun untuk kerja sama antara PT Indonesia Power dan PT Waskita Karya untuk pengembangan PLTSa Sarbagita Bali akan diselesaikan secepatnya.

Pemprov Bali dan Pemkot serta Pemerintah Kabupaten lainnya telah juga menandatangani MoU pasokan sampah pada Mei 2019. Pendanaan proyek ini akan menggunakan empat sumber pemasukan, yakni penjualan listrik, rencana kontribusi wisatawan,

Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan bantuan BLPS dari Dana ALokasi Khusus Non Fisik, serta usulan dukungan pemerintah dari Dana Dukungan Tunai Infrastruktur untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan untuk persiapannya diharapkan PT Indonesia Power dan PT Waskita Karya tidak hanya menyiapkan kajian tetapi kajian lainnya. "KPPIP juga akan membantu untuk memberi dokumen studi terbuka untuk umum," ungkap Triharyo Soesilo. (ad878)

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 2



Seniman Sebelumnya Ditunjuk Lanjutkan Proyek RTH Taman Bung Karno

Singaraja (Bali Post) -

Masih ingat mandeknya pemasangan patung Bung Karno di areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada. Setelah pematung asal Yogyakarta kekurangan waktu menuntaskan pemasangan patung sampai kontrak proyek diputus, Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan (Perkimta) Buleleng pertengahan 2019 ini kembali melanjutkan pemasangan patung itu. Untuk melanjutkan pemasangan patung itu, Dinas Perkimta telah diizinkan menunjuk seniman yang sebelumnya membuat patung Bung Karno tersebut.

Kepala Dinas Perkimta Buleleng Ni Komang Surattini, Kamis (23/5) kemarin, mengatakan keputusan melanjutkan pemasangan patung tersebut setelah pelaksanaan pekerjaan sebelumnya diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari pemeriksaan itu, dokumen proyek, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangannya telah berjalan dengan baik. Jadi, tidak ada temuan yang terindikasi melanggar

regulasi. Selain itu, dari kajian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah dikeluarkan kajian terhadap item pekerjaan pemasangan patung Bung Karno itu. Dari kajiannya itu, seniman yang membuat patung itu tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya sampai batas akhir (*deadline* - red) pengerjaannya. Ini karena, dari tahapan pembuatan dan pemasangan memerlukan waktu yang tidak

bisa diprediksi selama pekerjaan dilaksanakan. Apalagi, pekerjaan ini menyangkut seni, sehingga untuk melanjutkan pemasangannya tidak memungkinkan dilakukan oleh seniman lain. Dengan kajian itu, LKPP telah merekomendasikan agar Dinas Perkimta menunjuk langsung pematung sebelumnya untuk memasang patung Bung Karno itu.

"Setelah kita memutuskan kontrak, dan pertanggungjawaban pekerja sudah sesuai audit BPKP. Dari kajian LKPP proyek itu tidak ada masalah. Selanjutnya, kita diizinkan menunjuk langsung pematung yang sebelumnya yang tidak tuntas menyelesaikan pekerjaannya itu," katanya.

Selain melanjutkan pemasangan patung yang tertunda itu, pertengahan 2019 ini, kata Surattini, Dinas Perkimta kembali melakukan pekerjaan yang tidak dituntaskan tahun 2018

lalu. Salah satu pekerjaan itu adalah pemasangan patung Singa Ambara Raja dan paket pekerjaan lain.

Untuk melanjutkan pekerjaan itu, Dinas Perkimta mengalokasikan kembali anggaran proyek lanjutan pada APBD Perubahan 2019. Hanya, berapa nilai pagu anggaran di perubahan itu, Surattini mengaku masih melakukan penghitungan teknis. Menghindari pelanggaran hukum, pihaknya meminta ada pendampingan hukum dari Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

"Pada APBD Induk 2019 tidak dialokasikan proyek itu. Kemudian kita anggarkan di APBD perubahan. Sebelum itu, sisa anggaran 2018 sebesar Rp 1,2 miliar sudah kita kembalikan. Bisa saja anggaran itu akan dialokasikan kembali pada anggaran perubahan tahun ini," jelasnya. (kmb38)

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 8



Jalan Penghubung Pendem-Pancardawa Hancur Perbaikan Dianggarkan Rp 3,2 M

Negara (Bali Post) -

Jalan yang menghubungkan antara Banjar Pendem dan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana hancur lebur. Sejumlah warga Pendem, Kamis (23/5) kemarin mengatakan, kerusakan jalan itu sudah cukup lama. Bahkan sudah beberapa kali ditambal sulam namun cepat sekali kembali berlubang dan rusak.

"Jalan yang menghubungkan Banjar Pendem dan Pancardawa rusak udah lama. Namun belum diperbaiki. Harapan kami agar segera ditangani karena sangat berbahaya," jelas Ketut Adi seorang warga.

Wirata, warga lainnya, mengaku pernah jatuh di

lubang jalan yang ada di selatan pertigaan menuju Warung Tegal Dadong tersebut. Sehingga dia sangat ingin jalan tersebut segera diperbaiki. "Jangan menunggu sampai banyak korban lagi," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jembrana I Wayan Darwin dikonfirmasi membenarkan kerusakan jalan kabupaten tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan tahun 2019 ini dari dana DAK. "Tinggal menunggu tender. Jalan yang akan diperbaiki sepanjang 3,4 km dan dengan anggaran Rp 3,2 miliar. Tahun ini akan kami perbaiki," jelasnya. (kmb)





Gubernur Koster Minta BPK Tak Ragu Berikan Opini Berdasarkan Kondisi Riil

SETELAH menyelesaikan proses pemeriksaan di Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali melakukan *exit meeting* dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran. *Exit meeting* dilakukan di ruang tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (8/5) kemarin.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso mengatakan setelah pemeriksaan ini pihaknya akan melakukan pembahasan secara internal untuk membuat laporan akhir yang akan disampaikan kepada Pemprov Bali dan DPRD Provinsi Bali. Rencananya

laporan akhir akan diserahkan pada 27 Mei 2019 mendatang.

Gubernur Koster memberikan apresiasi atas pemeriksaan BPK RI di Pemprov Bali yang telah berlangsung dengan lancar. Ia berharap pemeriksaan ini menghasilkan opini yang memang berkualitas dan mencerminkan kondisi riil atau sesungguhnya. "Saya sudah meminta kepada Pak Sekda dan jajaran agar betul-betul memberikan pelayanan informasi yang akurat sehingga mencerminkan situasi yang sesungguhnya," kata Gubernur Koster.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini

meminta BPK RI tidak ragu dalam membuat laporan akhir pemeriksaan di Pemprov Bali. Ia mengaku senang jika memang BPK menyampaikan ada hal-hal yang perlu dirapikan dan ditata lagi di Pemprov Bali. "Saya harap Bapak tidak perlu ragu, karena memang kita butuh pengukuran kinerja administrasi secara baik." ujarnya.

Dalam pertemuan ini tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada, Kepala BPKAD Provinsi Bali Dewa Sunarta, Kepala Bapenda Provinsi Bali Made Santha serta tim pemeriksa BPK RI. (kmb)

Edisi : Kamis 9 Mei 2019

Hal : 4



Jalan Menuju Pura Beji

Warga Subaya

Harapkan Perbaikan

Bangli (Bali Post) -

Warga Desa Subaya, Kintamani mengharapkan adanya perbaikan terhadap akses jalan menuju Pura Beji, di wilayah desa setempat. Perbaikan jalan sangat dibutuhkan warga untuk memudahkan mengambil air bersih dan menuju perkebunan penduduk.

Salah seorang warga Desa Subaya, Wayan Windia, Rabu (8/5) kemarin mengungkapkan, jalan yang bernama Jalan Tirta Dedari Tirta Pemujaan Subaya tersebut mengalami kerusakan parah sejak 2017 lalu. Tepatnya saat bencana alam longsor yang terjadi di Desa Songan. Panjang jalan yang rusak mencapai 1 kilometer lebih dari 1,7 km total panjang jalan yang ada. "Sebagian jalan yang rusak akibat tergerus air," ungkapnya.

Jalan berstatus kabupaten itu, kata Windia merupakan akses jalan menuju Pura Beji. Jalan itu banyak dimanfaatkan warga untuk mengambil

air bersih di wilayah Pura Beji. Selain itu jalan tersebut juga menjadi akses warga untuk menuju perkebunan di Subak Abian Yeh Pengalapan. "Jalan itu juga menuju rumah warga. Di ujung jalan itu ada 15 KK yang tinggal di sana," terang pria yang merupakan Kelian Subak Abian Yeh Pengalapan itu.

Saat ini kondisi jalan Tirta Dedari Tirta Pemujaan Subaya tak bisa dilalui kendaraan roda empat. Hanya kendaraan roda dua yang melintas di jalan itu. Untuk mengangkut hasil perkebunan, petani pun terpaksa bolak-balik menggunakan motor.

Windia mengatakan, pihak desa sudah mengajukan permohonan perbaikan ke Dinas PU dan menyampai-kannya ke anggota dewan. Namun sampai sekarang belum mendapat penanganan. "Dinas PU setahu saya sudah tiga kali turun ke lokasi," ujarnya. Karena keberadaan jalan tersebut sangat penting dan dibutuhkan warga, dirinya berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan. "Jalan itu sangat dibutuhkan warga. Saat ada upacara di Pura Puseh, Pura Dadia, Pura Bale Agung, semuanya *masuk* ke Pura Beji dan melintasi jalan itu," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Kamis 9 Mei 2019

Hal : 14



Diadili Kasus Korupsi

Mantan Ketua LPD Bebetin Divonis Dua Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni dengan hakim anggota Wayan Sukanila dan Sumali, Rabu (22/5) kemarin menjatuhkan vonis pidana dua tahun penjara kepada terdakwa kasus korupsi LPD Bebetin. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, terdakwa mantan Ketua LPD Bebetin I Cening Wartana (56) dinyatakan bersalah dalam dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Selain divonis dua tahun, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu lebih rendah setahun dari tuntutan jaksa.

JPU Putu Agus Eka Sabana Putra sebelumnya menuntut terdakwa dihukum selama tiga tahun. Terdakwa dalam perkara ini tidak dibebankan membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara karena yang bersangkutan sudah mengembalikannya saat di penyidikan. Atas vonis itu, baik jaksa maupun pihak terdakwa masih menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, saat di penyidikan kepolisian, disebutkan terdakwa melakukan dugaan korupsi dengan pola hukum mencairkan sejumlah kredit fiktif dan tak sesuai prosedur dengan total



Bali Post/asa

DIADILI - Mantan Ketua LPD Bebetin I Cening Wartana saat diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dia dinyatakan bersalah dan dihukum selama dua tahun.

kredit hingga Rp 2.415.500.000. Salah satu contohnya ada pinjaman yang satu orang menggunakan tiga nama dengan data atau dokumen yang diduga palsu. Desa Pakraman Bebetin sempat memediasi dalam menyelesaikan

kasus tersebut secara kekeluargaan, setelah Wartana diberhentikan dengan tidak hormat pada tahun 2016 silam. Hanya saat itu tidak ada hasil positif, sehingga kasusnya dilaporkan ke ranah hukum. (kmb37)

Edisi : Kamis, 23 Mei 2019

Hal : 4



KPK Dampingi Pemerintah Daerah Tagih Pajak

Bangli (Bali Post) -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi pemerintah daerah dalam penagihan pajak untuk seluruh jenis pajak. Ini dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Demikian diungkapkan Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli I Gede Suryawan saat penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Rabu (22/5) kemarin.

Disebutkan Suryawan, ada sebelas jenis pajak yang akan dikawal oleh KPK dalam penagihannya. Yaitu Pajak PBB-P2, BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir dan pajak hiburan.

Mengenai penyerahan SPPT kemarin, Suryawan menjelaskan bahwa penyerahan SPPT PBB-P2 bertujuan untuk mempercepat proses pemberian layanan kepada masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak PBB-P2 sehingga masyarakat wajib pajak PBB-P2 segera dapat menunaikan kewajibannya.

Dikatakannya, berdasarkan rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, bahwa untuk tahun 2020 bagi hasil pajak dan retribusi daerah, formulanya akan disesuaikan dengan realisasi pembayaran pajak oleh masyarakat masing-masing desa. Salah satu tujuan perubahan formula ini agar masing-masing perbekel dan lurah saling berpacu untuk mendorong masyarakatnya

untuk melakukan kewajiban membayar pajak.

Sementara itu, Bupati Bangli diwakili Asisten I Setda Kabupaten Bangli I Nyoman Puja mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangli dari sisi jumlah masih relatif kecil. Karenanya menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan PAD. "Untuk itu sumber-sumber PAD tersebut harus dijaga, dipelihara dan ditingkatkan, agar tetap dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD," kata Puja.

Ditambahkannya, data PBB-P2 adalah salah satu hal yang perlu ditata keberadaannya. Baik menyangkut data wajib pajaknya maupun data piutang/tunggakan pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselesaikan. Pihaknya mengapresiasi langkah-langkah dalam penyerahan/pendistribusian SPPT PBB-P2 yang tentu memerlukan penanganan yang taktis dengan melibatkan berbagai pihak mengingat wajib pajak PBB-P2 tersebar di seluruh pelosok pedesaan yang secara sosiologis lebih dekat hubungannya dengan aparat terbawah, baik perbekel/lurah maupun kelian banjar dinas.

Melalui kesempatan kemarin, pihaknya berharap para lurah dan perbekel dapat berperan menyebarkan melalui kepala lingkungan, kelian dinas, banjarnya masing-masing dan mendorong masyarakatnya yang memiliki SPPT PBB P2 untuk membayar pajak melalui bank BPD, LPD, Koperasi, Kantor Pos dan tempat pembayaran lainnya yang sudah online. (kmb40)

Edisi : Kamis, 23 Mei 2019

Hal : 14



14 RS Ajukan Klaim Rp 4,2 Miliar Lebih Hanya Rp 883 Juta yang Direkomendasikan BPKP

PENANGANAN pengungsi bencana erupsi Gunung Agung menyisakan persoalan. Utamanya terkait klaim rumah sakit (RS) yang belum dibayarkan sejak 2017. Saat kondisi tanggap darurat, rumah sakit memang diminta melayani pengungsi yang sakit tanpa dikenakan biaya.

"Saya juga terima surat klaim dari RS Sanjiwani Gianyar kemarin. Sebenarnya kalau terkait penanganan pengungsi yang dalam kategori sakit, yang kita se-

raahkan atau limpahkan ke beberapa RS itu sesungguhnya dalam kondisi tanggap darurat," ujar Kepala BPBD Provinsi Bali I Made Rentin, Selasa (7/5) kemarin.

Sesuai aturan manajemen kebencanaan, lanjut Rentin, ketika sudah ada pernyataan tanggap darurat maka yang digunakan adalah dana *on call* atau dana siap pakai (DSP). Lantaran masih ada kewajiban pembayaran saat kondisi normal sekarang, pihaknya harus berkoordinasi dan melaporkan kembali kepada BNPB. Begitu juga berkoordinasi dengan BPBD Karangasem karena keputusan tanggap darurat dulu dikeluarkan oleh Bupati Karangasem.

"Proses ketika kita masih punya utang, kita perlu duduk bersama. Dalam arti, siapa sih yang punya kewajiban? Karena ketika kita gunakan aturan bahwa di posisi keadaan tanggap darurat, tentu ini sudah lewat waktu," jelasnya.

Menurut Rentin, ada 14 rumah sakit yang mengajukan permohonan klaim biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana erupsi Gunung Agung. Total klaim yang diajukan pada periode September 2017 sampai Februari 2018 mencapai Rp 4.207.077.402. Namun hanya Rp 883.022.800 yang menurut hasil revidi BPKP dapat diyakini kebenaran dan dapat diajukan sebagai DSP ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Sisanya dikoreksi lantaran data pasien tidak dilengkapi dengan NIK unik sebesar Rp 1.319.275.701, klaim biaya kesehatan bukan pada periode status tanggap darurat sebesar Rp 1.773.960.901, dan ada pasien bukan pengungsi yang berasal dari kawasan rawan bencana (KRB) sebesar Rp 230.818.000.

"Proposal permohonan klaim kesehatan sesuai rekomendasi BPKP daerah Perwakilan Bali (sebesar Rp 883 juta - red), sudah diajukan

BPBD Karangasem ke BNPB. Untuk sisanya, tanggal 14 Mei ini baru dirapatkan oleh pihak Pemkab Karangasem," imbuhnya.

Sementara itu, 14 rumah sakit yang mengajukan permohonan klaim yakni RSUD Karangasem, RSUD Klungkung, RSUD Wangaya, RSUP Sanglah, RS Jiwa Provinsi Bali, RSUD Bangli, RSUD Mangusada, RSUD Sanjiwani, BRSU Tabanan, RSUD Negara, RSUD Buleleng, RSU Kerta Usada, RS Ari

Canti, dan RS Bhayangkara Trijata. Sedikitnya ada lima rumah sakit yang jumlah klaimnya menjadi nol rupiah setelah dikoreksi BPKP. Masing-masing RS Jiwa Provinsi Bali dengan klaim awal Rp 440.470.800, RSUD Negara dengan klaim awal Rp 5.773.400, RSU Kerta Usada dengan klaim awal Rp 3.991.200, RS Ari Canti dengan klaim awal Rp 6.704.000, dan RS Bhayangkara Trijata dengan klaim awal Rp 3.949.200. (kmb32)

Edisi : Rabu 8 Mei 2019

Hal : 1



Bupati Mahayastra Hibahkan Truk Sampah kepada Banjar Taman Kaja Ubud

PEMERINTAH Kabupaten Gianyar menghibahkan satu unit truk kebersihan kepada Banjar Taman Kaja, Desa Ubud. Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Gianyar Made Mahayastra, diterima Kepala Lingkungan dan Klian Adat Taman Kaja Nyoman Wirnata di areal Wantilan Pura Desa Taman Kaja, Senin (6/5).

Kepala Lingkungan Taman Kaja Nyoman Wirnata mengatakan, Taman Kaja memiliki komitmen kuat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Program-program kebersihan sudah rutin dilaksanakan, seperti pengelolaan bank sampah oleh PKK setempat, gotong royong warga, dan swadaya kebersihan menggunakan mobil *pick up*. "Karena swadaya yang ada terasa kewalahan, kami ajukan pro-

posal untuk pengadaan truk sampah pada tahun 2018 lalu," ujarnya.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra menilai Taman Kaja merupakan banjar kecil yang memiliki masyarakat yang solid dan satu visi dalam membangun wilayahnya. Hal tersebut membuatnya untuk tidak ragu-ragu dalam menggelontorkan bantuan demi kepentingan banjar setempat. Selain itu, pertimbangan letak Banjar Taman Kaja juga berada dalam wilayah daerah pariwisata di Ubud. "Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk lingkungan," ujar orang nomor satu di Gianyar ini yang saat itu didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar I Wayan Kujus Pawitra.

Bupati Mahayastra menekankan, Ubud sebagai ikon pariwisata tidak boleh kumuh. "Ubud harus bersih,

bebas dari sampah plastik, dan limbah. Juga penataan kabel, kami rencanakan rampung tahun 2020 agar tidak terkesan semrawut, dan setiap upacara adat agar tidak sampai listrik dimatikan," katanya.

Bupati Mahayastra juga menyinggung soal pembangunan Pasar Ubud. Masyarakat setempat diminta untuk bersabar. Sebab, saat ini Pemkab Gianyar masih fokus terhadap revitalisasi Pasar Sukawati. "Pasti akan saya selesaikan perlahan-lahan," katanya.

Bupati Mahayastra meminta agar truk sampah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Dia berharap, lingkungan di Taman Kaja menjadi semakin bersih dengan adanya truk sampah. Ia juga berpesan agar masyarakat di Taman Kaja mempertahankan kebanggaannya atas iden-

titas sebagai komunitas yang kuat. "Kalau sudah solid, satu visi, mohon bantuan bentuk apa pun, pasti akan saya usahakan," tegasnya.

Bupati Mahayastra menambahkan, ke depan setiap desa harus memiliki manajemen pengelolaan sampah. Lengkap dengan armada pengangkut sampah dan petugasnya, termasuk juga ada alat pemecah dan mesin komposting. "Selain itu, ada bank sampah agar masyarakat termotivasi untuk melakukan pemilahan dan menabung sampah secara bertahap dan berkelanjutan," tandasnya. (ad333)

TRUK SAMPAH - Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat meresmikan truk sampah sebagai hibah untuk Banjar Taman Kaja, Ubud.

Edisi : Rabu 8 Mei 2019

Hal : 9



Dana Kebencanaan Gunung Agung Belum Cair

Klaim di RSUD Sanjiwani Rp 274 Juta

Gianyar (Bali Post) -

Dana kebencanaan untuk korban erupsi Gunung Agung di RSUD Sanjiwani belum dibayar hingga pertengahan 2019 ini. Nilai rekap klaim pengungsi di rumah sakit itu mencapai Rp 274.031.122. Hingga kini, pihak rumah sakit yang berlokasi di Jalan Ciung Wanara itu hanya menunggu kapan klaim tersebut akan dibayar.

Berdasarkan data di RSUD Sanjiwani, tercatat rekap klaim pengungsi atas biaya Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) sebanyak 99 kasus dan biaya Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) 132 kasus. Dari jumlah kasus ini, RJTL tercatat memakan biaya Rp 178.488.420 dan RITL Rp 94.592.702, sehingga total biaya menjadi Rp 274 juta lebih.

Dikonfirmasi Selasa (7/5) kemarin, Direktur RSUD Sanjiwani dr. Ida Komang Upeksa mengatakan, pasien yang dirawat tersebut kebanyakan bukan akibat bencana, seperti tumor,

infeksi, patah tulang dan semacamnya. "Kalau karena bencana kan biasanya terkena lahar. Jadi, sebenarnya karena rumah sakit di wilayah timur tutup, sehingga pasien dibawa ke sini," katanya.

Menurut Upeksa, pihaknya tetap berkoordinasi terkait pembayaran tersebut. Namun, pihaknya juga masih menunggu, terlebih kondisi serupa juga dialami hampir seluruh rumah sakit yang menangani korban bencana Gunung Agung. "Pembayaran itu biasanya sama. Kalau kabupaten lain belum, ya di sini juga

belum," ujarnya.

Guna mempercepat proses spencairan dana itu, kata Upeksa, pihaknya sudah mengajukan sejumlah persyaratan seperti klarifikasi berkas. "Kita diminta klarifikasi berkas klaim. Kita kirim ke Dinas Kesehatan, dan dari sana dibawa ke Badan Penanggulangan Bencana Pusat," tegasnya. (kmb35)

Dr. Ida Komang Upeksa

Edisi : Rabu 8 Mei 2019

Hal : 9



Rusak Akibat Gempa Lombok

Dapat 24 Paket Bantuan Rehab Gedung Sekolah

Amlapura (Bali Post) -

Gempa Lombok yang terjadi beberapa waktu lalu membuat sejumlah fasilitas bangunan gedung sekolah di Karangasem mengalami kerusakan. Atas kondisi itu, pemerintah pusat memberikan bantuan 24 paket rehabilitasi gedung yang rusak itu.

Kepala Disdikpora Karangasem I Gusti Ngurah Kartika mengatakan, akibat gempa Lombok yang melanda Karangasem mengakibatkan puluhan gedung SD maupun SMP mengalami kerusakan. Kategori rusaknya dari ringan, sedang, hingga berat. Pemerintah pusat memberikan bantuan 24 paket perbaikan atau rehabilitasi terhadap gedung yang mengalami kerusakan itu.

"Kita dapat 24 paket rehabilitasi gedung sekolah yang rusak. Bantuan itu termasuk bantuan pascabencana. Perbaikan itu akan diarahkan ke sejumlah sekolah yang gedungnya mengalami kerusakan. Di antaranya sekolah di Tiyingtali, Bunutan dan sekolah lainnya yang terdampak gempa Lombok itu," ujarnya. Bantuan itu diharapkan segera dapat direalisasikan.

Sampai saat ini, kata Kartika, pihaknya masih terus berupaya menambah sarana prasarana pendidikan. Salah

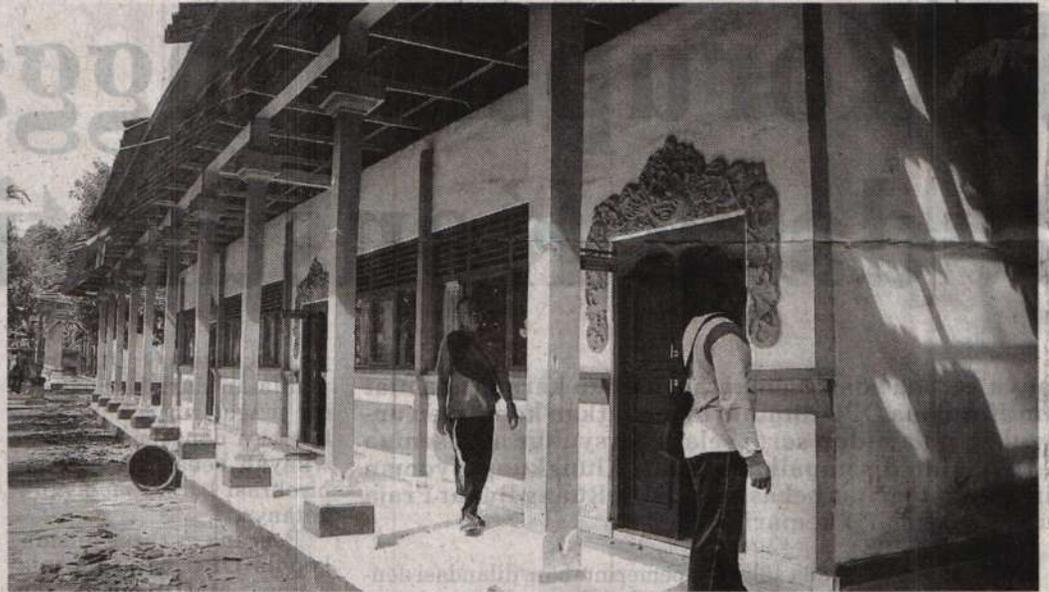
satunya pengadaan komputer untuk siswa SMP. Pasalnya, pelaksanaan UNBK di Karangasem baru 13 sekolah SMP saja yang mampu menggelar UNBK. Sedangkan 38 sisanya masih melaksanakan UNKP. "Tahun ini, kita terus berupaya pengadaan sarana prasarana komputer, agar ke depannya semua SMP bisa melaksanakan UNBK," ujarnya.

Terkait kendala pendidikan khusus di daerah-daerah

terpencil, Kartika menegaskan tidak ada masalah berarti dalam keberlangsungan pendidikan di pinggiran itu. Ditegaskan, pendidikan masih berjalan lancar. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya keluhan guru-guru yang mengajar di pinggiran. Seperti di Tiyantar, di Seraya, dan daerah lainnya.

"Selama ini sih kita belum menerima ada guru mengeluh. Logikanya sebagai pegawai harus siap ditugas-

kan di mana saja," tambah Kartika. Kalau tidak mau ditugaskan di daerah itu, terus siapa lagi yang disuruh mengajar. Selama ini yang menjadi sorotan paling jarak tempuh siswa menuju sekolah. Pihaknya bangga seperti di Desa Tenganan, ada anak kelas III SD setempat, semangat bersekolah dengan menempuh waktu 5 jam pulang pergi demi menuntut ilmu, mengejar cita-citanya kelak ingin jadi guru. (kmb41)



Bali Post/kmb41

GEDUNG SEKOLAH RUSAK - Gedung SDN 1 Tiyingtali yang rusak akibat gempa Lombok.

Edisi : Rabu 8 Mei 2019
Hal : 11



BRSUD Tabanan Ditunggaki Utang Rp 15 Miliar



Nyoman Susila

TABANAN, NusaBali

Klaim pembayaran kesehatan bagi masyarakat oleh BPJS-JKN di BRSUD Tabanan belum dibayar untuk Maret dan April 2019. Akibatnya, operasional dan pembelian obat di BRSUD Tabanan terpaksa *ngutang*. Meskipun demikian tidak sampai mengganggu pembayaran gaji tenaga medis.

Berdasarkan data, rata-rata klaim pelayanan kesehatan di BRSUD Tabanan tiap bulan

mencapai Rp 7,5 miliar. Karena terjadi tunggakan oleh BPJS pada Maret dan April sehingga total tunggakan mencapai Rp 15 miliar.

Direktur BRSUD Tabanan dr Nyoman Susila mengatakan memang dua bulan yakni Maret dan April, BPJS belum membayar klaim. Dan saat ini sudah akhir Mei. "Rata-rata per bulan klaim yang belum dibayar Rp 7,5 miliar," ujarnya, Rabu (22/5).

Akibatnya BRSUD Tabanan terpaksa harus utang obat ke rekanan. Lantaran sudah menjadi langganan bertahun-tahun, rekanan memaklumi kondisi dimaksud. "Karena kami sudah berlangganan mereka sudah mengerti meski ada komplain dari penyedia obat atas tunggakan itu," imbuh Susila.

Sementara Humas BPJS Denpasar Dayu Eka ketika dikonfirmasi melalui telepon terkait tunggakan klaim tersebut, menyatakan akan berkoordinasi dengan bagian pelayanan. "Saya konfirmasi dulu ke bagian pelayanan, nanti saya hubungi," ucapnya. **des**

Edisi : Kamis, 23 Mei 2019

Hal : 7



Korupsi 2,4 M, Ketua LPD Bebetin Divonis 2 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Pengadilan Tipikor Denpasar menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ketua LPD Desa Adat Bebetin, Sawan, Buleleng, I Cening Wartana, 55, karena terbukti melakukan korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin Rp 2,4 miliar dalam sidang yang digelar Rabu (22/5).

Dalam putusannya, majelis hakim pimpinan Ni Made Sukerani menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp 2,4 miliar. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 64 KUHP.

Dalam pertimbangan memberatkan majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi. Sementara pertimbangan meringankan, terdakwa menyesal dan sudah mengembalikan kerugian negara. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama dua tahun dikurangi masa penahanan," tegas hakim Sukerani.

Terdakwa bebas dari kewajiban mengganti kerugian negara karena sebelumnya sudah menipiskan kerugian negara di kejaksaan. Usai pembacaan putusan, terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU)



TERDAKWA I Cening Wartana, 55, saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (22/5). • NUSABALI/REZA

Putu Agus Eka Sabana Putra dkk juga menyatakan pikir-pikir. Apalagi putusan masih dibawah tuntutan 3 tahun penjara. "Lami pikir-pikir," tegas JPU.

Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Ketua LPD Desa Bebetin dibantu Kadek Rentiasih meloloskan beberapa kredit yang diajukan warga meskipun tanpa dilengkapi jaminan kredit. Selain itu, ada juga beberapa kredit fiktif yang menggunakan KTP orang lain. "Terdakwa Cening mengetahui bahwa kredit yang diajukan saksi menggunakan identitas orang lain. Tidak hanya itu, saksi juga mengajukan kredit tidak

sesuai prosedur. Salah satunya tidak dilengkapi jaminan kredit dan plafon pinjaman," beber JPU.

Meski begitu, terdakwa tetap memerintahkan saksi Ni Luh Swari (kasir LPD) untuk mencairkan dana tersebut. Setiap pencairan terdakwa mendapatkan fee dari pemilik kredit. Karena mudah mendapatkan uang, Cening pun semakin ketagihan. Total kredit yang dicairkan Rp 2,9 miliar. Dari 31 kredit yang diajukan, terdapat 27 berkas kredit yang menjaminkan satu buah buku sertifikat hak milik atas nama Wayan Sulingga dengan luas tanah 2.600 meter persegi. rez

Edisi : Kamis, 23 Mei 2019

Hal : 5



Utang Pengungsi Rp 3,32 M Belum Dibayar

Kepala Pelaksana BPBD Karangasem berharap semua biaya kesehatan yang diajukan bisa dibayar oleh BNPB.



Rapat memverifikasi utang kesehatan pengungsi di aula Kantor Dinas Kesehatan Karangasem, Jalan Ahmad Yani Amlapura, Selasa (21/5).

AMLAPURA, NusaBali

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem segera mencairkan dana Rp 883,022 juta untuk bayar utang pelayanan kesehatan pengungsi di 9 rumah sakit kabupaten/kota se-Bali. Padahal selama tanggap darurat Gunung Agung status awas tahun 2017-2018, utang pelayanan kesehatan mencapai Rp 4,207 miliar. Hanya saja BNPB menyetujui Rp 883,022 juta. Sisa utang Rp 3,32 miliar akan kembali dibahas.

Besaran utang itu terungkap saat verifikasi utang pelayanan kesehatan melibatkan tiga utusan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Karangasem, Jalan Ahmad Yani Amlapura, Selasa (21/5). Ketiga utusan BNPB itu yakni Luqmanul Hakim (Kasubdit Pengendalian Operasi), Muji GHBM (Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan), dan M Awaludin Afief (Analisis Data dan Informasi). Saat verifikasi,

Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, melaporkan berdasarkan hasil audit biaya kesehatan untuk pengungsi selama tanggap darurat di seluruh Bali mencapai Rp 4,207 miliar. BPBD mengajukan

dana ke BNPB sebesar Rp 4,027 miliar. Selanjutnya BNPB melakukan kajian dan verifikasi. Hasil verifikasi BNPB menyetujui Rp 883,022 juta. "Maka sebanyak itu yang diusulkan pencairannya, sisanya dibicarakan dalam rapat, Rabu (29/5) nanti," jelas Ida Bagus Ketut Arimbawa.

Ida Bagus Ketut Arimbawa berharap agar semua biaya kesehatan yang diajukan bisa dibayar BNPB. Belum terbayar Rp 3,32 miliar. "Kekurangannya kami bicarakan dalam rapat melibatkan BPKP, RSUD se-Bali, BPBD dan BNPB, difasilitasi Dinas Kesehatan Karangasem," ungkapnya. Dijelaskan, kedatangan tiga utusan BNPB untuk melakukan verifikasi atas permohonan penggantian biaya kesehatan korban bencana erupsi Gunung Agung di Karangasem.

Luqmanul Hakim sebagai Kasubdit Pengendalian Operasi BNPB mengatakan, hasil verifikasi biaya yang dikeluarkan menangani korban erupsi gu-

nung Agung sesuai yang diajukan BPBD Karangasem Rp 4,207 miliar, sementara disetujui Rp 883,022 juta. "Sebesar itulah hasil verifikasi yang kami lakukan, dananya segera kami cairkan," ungkap Luqmanul hakim.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, mengatakan klaim biaya kesehatan pengungsi ditangani BPBD Karangasem. Setelah datanya terhimpun, dilaporkan ke BNPB. "Kami hanya memfasilitasi saja," jelasnya. Ia berharap ada solusi membayar utang pelayanan kesehatan di RSUD se-Bali. Sebab, saat musim ngungsi, warga Karangasem mengungsi tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali. Dari ratusan ribu pengungsi, banyak juga yang kesehatannya terganggu. Sehingga menjalani rawat inap di RSUD terdekat, pihak pengungsi selama menjalani perawatan tidak mengeluarkan biaya karena ditanggung pemerintah. **k16**

Edisi : Kamis, 23 Mei 2019

Hal : 8



Rp 93,07 M untuk Gaji Ke-13 dan THR PNS

Belum Terima Tenaga Kontrak Honororer

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total anggaran yang disiapkan Rp 93,07 miliar. Rencananya, pencairan gaji ke-13 dan THR tersebut dilakukan pekan depan.

Sementara itu, pegawai non PNS (tenaga kontrak dan honorer, Red) belum bisa menerima THR dan gaji ke-13 tersebut. Sesuai Perbup Nomor 36 Tahun

2019 tentang Pemberian THR bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan (CPNS), disebutkan bahwa THR cair paling cepat 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Gede Suyasa, Selasa (14/5), mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 serta THR bagi PNS lingkup Pemkab Buleleng. Anggaran ini sesuai APBD Induk 2019 mencapai Rp 93,07 miliar. Sesuai

rencana, THR akan cair pada Jumat (24/5).

Menurut Suyasa, Pemkab Buleleng tak kesulitan dalam mencairkan gaji ke-13 dan THR karena cukup diatur dengan Perbup. "Awalnya, didasari perda. Kalau dasarnya perda, tidak bisa selesai tepat waktu. Sekarang cukup perbup," kata Suyasa.

Suyasa menyebut, draft peraturan bupati (perbup) pencairan gaji ke-13 dan THR ini sudah tuntas disusun. "Masih dianalisis di Bagian Hukum Setda Buleleng. Setelah itu ditandatangani, ang-

garannya sudah bisa diampirah. Pasti cair tepat waktu," imbuhnya.

Jelas dia, gaji ke-13 serta THR untuk para pegawai dan pejabat daerah Rp 93,07 miliar ini terdiri dari gaji ke-13 Rp 46,538 miliar, dan THR Rp 46,535 miliar. Gaji ke-13 serta THR yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja.

Disinggung tentang THR dan gaji ke-13 untuk non PNS (tenaga kontrak dan honorer, Red), Suyasa menegaskan dalam ketentuan tentang

pembayaran gaji ke-13 dan THR, tak ada untuk non PNS. "Jika di luar PNS kami berikan, tentang akan bertentangan dengan aturan. Jika di luar aturan, malah akan jadi temuan," tandasnya.

Mengenai jumlah pegawai non PNS di lingkup Pemkab Buleleng, Suyasa menyebut tidak memiliki data. Karena non PNS itu ada di bawah SKPD terkait. "Misalnya tenaga kontrak, itu langsung ke SKPD yang mempekerjakan. Di kami (BKD,Red) tidak ada data jumlah pegawai non PNS," ujarnya. **k19**

Edisi : Rabu, 15 Mei 2019

Hal : 4



Terkendala Armada Pengangkut Sampah, TPS di Kekeran Terpaksa Dioperasionalkan

MANGUPURA, NusaBali

Tempat pembuangan sampah (TPS) Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, tak sepenuhnya dihentikan operasionalnya, meski telah ditutup sementara pascaditemukannya sampah medis berserakan. Pihak desa terpaksa menggunakan tempat itu untuk pembuangan sisa sampah setelah tak terolah.

Perbekel Kekeran I Nyoman Suardana, mengatakan semenjak ditemukannya sampah medis sudah ada komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung untuk menutup TPS tersebut. Dinas LHK juga akan menyiapkan armada untuk membuang sampah ke TPA Suwung, Denpasar Selatan. Tapi sampai sekarang belum ada armada yang masuk ke Desa Kekeran.

"Dinas LHK akan memberikan armada untuk pengangkutan sampah residu yang tak terolah. Namun, hingga kini belum ada, sehingga sisa sampah masih kami buang di tempat itu (TPS yang ditutup)," ungkap Suardana, Selasa (14/5).

Disinggung apakah akan terus membuang sampah di tempat



• NUSABALI/ARI SISWANTO

TEMPAT pembuangan sampah (TPS) sementara di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi masih 'dioperasionalkan' karena terkendala armada untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

tersebut, Suardana tak berani memastikan. Namun, pihaknya mengaku akan menganggarkan armada di desa secara langsung pada anggaran perubahan 2019 nanti. "Kalau memang seandainya itu tidak ada solusi, kami akan anggarkan pada perubahan. Itu pun kalau anggaran mencukupi," tegasnya.

Suarda pun berharap Dinas

LHK memfasilitasi menyiapkan TPS yang bisa dipakai oleh Desa Kekeran atau desa lainnya. Dengan demikian, memudahkan desa membuang sisa sampah yang tidak bisa diolah. "Kalau per kecamatan ada (TPS) bisa cepat. Kalau pun misalkan kita membuang sampah ke Suwung, itu kan lama, orientasi waktunya bisa sampai sore," katanya.

Sementara Kepala Dinas LHK Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan, menyadari kesulitan dari pihak Desa Kekeran. Karenanya untuk sementara diberikan perpanjangan membuang sisa sampah pada TPS tersebut, sampai ada armada pengangkutan yang dirancang pihak desa setempat.

"Ini opsinya tidak ada, kalau kami tutup itu (TPS), di mana mereka akan membuang sampah. Karena layanan belum nyampai di sana," kata Merthawan.

Mengenai harapan pihak desa agar dibantu armada dari Dinas LHK untuk mengangkut sisa sampah yang tak terolah, Merthawan menyatakan belum bisa dilakukan. Sebab, saat ini pihaknya juga masih kekurangan armada. "Armada kami kurang. Jadi, kami mengangkut pada jalur utama, kalau Kekeran kan jalurnya ke tengah, kami tidak sampai ke sana," ucap Merthawan.

"Semoga pengadaan truk pengangkut yang direncanakan pihak desa bisa terwujud, dengan begitu pengangkutan sampah bisa langsung ke TPA Suwung," tandasnya. **asa**

Edisi : Rabu 15 Mei 2019

Hal : 2



Kenaikan PBB Terus Menuai Protes

Perbekel Minta Kenaikan NJOP Dikaji Ulang

Kalau semua mengeluh dan tidak membayar pajak, nanti siapa yang akan membangun daerah ini. (Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana).

SINGARAJA, NusaBali

Kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Buleleng, terus menuai protes. Kali

ini, kalangan perbekel atau kepala desa mendesak agar penetapan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikaji ulang. Karena penetapan tarif NJOP itu telah memicu kenaikan PBB P2 hingga 1.000 persen.

Kenaikan PBB P2 itu juga dinilai berdampak penurunan pendapatan daerah dari sektor PBB P2.

Keluhan kalangan perbekel ini menyusul banyaknya keluhan warga yang disampaikan kepada aparat desa karena tingginya kenaikan PBB P2. Kalangan perbekel pun berencana melayangkan surat kepada DPRD Buleleng guna menyikapi masalah tersebut. "Banyak warga yang menyampaikan keluhannya. Kami sudah merencanakan nanti,

terutama mungkin pekan depan, akan melanjutkan keluhan warga ini ke DPRD Buleleng," ungkap Perbekel Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Mangku Nengah Sudarsana, Selasa (21/5).

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Forkom Perbekel se Kabupaten Buleleng ini mengatakan, pihaknya tidak akan memperlakukan ada kenaikan PBB P2 demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Ia hanya mempermasalahkan kajian penetapan tarif NJOP yang berdampak tingginya PBB P2 yang mesti dibayarkan oleh wajib pajak (pemilik lahan, Red). Menurutnya, kajian NJOP tersebut tidak masuk akal karena kenaikan tarif NJOP jadi sangat tinggi antara 400

persen hingga 1.000 persen. Tak terkecuali lahan-lahan kritis dengan hasil tidak menentu, harus membayar PBB P2 dengan kenaikan 1.000 persen. Dicontohkan, lahan seluas 1 hektare dengan penghasilan tidak menentu, bisa membayar pajak hingga Rp 4.000.000. "Apakah hanya karena objek itu berada di jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa, atau semuanya dipukul rata. Nah, ini yang akan menjadi usulan kami, tolong penetapan NJOP itu dikaji ulang. Apakah wajar kenaikan itu rata-rata diatas 400 persen," tegasnya.

Masih kata Mangku Darsana, dengan dikaji ulang penetapan NJOP itu akan memberi kepastian bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Ia

tidak sependapat dengan adanya upaya negosiasi kembali ketika ada yang mengajukan keberatan. Karena terhadap wajib pajak yang tidak melayankan keberatan, kemungkinan urung membayar pajak. "Ini tentu akan berdampak terbalik, ada keinginan menaikkan PAD justru tidak terpenuhi, karena bisa jadi masyarakat jadi enggan membayar pajak karena pajaknya terlalu tinggi," ujarnya.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat dikonfirmasi, mengakui masih ada yang mengeluh soal kenaikan PBB P2. Namun hal itu mesti disadari karena penyesuaian tarif NJOP sudah cukup lama tidak dilakukan, hingga menjadi temuan BPK RI. "Wajar ada yang

mengeluh karena memang baru kali ini dinaikkan. Jadi kenaikan itu ada kelipatannya. Ini mohon dimaklumi karena sempat menjadi temuan BPK, dan tidak semua naik, justru ada yang turun. Kalau semua mengeluh dan tidak membayar pajak, nanti siapa yang akan membangun daerah ini," katanya.

Bupati mengaku masih memberikan peluang bagi wajib pajak mengajukan keberatan hingga dua tahun. Karena keberatan itu akan dievaluasi untuk dapat memberikan keringanan pajak. "Saya sudah evaluasi dan bicarakan hal ini. Silakan kalau ada yang keberatan ajukan saja. Nanti ada tim lagi yang turun memastikan kondisi objek pajaknya. Siapa

tahu dulunya vila, kemudian telah berubah menjadi lahan kosong, tentu ini menjadi pertimbangan memberikan keringanan. Atau sebaliknya, tentu wajar ada kenaikan pajak," tandasnya.

Untuk diketahui, penyesuaian tarif NJOP tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang PBB P2. Dalam penyesuaian itu, Pemkab Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) telah menyewa tim appraisal menghitung perubahan tarif NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan untuk PBB P2 tahun 2019, yang tertuang dalam SPPT tahun 2019. **k19**

Edisi : Rabu, 22 Mei 2019

Hal : 4



Penanganan Banjir di Kota Singaraja

Normalisasi Sungai Mulai Digarap

SINGARAJA, NusaBali

Penanganan banjir di wilayah Kota Singaraja, Buleleng, dengan normalisasi sungai Tiing Tali dan pembuatan sodetan, mulai dikerjakan. Ini ditandai dengan aktivitas pembongkaran trotoar yang menutup irigasi Tiing Tali di Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, dimulai Selasa (28/5) pagi.

Selanjutnya, pembuatan sodetan dari Jalan Serma Karma menuju irigasi di timur lampu Traffic Light simpang Jalan A Yani-Jalan Pantai Penimbangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buleleng Ketut Suparta Wijaya saat dikonfirmasi terkait aktivitas pembongkaran tersebut, menjelaskan kegiatan penanganan banjir di wilayah perkotaan Singaraja dilakukan Dinas PU Provinsi Bali dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, atas usulan dari Pemkab Buleleng. Disebutkan, untuk normalisasi irigasi Tiing Tali dilakukan oleh Dinas PU Provinsi. Sedangkan pembuatan sodetan dilakukan oleh BWS Bali Penida. "Daerah irigasi Tiing

Tali dari Desa Sambangan sampai Desa Baktiseraga itu akan dinormalisasi. Nah, irigasi itu kewenangan dari PU Provinsi," terangnya.

Masih kata Suparta Wijaya, pembangunan sodetan juga segera akan dilaksanakan oleh BWS Bali Penida, karena proses tender sudah selesai. Pembangunan Sodetan dan normalisasi ini akan mampu mengurangi luapan air di Jalan Laksamana termasuk di kawasan perumahan Jalak Putih Singaraja. "Intinya bagaimana air tidak lagi meluap sampai ke kawasan Jalak Putih dan sekitarnya. Maka diperlukan normalisasi dan pembuatan sodetan," katanya.

Disinggung rencana sodetan, Suparta mengakui tadinya sodetan dibuat langsung menuju ke Tukad (Sungai) Banyumala yang berada di sisi timur dari irigasi Tiing Tali. Namun karena persoalan teknis dimana beberapa titik kedalaman sodetan bisa mencapai 6 meter, akhirnya rencana sodetan itu dirubah dari Jalan Serma Karma menuju irigasi di timur Traffic Light, Jalan A

Yani. "Kalau bicara idealnya memang langsung ke Tukad Banyumala, tetapi dari sisi teknis ini tidak memungkinkan, karena kedalaman beberapa titik itu bisa sampai 6 meter. Jadi rencana itu dirubah ke Jalan Serma Karma," jelasnya.

Pantauan di Jalan Laksamana, satu unit alat berat terlihat membongkar trotoar yang ada sisi bagian Utara Jalan Laksamana. Trotoar dibongkar agar memudahkan menormalisasi irigasi Tiing Tali di ruas jalan tersebut. Irigasi ini dinilai menjadi pemicu meluapnya air ketika musim hujan, karena mengalami pendangkalan parah.

Salah seorang warga, Kadek Karang Indrawan mengakui, irigasi yang berada di depan rumahnya kerap menjadi pemicu banjir disaat musim hujan. Ia pun sangat setuju irigasi itu dinormalisasi. "Ia saya sangat setuju dengan pembongkaran ini. Karena setiap tahun, saat musim penghujan ini, daerah ini menjadi langganan banjir karena irigasi ini tidak muat lagi menampung air," ujarnya. **k19**

Edisi : 29 Mei 2019

Hal : 4



Soal Gaji THL Satpol PP/Damkar Macet 4 Bulan

Komisi I Nilai Birokrasi Sudah Kacau

Agar pemerintah memiliki hati dan rasa atas nasib pegawai yang sudah mengabdikan dengan risiko tinggi

GIANYAR, NusaBali

Komisi I DPRD Gianyar menyangkan ribetnya birokrasi di Pemkab Gianyar hingga gaji THL Dinas Satpol PP dan Damkar macet sejak empat bulan.

"Ini tanda birokrasi yang kacau. Bahkan pejabat pemangku kebijakan di Pemkab Gianyar tidak punya rasa atas pend-

eritaan THL ini. Terlebih sejak empat bulan mereka bertugas bertaruh nyawa, malah terancam dirumahkan," ujar Ketua Komisi I DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, Jumat (3/5).

Dengan nada heran anggota politisi asal Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar ini sangat menyangkan adanya pembiaran terhadap legalitas petugas ini. Terlebih di dinas yang bertugas sebagai penegak perda (Satpol PP,Red) dan penyelamat kebakaran (Damkar). "Berarti eksekutif sendiri yang lalai. Karena mempekerjakan orang tanpa SK alias pegawai ilegal. Ironis petugas penegak Perda, dan pejabatnya lempar kesalahan," ujarnya.

Kalaupun memang anggaran tak mencukupi, jelas Ngakan Putra, eksekutif seyogyanya sejak

awal tahun melakukan penyesuaian. Namun kenyataannya, penyisipan pegawai baru terus terjadi dan saat membengkak, petugas yang sudah mengabdikan lama ikut terkungkung dalam status yang tidak jelas ini. "Saat mentok seperti ini, baru ada istilah rasionalisasi. Kenapa tidak dari awal bilang ada rasionalisasi sehingga tidak ada kekecewaan pegawai yang terancam dirumahkan setelah empat bulan bekerja tanpa gaji," tanyanya.

Dalam rapat kerja dengan eksekutif, politisi yang mantan pegiat LSM ini menyebutkan sudah berulang kali mengingatkan agar alur rekrutmen THL ini harus jelas. Diawali dengan kelayakan jumlah petugas THL di masing-masing OPD. Kemudian dilaporkan oleh pimpinan

OPD ke BKPSDM. Namun yang terjadi sekarang BKPSDM tidak memiliki data jumlah THL di masing-masing OPD. "Seorang sekda saja mengakui jika banyak ada pegawai yang belum jelas di Dinas Pol PP dan Damkar. Ini menunjukkan jika sistem di birokrasi ini tidak jalan," sorotnya.

Terlepas dari kacaunya sistem serta komunikasi lintas pejabat ini, Ngakan Putra berharap agar pemerintah memiliki hati dan rasa atas nasib pegawai yang sudah mengabdikan dengan risiko tinggi. Bahkan dari laporan yang diterimanya, bahkan pegawai ini sudah mendapat seragam dan beberapa diantaranya memiliki kemampuan lebih dari ASN sehingga ditempatkan di garda terdepan. "Kami hanya tidak ingin mendengar ada pegawai yang

sudah jatuh ini, malah tertimpa tangga. Artinya tak dapat gaji malah dirumahkan. Saya akan segera memanggil OPD terkait untuk meluruskan ini," tegasnya.

Sebelumnya, ratusan tenaga harian lepas (THL) di Satpol PP dan Damkar Gianyar mengeluh karena gaji mereka macet empat bulan, atau sejak Januari hingga April 2019. Ironisnya, Kamis (2/5), Kepala Satuan Pol PP dan Dampak Gianyar Cokorda Gde Agusnawa, dimutasi hingga para THL gaji mereka tak ada yang mengurus.

Informasi di Kantor Satpol PP setempat, Kamis kemarin, kemacetan gaji sejak empat bulan membuat semangat kerja para THL ini menurun. Para THL kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Utang di warung sudah menumpuk. **nvi**

Edisi : Sabtu 4 Mei 2019

Hal : 6



Kasus Korupsi Dana Hibah Yayasan Al Ma'ruf Dilimpahkan 8 Bulan Lalu, Tak Kunjung Disidangkan

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah Yayasan Al Ma'ruf yang merugikan negara Rp 200 juta dengan tiga tersangka mengeluarkan aroma tak sedap. Perkara yang sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan dari Polresta Denpasar ke Kejari Denpasar sekitar 8 bulan lalu ini nyangkut dan tak kunjung disidangkan tanpa alasan yang jelas.

Kasus ini sendiri sudah menetapkan tiga tersangka namun tidak ditahan. Tiga tersangka tersebut masing-masing H Muhammad Saifudin, Supeni Mayangsari alias Bu Jero dan H Miftah Aulawi. "Perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P-21) dari kepolisian dan dilimpahkan ke kejaksaan harusnya segera disidangkan," tegas sumber di kejaksaan yang ditemui, Minggu (5/5).

Jaksa senior ini mengatakan pihak Kejari Denpasar tidak bisa menghentikan perkara ini dan harus segera menyidangkannya. Apalagi perkara ini sudah dinyatakan lengkap dan dilaku-

kan pelimpahan tahap II yaitu pelimpahan barang bukti dan tersangka. "Kalau sudah dilimpahkan berarti perkara tersebut sudah siap untuk disidangkan. Kejaksaan tidak punya kewenangan untuk mengulur-ulur waktu sidang apalagi menghentikan perkara ini," terang sumber yang juga menegaskan jika perkara tersebut harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar untuk disidangkan.

Bau busuk perkara ini sendiri sudah terlihat saat dilakukan pelimpahan tahap II dari Polresta Denpasar ke Kejari Denpasar pada, Kamis (6/9/2018) lalu. Pasalnya setelah dilakukan pelimpahan, Kejari Denpasar tidak melakukan penahanan untuk ketiga tersangka ini. Beredar kabar ada intervensi khusus dari pejabat kejaksaan agar perkara ini tidak sampai disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. "Ada intervensi dari atas," tegas sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

Sementara itu, Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Agus

Sastrawan yang dikonfirmasi belum mau menjelaskan secara detail perkara tersebut. Ia minta waktu untuk menyampaikan perkara ini secara resmi. "Nanti akan disampaikan secara resmi," tegasnya saat ditemui, Kamis (9/5).

Dugaan kasus korupsi ini berawal pada tanggal 30 Desember 2016 ketika tersangka, H Miftah Aulawi Noor selaku ketua yayasan Al-Ma'ruf Denpasar mengajukan permohonan dana bantuan hibah untuk kegiatan perjalanan Ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam pada APBD Perubahan tahun 2016.

Pengajuan bantuan dana hibah ini dibantu oleh tersangka H Mohamad Saifudin sebagai Pembina yayasan Al-Ma'ruf dan tersangka Supeni Mayangsari. Pemerintah Kota Denpasar kemudian mengucurkan dana hibah sebesar Rp200 juta.

Setelah bantuan dana hibah ini cair, sebagai ketua yayasan dan pemohon dana bantuan hibah, H Miftah Aulawi Noor, tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan hibah untuk kegiatan perjalanan Ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam tersebut.

Ternyata, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan dalam laporan pertanggungjawaban tersangka mempergunakan nota dan kwitansi fiktif. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali menyatakan bahwa perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp200 juta. **rez**

Edisi : Sabtu 11 Mei 2019

Hal : 5



Pembangunan Dermaga Tahap II Masih Lelang

TABANAN, NusaBali

Pembangunan dermaga di areal Danau Beratan, tepatnya di Beratan Indah wilayah Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, kini disebut. Setelah selesai pembangunan tahap I dengan anggaran Rp 2,8 miliar, kini pembangunan tahap II dilanjutkan.

Pembangunan tahap II mendapat anggaran Rp 4,9 miliar dan saat ini masih proses lelang. Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Bali Robert Taufan menjelaskan, bantuan dermaga tersebut menggunakan anggaran APBN. Rencananya pembangunan dilaksanakan tiga tahap. "Sekarang pembangunannya di tahap II, tahap I telah selesai," ujarnya, Jumat (10/5).

Dikatakan, pembangunan tahap II dengan anggaran Rp 4,9 miliar masih proses lelang. Jika proses lelang selesai pembangunan dengan memfokuskan pembuatan dermaga dilanjutkan. Sekaligus dilakukan pembuatan akses jalan warga untuk mencari air kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan kebun. "Yang jelas proses pengerjaannya 5-6 bulan dan harus selesai di tahun 2019. Minggu ini sudah selesai proses lelang,"katanya.

Taufan menjelaskan setelah selesai pembangunan tahap II, barulah dilanjutkan pembangunan tahap III yang pengerjaannya di tahun 2020. Dimana pembangunan difokuskan untuk membangun gedung layanan, gedung penumpang dan rambu suar. Rambu suar wajib diberikan karena berfungsi memberikan informasi pada but yang masih ada di danau saat kawasan Danau Beratan di penuhi kabut. "Penempatan rambu suar ini

sudah kami survai bersama dengan distrik navigasi," jelasnya.

Dirinya menambahkan jika Tabanan mendapat bantuan dermaga dari APBN lantaran Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu adanya usulan dari Bupati Tabanan menginginkan adanya pembangunan dermaga yang sesuai standar. Karena selama ini dermaga yang ada di kawasan Danau Beratan hanya terbuat dari kayu. Bahkan sempat terjadi orang meninggal karena dermaganya jebol.

Taufan kembali menegaskan pembangunan dermaga yang dibuat memang dikerjakan secara bertahap. Karena aliran dana bukan dari swasta melainkan dari APBN. "Dikerjakanya bertahap, ada usulan, penganggaran dan pengerjaan, jadi tidak ada mangkrak ataupun permasalahan karena yang tahap II masih proses lelang," tandasnya.

Hal serupa juga disampaikan sebelumnya oleh Kepala Dinas Perhubungan Tabanan, I Made Agus Harta Wiguna. Bahwa dasar dibuatnya dermaga itu karena di areal Danau Beratan sekarang ini belum ada dermaga yang refrenstatif yang memenuhi standar. Akan tetapi kunjungan di areal Danau Beratan tidak pernah sepi dan wisata air seperti speed boat semakin menggeliat. "Atas semangat itulah Pemkab Tabanan mengusulkan dengan harapan dermaga terwujud menjadi icon baru di Danau Beratan," tegasnya.

Ditambahkan Harta Wiguna, pembangunan dermaga wisata ini mengambil lokasi di Beratan Indah Serasi yang merupakan aset pemda. Karena syarat untuk bisa mendapatkan bantuan dari pusat yakni Pemda harus menyiapkan lahan. **des**

Edisi : Sabtu 11 Mei 2019

Hal : 7



Penciutan Anggaran, Dua Program Disbud Dipangkas



• NUSABALI/DESAK

I Gusti Ngurah Supanji

TABANAN, NusaBali

Keterbatasan anggaran Kabupaten Tabanan tahun 2019 membuat dua program di Dinas Kebudayaan (Disbud) setempat terpaksa dipangkas. Dua program dimaksud yakni pembinaan seni budaya dan rekonstruksi kesenian ditiadakan. Padahal dua program ini, terutama rekonstruksi amat penting untuk memulihkan kesenian yang hampir punah dan punah.

Kepala Disbud Tabanan I Gusti Ngurah Supanji mengakui program itu amat penting. "Mudah-mudahan tahun depan dua program ini bisa jalan," ujarnya, Ju-

mat (17/5). Menurutnya, program rekonstruksi sangat perlu untuk memulihkan kesenian yang hampir punah. Buktinya sejak program ini diwujudkan tahun 2017, beberapa kesenian yang nyaris punah berhasil ditampilkan kembali. Seperti Tari Leko, Gong Slonding dan beberapa kesenian lain. "Karena keterbatasan anggaran, maka kami laksanakan program sesuai prioritas," akunya.

Tak hanya pemangkasan program karena pengurangan anggaran, lanjut Supanji, dana PKB pun ikut kena imbas. Saat ini anggaran PKB tahun 2019 di Tabanan hanya Rp 1,6 miliar, tahun 2018 sempat Rp 1,9 miliar. "Meskipun begitu kami tidak patah semangat, kami akan maksimalkan pekerjaan terutama melestarikan budaya Bali khususnya di Tabanan," tandasnya.

Meskipun program rekonstruksi kesenian ditiadakan, ia mengaku tetap mengidentifikasi sejumlah kesenian khas Tabanan. Rata-rata per tahun Disbud mengidentifikasi tiga kesenian. "Masyarakat yang selama ini memiliki kesenian khas yang belum terekspos bisa diberitahu ke kami," pintanya. **des**

Edisi : Sabtu 18 Mei 2019

Hal : 7



Pura Dadia di Nusa Penida

Kepala Disbudpora

Klungkung Diperiksa

Penyidik tengah mengumpulkan dan menyiapkan berbagai dokumen, untuk pemeriksaan kerugian negara oleh BPK atau BPKP.

SEMARAPURA, NusaBali

Jajaran Sat Reskrim Polres Klungkung mendalami kasus dugaan korupsi hibah Pembangunan Dadia Arya Kenceng, Banjar Cubang, Dusun Cemu-

lik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, senilai Rp 420 juta. Setelah memeriksa sejumlah panitia, petugas meminta keterangan terhadap Kepala Dinas Kepemudaan dan

Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta, Jumat (17/5) pagi.

Selain Mudarta, petugas juga meminta keterangan terhadap Bandahara Bantuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Gusti Ayu Purnami, mengenai hibah tersebut. Mereka sama-sama dimintai keterangan sekitar pukul 09.00 Wita.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Mirza Gu-

nawan mengatakan, mereka diperiksa selama 4 jam. Untuk mengumpulkan keterangan saksi terkait kasus tersebut, di mana penyelidikan kasus dugaan korupsi ini dimulai sejak bulan Maret 2019. "Kami sudah sempat mengecek ke lokasi obyek penerima bantuan itu," ujarnya.

Diakui saat turun pembangunan pura memang ada akan tetapi belum kelar. Penyidik tengah mengumpulkan dan

menyiapkan berbagai dokumen, untuk pemeriksaan kerugian negara oleh BPK atau BPKP, untuk mengecek apakah ada unsur kerugian negaranya.

Untuk di Klungkung ada 8 penerima bantuan hibah untuk urusan kebudayaan di Kabupaten Klungkung, mengembalikan dana hibah sejak Februari 2019 ke kas daerah dengan nominal hingga Rp 1 miliar lebih. Pasalnya penerima hibah yang

bersangkutan merasa tidak mampu mengerjakan tepat waktu dari dana tersebut. Oleh karena itu daripada mereka harus berurusan dengan hukum, mereka lebih memilih mengembalikan uang negara itu. Dalam hal ini penerima hibah untuk Pura Dadia Arya Kenceng, Banjar Cubang, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, senilai Rp 420 juta juga mengembalikan dana tersebut ke Badan

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, Senin (11/3) lalu.

Namun karena mereka membawa uang tunai yang dibungkus plastik, maka uang itu belum bisa diterima dan yang bersangkutan diminta via transfer. Pengembalian dana hibah harus dilakukan transfer ke kas daerah. Karena pengembalian itu tercatat setelah menerima Surat Tanda Setoran (STS). **wan**

Edisi : Sabtu 18 Mei 2019

Hal : 5



PUPRKP Tabanan Anggarkan Rp 3,1 M untuk Pemeliharaan Jalan

TABANAN, NusaBali

Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Kabupaten Tabanan menganggarkan dana pemeliharaan jalan sebesar Rp 3,1 miliar. Jumlah ini berkurang dibanding pada 2018 lalu yang sebesar Rp 3,8 miliar.

Kepala Dinas PUPRKP Kabupaten Tabanan I Made Yudiana, menjelaskan panjang jalan Kabupaten Tabanan sepanjang 863,218 kilometer, dari total tersebut sepanjang 663,110

kilometer sudah dihotmix.

Di tengah keterbatasan anggaran dan skala prioritas pembangunan lainnya, tentu tidak seluruh jalan kabupaten bisa tuntas untuk program hotmix, melainkan dilakukan bertahap. "Tahun ini kami juga prioritaskan pemeliharaan jalan sebesar Rp 3,1 miliar," ungkap Yudiana, Senin (6/5).

Diakuinya memang anggaran pemeliharaan Rp 3,1 miliar berkurang dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp 3,8 miliar. Meskipun

demikian anggaran ini akan dipergunakan maksimal. "Pemeliharaan jalan sebagai upaya menjaga kualitas jalan, dan hanya untuk pengadaan material dan upah tenaga," imbuh Yudiana.

Yudiana mengakui biaya pemeliharaan rutin ini digunakan untuk melakukan perbaikan ruas jalan dengan kondisi kerusakan tidak lebih dari 5 persen. Dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan keadaan ruas jalan sesuai dengan tingkat kerusakan. Begitupun perbaikan

jalan dilakukan, menyesuaikan faktor cuaca, ketersediaan bahan, serta tingkat kerusakan.

Selain pemeliharaan jalan, kata Yudiana, tahun ini program hotmix akan direncanakan untuk empat ruas jalan yang didanai dari dana alokasi khusus (DAK). Di samping ada juga yang didanai dari BKK Provinsi Bali dan BKK Kabupaten Badung. "Namun untuk bantuan BKK Provinsi Bali serta Kabupaten Badung masih menunggu SK untuk ruas yang akan

mendapatkan alokasi dana itu," tuturnya.

Adapun ruas jalan yang akan ditangani DAK adalah jalan Banjar Selabih - Bukit Tumpeng, ruas Mekayu - Pancoran Kecamatan Selemadeg Barat, ruas jalan Desa Serampingan - Kelecing Kecamatan Selemadeg, dan ruas Jelijih - Munduk Ulan.

"Pengerjaan untuk empat ruas jalan tersebut masih proses tender. Diharapkan jika tidak ada kendala, pertengahan Juni sudah mulai kontrak," tandasnya. **des**

Edisi : Selasa 7 mei 2019

Hal : 7



Kediri dan Tabanan Hadapi Kendala di PPDB 2019

**Kecamatan
Tabanan
kekurangan 2
ruang kelas SMP
untuk menampung
64 siswa lulusan
SD. Di Kecamatan
Kediri kurang 4
kelas untuk 128
siswa lulusan SD.**

TABANAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan bersama Dinas Pendidikan Tabanan gelar rapat koordinasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 di ruang Komisi VI

mahami, mereka sudah tahu tempat-tempat siswa yang sesuai zonanya," kata Dirga.

Karena diwajibkan untuk mengikuti aturan di pusat, masyarakat juga diharapkan sering browsing di internet terkait aturan PPDB yang baru. "Masyarakat mohon ikuti aturannya. Kalau tidak diikuti maka Dapodik sekolah itu bisa merah," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV, I Gusti Komang Wastana, I Nyoman Sudiana, dan I Wayan Wiriyadana.

Terkait hal tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Tabanan I Wayan Udayana Sosiawan mengatakan terjadinya kekurangan kelas itu masih akan dikoordinasikan dengan pimpinan. Namun sudah ada rencana bahwa siswa yang tidak tertampung dibawa ke

DPRD Tabanan, Senin (13/5). Dalam rapat itu dibahas dua kecamatan yang menghadapi masalah karena kekurangan kelas akibat kelebihan murid SD yang tamat. Dua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tabanan tahun 2019, di Kecamatan Tabanan siswa yang lulus SD sebanyak 928 orang atau memerlukan daya tampung di Kecamatan Tabanan sebanyak 864 orang atau 27 kelas dari empat sekolah yakni SMPN 1 Tabanan, SMPN 2 Tabanan, SMPN 3 Tabanan, dan SMPN 6 Tabanan. Akibatnya kekurangan 2 kelas untuk menampung 64 siswa.

Sementara di Kecamatan Kediri jumlah siswa SD yang lulus sebanyak 483 anak atau

sekolah penunjang terdekat dari tempat tinggal yang sesuai KK. "Misalnya siswa dari Kediri tidak dapat sekolah di Kediri, dibawa ke SMP di Marga dengan catatan di sekolah tersebut masih tersedia tempat. Namun jika sudah penuh siswa harus

ke sekolah swasta," ujarnya. Mengenai sosialisasi aturan PPDB 2019 diakui Sosiawan sudah dilakukan bersama dengan kelompok kerja kepala sekolah (K3S). Mereka ini yang meneruskan ke sekolah dan orangtua murid. "Jadi sosia-

lisasi sudah, tetapi sekarang kami akan lebih gencar agar para orangtua siswa mengerti," tegasnya.

Ditambahkannya, selain dua Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan, delapan kecamatan lainnya tidak ada masalah kekurangan kelas. Hanya di dua kecamatan saja meskipun Tabanan sudah membuat sekolah baru yakni SMPN 6 Tabanan dan SMPN 5 Kediri. "Kalau secara umum di Tabanan kelebihan 21 kelas namun karena ada aturan zonasi inilah Kecamatan Kediri dan Tabanan ini menjadi kredit," kata Sosiawan.

Rapat yang berlangsung 1,5 jam tersebut selain dihari oleh Dinas Pendidikan Tabanan juga menghadirkan K3S, Ketua MKKS SMP dan Ketua MKKS SD. **des**

Edisi : Selasa 14 Mei 2019

Hal : 7



Utang Pengungsi di BRSUD Tabanan Capai Rp 99 Juta

TABANAN, NusaBali

Erupsi Gunung Agung yang terjadi pada 2017 lalu membuat ribuan warga mengungsi hingga wilayah Kabupaten Tabanan. Dalam pengungsian itu ada beberapa pengungsi yang sakit dan harus dirawat di BRSUD Tabanan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan klaim pembiayaan yang mencapai Rp 99 juta lebih.

Kepala Bagian Keuangan BRSUD Tabanan I Nengah Juliasa, mengatakan saat itu pengungsi yang berobat ke BRSUD Tabanan sebanyak 88 orang. Dari jumlah itu total besarnya tagihan mencapai Rp 99.066.200 untuk biaya pengobatan. "Terkait itu kami sudah melakukan pengajuan klaim ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan sesuai prosedur akan diteruskan oleh dinas provinsi ke Pemkab Karangasem," kata

Juliasa, Senin (6/5).

Meskipun telah diajukan klaim dan hingga saat ini belum cair, diakui Juliasa piutang yang belum dibayarkan selama dua tahun itu tidak mengganggu keuangan BRSUD Tabanan. Termasuk juga ketika ada pemeriksaan BPK tidak terjadi masalah karena dokumen pasien telah lengkap sekaligus piutang itu telah diaudit oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). "Tidak menjadi temuan BPK karena dokumen telah lengkap," ungkapinya.

Dan untuk bisa mengatasi piutang yang belum dibayar ini, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memproses piutang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Denpasar. Dimana prosedurnya harus dilakukan

konfirmasi kepada pihak yang berutang yakni Pemkab Karangasem. "Konfirmasi dilakukan sebanyak tiga kali, jika tidak ada kejelasan maka pihak BRSUD Tabanan bisa mengajukan piutang ke KPKNL," tegasnya.

Diakui Juliasa, proses pengajuan piutang ke KPKNL pernah dilakukan oleh BRSUD terhadap piutang-piutang berjumlah kecil yang dulunya dimasukkan ke dalam kerugian rumah sakit. Tetapi sejak 2013 lewat audit BPK, piutang-piutang ini tidak boleh lagi dimasukkan ke kerugian rumah sakit tetapi harus ditagih. Dalam prosesnya ada yang berhasil ditagih dan ada yang dimasukkan ke dalam proses penghapusan ke KPKNL.

"Hal yang sama bisa dilakukan kepada piutang pengobatan untuk pasien pengungsi asal Ka-

rangasem ini. Karena merupakan bencana dan ada sisi kemanusiannya. Tetapi tetap harus mengikuti prosedur dan koordinasi dengan dinas terkait," tandasnya.

Terkait tunggakan biaya pengobatan pengungsi dari Karangasem di BRSUD Tabanan untuk 88 pengungsi sebesar Rp 99 juta, Kadis Kesehatan Kabupaten Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama, mengatakan seluruh data tunggakan telah dicatat dan telah pula dilaporkan ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karangasem.

"Silakan tanyakan lebih lanjut ke BPBD, data sudah kami serahkan, data itu disetorkan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk klaim," ujar Gusti Bagus Putra Pertama, Selasa (7/5).

Sementara Kepala Pelaksana

BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa, mengatakan biaya pengobatan untuk pengungsi di seluruh Bali, selama berlaku tanggap darurat status awas Gunung Agung, terdata sebesar Rp 4 miliar.

Tunggakan itu telah dilaporkan ke BNPB. Pihak BNPB berkoordinasi dengan BPKP Wilayah Bali, dan telah dilakukan sinkronisasi atau diverifikasi, ternyata yang layak ditanggung sebesar Rp 800 juta.

"Jadi tunggakan biaya pengobatan Rp 800 juta telah kami laporkan berkasnya ke BNPB, tinggal menunggu realisasinya. Jika ternyata masih dirasa ada kekurangan biaya pengobatan, akan dicarikan solusinya melalui rapat Selasa (14/5), yang dipimpin Bupati Karangasem," katanya. **des, k16**

Edisi : Selasa 14 Mei 2019

Hal : 7



Pemkab Bangli Segera Rehabilitasi 10 Jaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bangli 143.488 Km, terbagi menjadi 46 DI.

BANGLI, NusaBali

Tahun ini, Pemkab Bangli akan merehabilitasi jaringan irigasi di sepuluh daerah irigasi (DI). Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 4.326.688.000 untuk rehabilitasi jaringan irigasi di delapan DI. Sementara Pemkab Bangli kucurkan dana APBD Rp 402.526.347 untuk perbaiki dua DI. Total anggaran keseluruhan Rp 5 miliar lebih.

Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bangli, Agus Yudi Swethaambara, mengatakan perbaikan jaringan irigasi rutin dianggarkan tiap tahunnya melalaui anggaran APBD dan DAK. Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 4.326.688.000 untuk rehabilitasi jaringan irigasi di delapan DI. Perbaikan di



• NUSABALI/EKA SRI
Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bangli, Agus Yudi Swethaambara.

Kecamatan Tembuku meliputi DI Tambahan dengan anggaran Rp 500.000.000, DI Tampuagan I Rp 700.000.000, DI Umelawang Rp 230.000.000. Kecamatan Bangli meliputi DI Tamanbali Rp 700.000.000, dan DI Yeh Badung Rp 409.688.000.

Perbaikan di Kecamatan Susut meliputi DI Manuk dengan anggaran Rp 600.000.000, DI Pengiangan Kawan Rp 687.000.000, dan DI Lumbuan Rp 500.000.000. "Proses pengambilan kegiatan telah memasuki tahap pengecekan dokumen perencanaan sebelum dikirim ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan," terang Agus Yudi

Swetaambara, Senin (20/5). Ditambahkan, untuk peningkatan jaringan irigasi, Pemkab Bangli melalui dana APBD menyasar dua DI meliputi DI Lagaan Kecamatan Bangli dengan anggaran sebesar Rp 402.126.347 dan DI Bangkiangsidem Kecamatan Tembuku dengan anggaran Rp 400.000.000. "Jika ditotal keseluruhan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi tahun ini lima miliar lebih. Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bangli 143.488 Km yang terbagi menjadi 46 DI," jelasnya.

Sesuai perencanaan, jaringan irigasi tidak lagi memakai pasangan batu, namun menggunakan beton precast. Keuntungannya, harganya lebih murah juga tidak mudah bocor. "Pengerjaannya lebih mudah dan efisien, juga tidak mudah bocor," tandasnya. Terkait perbaikan DAM Tamansari, Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Bangli pasca banjir bandang, Agus Yudi mengatakan diajukan pada anggaran tahun 2020, begitu pula dengan jaringan di wilayah Tegalalang, Kelurahan Kawan Bangli. **esa**

Edisi : Selasa 21 mei 2019

Hal : 8



Program UHC-JKN di Buleleng Dekati 100%

★ Bupati Agus Suradnyana Siapkan Tambahan Dana Rp 28,5 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng berkomitmen melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC)-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2019. Hingga saat ini, jumlah warga yang sudah diikutsertakan dalam program tersebut telah mencapai 790.304 orang atau 96,58 persen dari total 818.289 jiwa penduduk Buleleng. Prestasi yang sudah mendekati angka 100 persen ini jauh melebihi target nasi-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

onal sebanyak 95 persen.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, pun menjamin seluruh tanggungan biaya yang menjadi kewajiban kabupaten akan terpenuhi. Pemkab Buleleng siapkan tambahan dana Rp 28,5 miliar. Hal ini disampaikan Bupati Agus Suradnyana membuka kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sehat (JKN-KBS) di RSUD Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja, Senin (20/5).

Bupati Agus Suradnyana menegaskan, aspek kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diurus oleh pemerintah daerah, karena menyangkut pelayanan dasar yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Buleleng. Karena itu, Pemkab Buleleng akan menambah kebutuhan dana tanggungan melalui APBD Perubahan 2019.

"Kami dalam proses penganggaran tidak (lagi) konservatif, tidak akan saya pasang di depan (APBD Induk, Red). Kami masih ada anggaran perubahan. Kami sudah upayakan sumber-sumber pendapatan di tengah ini dengan baik. Program UHC ini pasti akan tercover di APBD Perubahan, itu tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Agus

Suradnyana.

Untuk mencover seluruh penduduk dalam program UHC-JKN, kata Agus Suradnyana, Pemkab Buleleng memiliki kewajiban menyiapkan anggaran sebesar Rp 42,8 miliar, sedangkan Pemprov Bali sebesar Rp 44,5 miliar. Dalam APBD Induk 2019, Pemkab Buleleng baru mengalokasikan dana Rp 14,3 miliar. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 28,5 miliar, dirancang di APBD Perubahan 2019.

Agus Suradnyana menjelaskan, penganggaran dana UHC yang tidak sepenuhnya pada APBD Induk, merupakan bagian dari strategi perencanaan. Menurut dia, banyak pembangunan strategis yang juga harus dipikirkan penganggarnya oleh pemerintah daerah. Pihaknya juga sudah merencanakan sumber dana untuk merancang anggaran perubahan nanti.

Selain itu, Agus Suradnyana juga meminta pihak BPJS untuk tidak khawatir atas ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemkab Buleleng. "Bahkan, saya juga sudah menandatangani surat pernyataan komitmen pemerintah daerah untuk membayar iuran PBI Daerah bagi penduduk Buleleng yang didaftarkan dalam program UHC," tandas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng

yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng ini.

Pada bagian lain, Agus Suradnyana menyelesaikan masih ada sejumlah pelayanan yang belum optimal dari BPJS Kesehatan, hingga merugikan masyarakat. Salah satunya, diputusnya akses masyarakat dari Puskesmas ke RSUD Buleleng secara langsung. Hal ini sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan paripurna.

"Saya minta akses masyarakat ke RSUD Buleleng segera dibuka, jangan menunggu bulan Juni. Bila perlu, besok saya perintahkan Wakil Bupati untuk ke Jakarta agar bisa membuka ini," terang Agus Suradnyana yang notabene mantan Ketua Komisi III DPRD Bali tiga kali periode.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Elly Widiani, mengungkapkan pihaknya tidak meragukan komitmen Pemkab Buleleng dalam memenuhi kewajiban program UHC. BPJS Kesehatan memberikan apresiasi atas upaya Pemkab Buleleng untuk menjaminkan seluruh penduduk Buleleng dalam program UHC ini.

"Sampai saat ini, kepesertaan masyarakat Buleleng yang sudah ber-JKN sebanyak 96,58 persen. Jadi, penduduk yang belum ber-JKN hanya sekitar 3

persen," papar Elly Widiani yang hadir dalam acara kemarin.

Disinggung terkait diputusnya akses masyarakat ke RSUD Buleleng, menurut Elly, hal itu berkaitan dengan sistem rujuk terintegrasi dan sistem rujukan berjenjang secara online. Disebutkan, seluruh peserta JKN-KBS sudah didaftarkan pada fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama, bisa Puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Untuk segmen yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, peserta itu didaftarkan pada Faskes tingkat pertama di Puskesmas.

Menurut Elly, dalam hal peserta JKN tidak bisa ditangani di Faskes pertama, yang bersangkutan berhak dirujuk ke fasilitas pelayanan lanjutan, yaitu rumah sakit (RS). Namun, rumah sakit itu sendiri terdiri dari Tipe D, Tipe C, Tipe B, dan Tipe A.

"Sebenarnya, dari Puskesmas bisa saja langsung dirujuk ke rumah sakit Tipe B apabila kompetensi dokter yang dibutuhkan tidak ada di rumah sakit Tipe C atau Tipe A. Contohnya, spesialis Onkologi dan Urologi, adalah dokter-dokter yang tidak ada di rumah sakit Tipe C dan Tipe D. Jadi, masyarakat dari Faskes pertama bisa langsung dirujuk ke rumah sakit Tipe B," jelas Elly. @ k19

Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 1 dan 15



Soal Biaya Medis Pengungsi Gunung Agung

Piutang Rp 13 Juta, Diakui Rp 4 Juta

SINGARAJA, NusaBali

Piutang RSUD Buleleng yang muncul dari tindakan medis terhadap para pengungsi Gunung Agung antara tahun 2017-2018, hanya dilunasi sebesar Rp 4.000.000. Nilai itu jauh dari keseluruhan biaya medis yang dicatat sebagai piutang oleh RSUD Buleleng sebesar Rp 130.000.000.

Direktur Utama (Dirut) RSUD, dr Gede Wiartana, didampingi, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUD Buleleng, I Gusti Ngurah Ketut Suhastika, Senin (20/5) mengaku, saat menerima kiriman pengungsi, pihaknya mencatat dan memastikan data kependudukan dan status asal pengungsi masuk radius terdampak erupsi Gunung Agung.

Bahkan, untuk memastikan data pengungsi itu, manajemen rumah sakit berkordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena data tersebut dinyatakan valid, pengungsi yang membutuhkan perawatan baik rawat jalan maupun opname dilayani berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di rumah sakit. "Kami sudah memastikan kalau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengungsi masuk daerah terdampak erupsi Gunung Agung dan kami cocokan ke BPBD dan semua berkas itu kami usulkan dalam permohonan biaya perawatan ke Pemkab Karangasem dan diteruskan ke BPBD Bali," katanya.

Menurut Wiartana, setelah pihaknya mengikuti rapat pembahasan pelunasan biaya perawatan pengungsi akhir pekan lalu, ternyata dari usulan pelunasan Rp 130 juta, diputuskan yang dilunasi sebesar Rp 4 juta. Alasan karena berkas yang dianggap layak senilai yang dibayarkan. Padahal usulan yang diajukan itu sudah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP). "Kami tidak tahu kok sebagian besar data itu dianggap tidak layak, padahal semua pasien

pengungsi itu kita pastikan ke BPBD dan sudah diperiksa BPKP, namun sekarang dibilang tidak layak," jelasnya.

Dirut Wiartana menambahkan, terhadap pembayaran yang tidak 100 persen, pihaknya akan mengkaji dan meminta petunjuk lebih lanjut kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Apalagi masih ada peluang karena, untuk sisa yang belum dilunasi akan dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap itu data perawatan pengungsi Gunung Agung di beberapa rumah sakit di Bali termasuk RSUD Buleleng.

Untuk penelusuran ini dijanjikan akan difasilitasi Dinas Kesehatan (Diskes) Bali. "Kami menunggu keputusan lanjutan yang akan difasilitasi provinsi, termasuk kondisi kini akan kami mintakan petunjuk ke pimpinan kita di daerah, sehingga ada solusi terbaik dari masalah ini," jelasnya.

Untuk diketahui, RSUD Buleleng menunggu realisasi pembayaran biaya perawatan pengungsi Gunung Agung yang sempat dirawat di RSUD. Dari 80 pengungsi, total biaya perawatan itu pengungsi dari Kabupaten Karangasem itu senilai Rp 142.768.900. Jumlah ini kemudian diaudit oleh BPKP di mana nilai piutang yang dinyatakan layak sebesar Rp 130.876.300, sehingga ada kelebihan lagi Rp 11.892.600.

Setelah pengungsi kembali ke Karangasem, RSUD mengajukan permohonan pembayaran biaya perawatan kepada Pemkab Karangasem. Permohonan itu kemudian diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Setelah lama tidak jelas kapan akan dilunasi, RSUD menghadiri pembahasan pembayaran biaya perawatan pengungsi Gunung Agung di Pemkab Karangasem belum lama ini. Sayangnya, dari usulan itu baru bisa dilunasi sebagian kecilnya saja, sedangkan sisanya dinyatakan tidak layak dilunasi. **k19**

Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 4



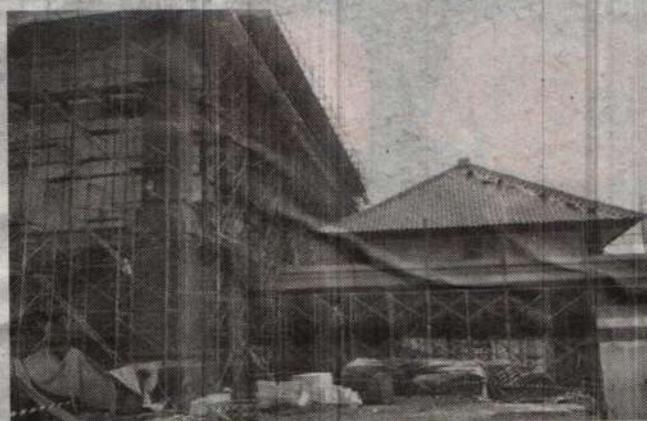
Pembangunan Balai Budaya Graha Mangu Mandala Pemkab Gelontor Rp 18 M Lagi untuk Bangun Ruang Pertemuan

MANGUPURA, NusaBali

Pembangunan gedung Balai Budaya Graha Mangu Mandala di Puspem Badung yang melelan anggaran Rp 317 miliar ditarget rampung pada September 2019 mendatang. Namun di tengah pengerjaan gedung balai budaya, Pemkab Badung berencana menambah gedung untuk ruang pertemuan. Untuk merealisasikan gedung pertemuan, pemkab menyiapkan anggaran Rp 18 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung IGA Nguhrah Arinda Trisnawati, mengungkapkan pengerjaan proyek pembangunan Balai Budaya Graha Mangu Mandala saat ini terus dikebut. Bahkan, pihaknya tak menampik jika kini dianggarkan kembali Rp 18 miliar untuk pembangunan ruang pertemuan serta pemasangan fasilitas mekanikal, elaktrikal, dan *plumbing* (MEP).

"Jadi, nanti akan ada tempat untuk pertemuan. Begitu juga penyediaan fasilitas yang



• NUSABALI/ARI SISWANTO

PEMBANGUNAN Balai Budaya Graha Mangu Mandala di Puspem Badung masih berlangsung. Bahkan Pemkab Badung akan menambah ruang pertemuan di balai budaya tersebut. Untuk itu Pemkab Badung menambah anggaran sebesar Rp 11 miliar guna merealisasikan gedung pertemuan beserta sarana dan prasarannya.

menunjang dalam pertemuan tersebut," ungkapnya, Sabtu (25/5).

Arinda menjelaskan, pembangunan ruang pertemuan ini dimaksudkan untuk menambah fasilitas di Balai Budaya Graha Mangu Mandala. Sebab, gedung tersebut tidak saja akan digunakan untuk ajang atraksi

kesenian. Melainkan sekaligus untuk kegiatan formal seperti pertemuan para seniman dan pertemuan besar lainnya.

Nah, dengan dianggarkannya pembangunan gedung pertemuan tersebut beserta fasilitas MEP, maka anggaran yang dikeluarkan otomatis bertambah. "Seluruhnya kini mencapai Rp

335 miliar," katanya.

Ditargetkan pembangunan gedung yang digarap secara multy years sejak 2018 dan memiliki luas sekitar 1,8 hektare akan selesai pada Setember 2019 mendatang. "Target kami September 2019 rampung, sehingga nanti sudah bisa digunakan," tandas Arinda.

Sekadar mengingatkan, sesuai perencanaan awal, gedung balai budaya ini memiliki konsep modern dan bertaraf internasional. Nantinya diperkirakan dapat menampung sekitar 2.600 penonton. Gedung ini juga dilengkapi piranti pendukung lainnya seperti LED, sound system, dan lighting yang berstandar internasional. Dengan begitu, tidak saja untuk pagelaran seni dan budaya, tapi juga untuk pertunjukan konser musik.

Wacana pembangunan gedung ini sebetulnya sudah muncul sejak era Bupati Badung ke-11, AA Gde Agung. Namun, baru pada era Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pembangunannya terealisasi. **asa**

Edisi : Selasa 28 Mei 2019

Hal : 2



Rp 40 Miliar untuk Peningkatan Puskesmas Abiansemal I Jadi RS Tipe C

MANGUPURA, NusaBali

Fasilitas penunjang di Puskesmas Abiansemal I di Jalan Ciung Wanara Desa Blahkiuh bakal ditambah. Penambahan fasilitas tersebut sebagai upaya meningkatkan Puskesmas Abiansemal I menjadi rumah sakit tipe C.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung IB Surya Suamba, mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 40 miliar untuk kegiatan fisik penambahan fasilitas Puskesmas Abiansemal I, sebagai persiapan peningkatan status menjadi rumah sakit tipe C. Saat ini pihaknya sudah memulai tahap lelang tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Badung.

"Iya, betul (tender Peningkatan Puskemas Abiansemal I, *Red*). Ini untuk persiapan menjadi rumah sakit tipe C," tutur Surya Suamba, Senin (27/5).

Dalam dokumen tender, proyek diberi nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan, Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium, Peningkatan Puskesmas Abiansemal I. Tertera pula dalam dokumen tender bahwa proyek sudah dibuka untuk umum sejak 24 Mei 2019. Lelang tender akan resmi ditutup pada 11 Juni 2019 mendatang. Hingga kemarin sudah ada 12 rekanan yang berminat atas proyek tersebut.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Badung dr I Gede Putra Suteja, membenarkan adanya kegiatan fisik peningkatan Puskesmas Abiansemal I. Namun, kata dia, sekali pun kewenangan puskesmas ada di bawah Diskes, untuk kegiatan fisik tetap ada di tim teknis, dalam hal ini Dinas PUPR. "Begini, ini adalah salah satu persiapan untuk peningkatan status Puskesmas Abiansemal I menjadi rumah sakit. Tapi tidak ini saja per-

siapannya, perlu izin juga, perlu fasilitas, dan perlu orang (SDM). Makanya segala sesuatunya dipersiapkan," ujarnya.

"Fisik bisa dikerjakan, alat juga tinggal dianggarkan, kebutuhan orang sementara bisa diambil dari rumah sakit. Untuk izin ini yang susah, tidak bisa diprediksi lama tidaknya. Kalau harapan kami lebih cepat lebih baik," kata dr Suteja sembari berharap dengan peningkatan status Puskesmas Abiansemal I menjadi rumah sakit tipe C pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal.

Dengan berubah statusnya menjadi rumah sakit, maka akan ada dokter spesialis di sana. Yakni spesialis bedah, penyakit dalam, anak, dan kandungan. Bahkan, terdapat pula tiga spesialis tambahan, yakni radiologi, laboratorium, dan anastesi. Dengan demikian, pasien yang memerlukan pelayanan bisa segera ditangani.

Untuk diketahui, saat ini Pemkab Badung memiliki sebanyak 13 puskesmas yang tersebar di enam kecamatan. Di Kecamatan Petang ada dua puskesmas, Kecamatan Abiansemal ada empat puskesmas, Kecamatan Mengwi ada 3 puskesmas, Kecamatan Kuta Utara ada satu puskesmas, Kecamatan Kuta ada 2 puskesmas, dan Kecamatan Kuta Selatan ada satu puskesmas. Diskes berencana menambah lagi sejumlah puskesmas di beberapa kecamatan yang dinilai masih kurang, seperti di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara. **asa**

Edisi : Selasa 28 Mei 2019

Hal : 2



Rusak Menahun TL Penarukan Mulai Diperbaiki

SINGARAJA, NusaBali

Setelah dua tahun rusak dan terbengkalai, akhirnya traffic light (TL) di simpang Kelurahan Penarukan mendapatkan penanganan. Proyek perbaikan TL di persimpangan yang padat ini sudah dimulai sejak Rabu (22/5) lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan Adnyana Putra, Senin (27/5) mengakui, perbaikan TL Penarukan memang cukup alot. Hal tersebut karena TL Penarukan ada di ruas jalan nasional, sehingga kewenangan penanganan perbaikannya ada di pemerintah pusat.

"Memang prosesnya sangat panjang, kami juga sempat kirim surat laporan belasan kali terkait kerusakan karena masuk jalur padat dan potensi keselamatan jalan sangat berisiko, akhirnya baru ada sinyal terang, pada Januari lalu," jelas dia.

Perbaikan TL simpang Penarukan dikerjakan oleh pemenang tender PT Mortex, satu paket dengan penambahan rambu lalu-lintas, pemasangan *guardrail* dan juga perbaikan fasilitas keselamatan jalan lainnya, dari batas kota Singaraja sampai batas kota Amlapura.

"Anggarannya Rp 1,7 miliar, itu satu paket dengan perbai-

kan dan penambahan rambu lalu-lintas termasuk pemasangan sabuk jalan di jalur yang memang membahayakan bagi pengendara. Soal rinciannya kami memang tidak diberikan," imbuh Gunawan.

Perbaikan yang hampir berjalan seminggu sudah mulai ada pembongkaran dan pemasangan beton rangka tiang. Saat ini pekerja masih menunggu beton tiang TL kering sebelum dipasang kelistrikan dan jaringan yang alatnya sudah tersedia dan tinggal pasang. Proses perbaikan lampu TL bersama paketnya diharapkan usai dalam empat bulan ke depan, termasuk di dalamnya waktu pemeliharaan.

Begitu alat dipasang, TL segera akan diujicobakan sambil menjalani masa pemeliharaan. Gunawan pun mengimbau kepada pengguna jalan yang melalui simpang TL Penarukan agar tetap berhati-hati karena ada sejumlah material dan pengerjaan proyek perbaikan. Pihaknya pun mengaku sudah mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk dibuatkan *yellow box*, mengingat jalur simpang Penarukan sangat padat dan dilalui oleh kendaraan besar seperti truk-truk material. **k23**

Edisi : Selasa 28 Mei 2019

Hal : 4



Karya Nyekah Kurung Kinembulan Desa Adat Taman

Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 900 Juta

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri rangkaian Karya Pitra Yadnya, Nyekah Kurung Kinembulan, Desa Adat Taman, Kecamatan Abianse-

mal pada Sukra Pon Dukut, Jumat (3/5), di Lapangan Desa Taman. Bupati Giri Prasta juga menyerahkan dana upakara sebesar Rp 900 juta.

Bupati didampingi anggota

DPRD Badung I Nyoman Dirgayusa, tokoh masyarakat I Bagus Alit Sucipta, Kadisbud Kabupaten Badung IB Anom Bhasma, Kabag Humas Setda Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Camat Abiansemal IGN Suryajaya beserta Tripika Kecamatan.

Bendesa Adat Taman I Made Kupasada didampingi Ketua Panitia Bagus Putu Suparta, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Badung, sekaligus membantu karya ini. Selain mendukung karya nyekah, program Bupati Badung sudah sangat dirasakan masyarakat. "Atas program dari Pemkab Badung, kemajuan pembangunan di Taman sangat dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Terkait karya dijelaskan, sesuai agenda desa adat, karya nyekah bersama ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Bila sawa sudah melebihi dari 25, nyekah boleh

dilaksanakan pada tahun ketiga. "Nyekah kali ini diikuti sebanyak 65 sawa, sehingga dapat dilaksanakan di tahun ketiga," ungkapnya.

Rangkaian karya dimulai sejak 4 April lalu, puncaknya pada Rahina Tilem Desta pada Saniscara Wage Dukut, Sabtu (4/5). Puncak karya diawali dengan upacara ngulapin, raja sewala/raja singa, mendak tirta ning, murwa daksina. Dilanjutkan mesangih, mapetik/telubulanan, pengaskaran, dan prelina. Pada Redita Kliwon Watugunung, Minggu (5/5) nyegara gunung ke Goa Lawah, mapamit ring peyadnyan, kahyangan tiga, dan nilapati. Nyekah diikuti sebanyak 65 sawa, mesangih 53 orang, mapetik lan matelubulanan 46 orang, dan 37 orang meraja sewala.

Bupati Giri Prasta menyampaikan secara umum proses nyekah, dimana ada upacara murwa daksina dengan menggunakan sapi hitam (selem)

sebagai lambang linggih Betara Siwa yang mengantarkan atma menuju surga. Meajar-ajar ada empat tempat yang disebut catur loka pala yaitu Barat ke Batukaru, Utara ke Beratan, Selatan ke Uluwatu, Timur ke Goa Lawah. Setelah selesai meajar-ajar, kembali ke bale peyadnyan, ke siwa, pura kahyangan tiga dan merajan/rong tiga rumah masing-masing disebut Dewa Pretista. "Kami harapkan upacara nyekah ini dilaksanakan berdasarkan atas sastra-sastra agama Hindu," harapnya.

Mengenai pembangunan di Desa Taman, baik pura kahyangan tiga, hingga pura dadia dan fasilitas publik lainnya siap didukung Pemkab Badung. Ke depan, di Taman akan dihidupkan sektor ekonomi, dengan menggerakkan peternakan ayam pedaging dan koloni babi. Pasar Desa Adat Taman juga siap ditata. @ asa

Edisi : Senin 6 Mei 2019

Hal : 2



Kerap Dilalui Truk Besar, Jalan Supratman Hancur

NEGARA, NusaBali

Jalan Supratman sisi selatan yang tembus menuju Jalan Ngurah Rai, di Lingkungan/Kelurahan Pendem Jembrana, kondisi aspalnya hancur. Pemicu hancurnya jalan di tengah kota Negara, itu dituding akibat truk-truk besar yang kerap lalu lalang menuju gudang truk di jalan tersebut.

Dari pemantauan pada Minggu (5/5), kerusakan jalan di Jalan Supratman ini tampak mulai di ujung bagian selatan hingga di depan gudang truk milik salah satu perusahaan onderdil kendaraan di kota Negara. "Yang hancur hanya di selatan saja. Memang di sini sudah beberapa kali rusak karena dilewati truk-truk besar," ujar salah seorang warga setempat.

Menurut warga, perbaikan jalan yang sudah berulang kali rusak itu selama ini dinilai kurang maksimal, karena hanya sebatas tambal sulam. Selain jalan rusak, sejumlah trotoar di Jalan Supratman ini tampak jebol, dan air di selokan yang tertutup trotoar itu kerap meluap ketika terjadi hujan deras.

Sementara Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-PRPKP) Jembrana I Wayan Darwin, dikonfirmasi Minggu kemarin, mengatakan jalan di Jalan Supratman itu memang langganan rusak akibat sering dilintasi truk yang kelebihan tonase. Pihaknya juga sudah berulang kali melakukan perbaikan di Jalan Supratman yang merupakan jalan kabupaten tersebut, dan berencana akan kembali melakukan perbaikan dengan menggunakan dana operasional pemeliharaan (OP). "Nanti akan kami bahas. Masalah di sana, memang karena dilalui truk-truk besar," ucapnya.

Sedangkan mengenai kerusakan trotoar di Jalan Supratman itu, menurutnya juga akan diperbaiki secara bertahap. Untuk tahun ini, direncanakan perbaikan trotoar dari Jalan Ngurah Rai, tepatnya depan Hardys hingga memasuki Jalan Pahlawan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Negara. "Bertahap kami perbaiki. Tetap kami perhatikan kerusakan-kerusakan trotoar," ujarnya. **ode**

Edisi : Senin 6 Mei 2019

Hal : 7



Bangun Desa Wisata, Sayan Anggarkan Rp 134 Juta

GIANYAR, NusaBali

Dana desa selain digunakan pembangunan infrastruktur demi memajukan desa, juga untuk pengembangan desa wisata. Seperti dilakukan Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar. Desa ini menggelontorkan anggaran Rp 134 juta untuk pengembangan Desa Wisata Alam Bija.

Hal itu diungkapkan oleh Perbekel Desa Sayan I Made Andika, Minggu (19/5). Pria asal Banjar Penestanan, Desa Sayan ini mengakui dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019. Desa Wisata Alam Bija Sayan dikembangkan menjadi wisata rekreasi water tubing dan restoran Bijaku. "Sasarannya selain wisatawan asing, juga mengarah ke generasi milenial dan

anak-anak sekolah lokal. Karena bisa untuk mengedukasi mereka tentang subak dan alam sawah," terangnya.

Ide pengembangan desa wisata tersebut, jelas dia, dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Sayan. Sesuai hasil musyawarah desa, pengembangan alam bija di Banjar Ambengan, Desa Sayan ini disepakati sebagai destinasi desa wisata. Pengelola desa wisata ini oleh BUMDes dan diawasi desa. "Sebenarnya itu sudah digarap sejak tahun lalu, yaitu pembangunan akses pavingisasi. Dilanjutkan pada tahun ini untuk pembangunan resto dan water tubing itu. Kemungkinan akan *dilaunching*, 1 Juni 2019," ungkap Andika. **nvi**

Edisi : Senin 20 Mei 2019

Hal : 6



Sisa Dana Guru Kontrak Dipertanyakan

★ Dewan Minta Dialihkan Angkat Guru Honorar ✓

SINGARAJA, NusaBali

Kelulusan guru kontrak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengundang reaksi dari Komisi IV DPRD Buleleng. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng diminta memanfaatkan sisa dana guru kontrak tersebut, untuk mengangkat guru honorer sebagai guru kontrak.

Data dihimpun Minggu (19/5) menyebut, jumlah guru kontrak yang lolos diterima sebagai CPNS pada penerimaan tahun 2018 lalu, sebanyak 82 orang. Itu berarti, jumlah guru kontrak yang dibiayai oleh APBD Buleleng berkurang dari semula sebanyak 1.798 orang menjadi 1.716 orang.

Selama ini, Pemkab memberikan gaji bulanan kepada guru kontrak sebesar Rp 1.200.000 per orang, sehingga total anggaran dalam APBD sebesar Rp 25,89 miliar setahun. Dengan lulusnya 82 orang menjadi CPNS, diperkirakan akan ada dana tersisa sekitar Rp 700 juta, karena penghentian gaji bagi guru kontrak yang lulus CPNS terhitung sejak Mei 2019.

Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, Minggu (19/5) mengungkapkan, dengan keluarnya guru kontrak karena lulus CPNS, berarti ada kekosongan guru dimana sekolah guru kontrak

yang bersangkutan. Karena guru kontrak yang lulus tidak mungkin kembali mengajar di sekolah tempatnya semula.

Selain itu, dirinya juga prihatin melihat kondisi guru honorer dengan pendapatan yang kecil, sedangkan beban kerjanya hampir sama dengan guru PNS. "Untuk mengisi kekosongan guru karena guru kontraknya sudah lulus CPNS, sebaiknya diisi dengan guru honore. Toh anggarannya ada, dan gaji guru honorer itu kecil, karena gajinya diambilkan dari dana BOS oleh masing-masing sekolah," katanya.

Menurutnya, jika guru honorer tersebut dianggap menjadi guru kontrak, sekolah yang kekurangan guru karena ditinggal guru kontrak sebelumnya, dapat terisi kembali. Disamping itu, pendapatan guru honorer dapat ditingkatkan, karena gajinya ditanggung oleh Pemkab. "Kami pertanyakan ini kenapa tidak dipakai mengangkat guru honorer saja. Sehingga kuota guru kontrak terpenuhi lagi," ujar politisi Partai Golkar, asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng ini.

Sementara Kepala Disdikpora Buleleng, Gde Dharmaja menyambut baik ide pengangkatan guru honore guna mengisi posisi yang ditinggal oleh guru kontrak sebelumnya.

Namun, pihaknya mengaku masih memperjuangkan anggaran gaji guru kontrak sebelumnya. Karena gaji guru kontrak yang ada, belum sepenuhnya dialokasikan dalam APBD Induk 2019. Disebutkan, untuk gaji guru kontrak baru dianggarkan untuk 8 bulan. Sedangkan untuk 2 bulan, biasanya dialokasikan kembali di APBD Perubahan 2019. Kekurangan gaji guru kontrak untuk dua bulan, disebutkan sebesar Rp 6,5 miliar. "Nah kami sudah berkoordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Bappeda Litbang, agar kekurangan itu dialokasikan kembali dalam APBD Perubahan," terangnya.

Menurutnya, pihaknya belum tahu apakah kekurangan itu ditutup dari sisa gaji bagi 82 guru kontrak yang lulus CPNS, atau akan dicarikan sumber dana lainnya. Sehingga pihaknya belum berani memutuskan untuk mengangkat guru honorer menjadi guru kontrak. "Ini yang masih kami tunggu, kalau misalnya sisa dananya dipakai menutup kekurangan gaji guru kontrak, berarti tidak ada sisa dana lagi. Kecuali sepenuhnya kekurangan dana itu ditutup, baru bisa kami mengangkat guru honorer menjadi guru kontrak," tandas birokrat asal Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan ini. **☎ k19**

Edisi : Senin 20 Mei 2019

Hal : 4



Tahun 2019, 11 Desa Dapat Bantuan Pamsimas dari APBN dan APBD ✓

TABANAN, NusaBali

Sebanyak 11 desa di Kabupaten Tabanan mendapatkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di 2019. Dari 11 desa itu, sembilan desa mendapat bantuan Pamsimas dari APBN senilai Rp 2.196.000.000, dan dua desa mendapat bantuan dari APBD senilai Rp 735.000.000.

Adapun sembilan desa yang mendapatkan bantuan Pamsimas dari APBN adalah empat desa di Kecamatan Pupuan yakni Desa Pujungan, Desa Belimbing, Desa Padangan Desa, dan Jelijih Punggang. Dua desa di Kecamatan Selemadeg Barat, yakni Desa Lumbuh Kauh dan Desa Angkah. Satu desa di Kecamatan Penebel adalah Desa Pitra. Satu desa di Kecamatan Baturiti adalah Desa Baturiti dan satu desa di Kecamatan Selemadeg adalah Desa Pupuan Sawah.

Sedangkan dua desa yang mendapat bantuan Pamsimas dari APBD adalah Desa Wanagari di Kecamatan Selemadeg dan Desa Mundeh Kangin di Kecamatan

Selemadeg Barat. Pamsimas ini nantinya akan dikelola desa.

Dengan demikian, dari 2014 hingga 2019 total desa yang sudah mendapat bantuan Pamsimas sebanyak 56 desa. Untuk program Pamsimas yang sumber dananya dari APBN sedang menunggu cair, dan dari APBD sudah masuk pencairan dana tahap pertama.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan secara umum kriteria desa yang memperoleh sasaran Pamsimas adalah desa yang memiliki cakupan air minum aman dan sanitasi aman masih rendah. "Jadi untuk di Tabanan dari tahun 2014 hingga 2019 sudah 56 desa yang mendapat program Pamsimas," ujarnya, Minggu (19/5).

Dikatakannya, Pamsimas akan dikelola oleh desa. Nantinya warga yang membayar kepada pengelola untuk pemakaian air sesuai dengan yang digunakan karena sambungan air masuk ke rumah warga

dan ada meteran seperti pelayanan PDAM. "Kas mereka ini masuk desa, sehingga program Pamsimas ini juga membantu keuangan desa, di samping kebutuhan pokoknya memenuhi kebutuhan air bersih," tegas Wiratmaja.

Salah satu desa yang mendapatkan program Pamsimas adalah Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan. Perbekel Belimbing I Made Adi Suyana mengatakan bahwa program Pamsimas diberikan kepada Banjar Suranadi. Karena lokasi banjar tersebut agak tinggi. "Memang sudah ada layanan PDAM, tetapi belum maksimal memenuhi kebutuhan air terutama saat musim kemarau," ujarnya.

Dikatakannya, di Banjar Suranadi ada 119 kepala keluarga (KK). Sekitar dua tahun sebelumnya sudah sempat mendapatkan bantuan Pamsimas tetapi tidak maksimal. "Sekarang diusulkan kembali agar pemenuhan kebutuhan air bersih bisa maksimal, terutama saat musim kemarau," kata Adi Suyana. **des**

Edisi : Senin 20 Mei 2019

Hal : 7



Perbaiki Dermaga PPI Sangsit Terkendala Pengalihan Aset

SINGARAJA, NusaBali

Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit di Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng yang rusak bertahun-tahun hingga kini belum ada penanganan. Perbaikan Dermaga PPI Sangsit yang selama ini dipakai tempat bongkar muat ikan dari Sapeken-Bali, disebut masih terkendala pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Buleleng ke Pemerintah Provinsi Bali.

Kerusakan dermaga secara bertahap karena abrasi bertahun-tahun silam tak dapat diperbaiki oleh Pemkab Buleleng, menyusul pengalihan kewenangan kawasan laut dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi. Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng pun pada tahun 2017 lalu sudah sempat mengajukan proses peralihan aset. Hanya saja sampai saat ini masih buntu.

Kepala Dinas Perikanan Ka-

bupaten Buleleng, Ni Made Arnika menjelaskan, seluruh aset PPI Sangsit sudah diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Baik berupa gedung kantor, dermaga serta pegawai yang bertugas di sana. Hanya saja belakangan peralihan aset itu terganjal soal aset dua kapal patroli perikanan yang mengalami kerusakan dan hilang terbawa bencana gelombang pasang, yang hingga kini tak ditemukan bangkai kapalnya.

"Ganjalan utamanya itu ada di kapal patroli, sebenarnya kapal itu sudah rusak lama, hanya Maret kemarin hanyut terbawa banjir, sampai sekarang belum ketemu. Sebenarnya sebelum kejadian hanyut dan tenggelam sebenarnya sudah kami usulkan penghapusan, itu yang belum bisa diterima secara penuh di Pemerintah Provinsi Bali," kata Arnika.

Arnika juga menjelaskan awalnya pihaknya berencana

menghapus aset dua kapal itu, untuk mempermudah peralihan aset. Hanya saja sebelum disetujui kapal sudah hilang ditelan bencana. Atas kejadian tersebut, kini Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng tengah melengkapi administrasi dan berita acara hilangnya kapal patroli tersebut akibat bencana.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana ditemui di sela-sela acara Gemar Makan Ikan (Gemari) di Laksmi Graha menjelaskan sejauh ini proses peralihan PPI Sangsit masih menunggu kelengkapan administrasi. Pihaknya pun menjelaskan jika proses peralihan aset itu tidak bisa dilakukan jika aset yang ditulis dalam pengajuan tak sesuai dengan kondisi riilnya. "Yang masih menjadi ganjalan soal kapal patroli. Tidak mungkin kami terima kapal yang saat ini riilnya tidak ada," ucap Su-

darsana.

Pihak Pemprov juga diakuinya sudah menyarankan kepada Pemkab Buleleng untuk menghapus aset tersebut, untuk mempermudah proses peralihan aset. Dinas Kelautan dan Perikanan Bali mengklaim saat ini masih melakukan penataan birokrasi, sebelum aset itu dikuasai secara penuh oleh pemerintah provinsi. Termasuk rencana pengelolaan PPI oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Ikan, yang hingga kini juga belum terbentuk.

Selain itu Sudarsana juga mengaku kini masih melakukan penataan organisasi. Nantinya PPI Sangsit akan dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan. Ia pun berharap pembentukan organisasi tersebut segera dilakukan, sehingga pengalihan, pengelolaan dan perbaikan PPI Sangsit dapat dilakukan secepatnya. **k23**

Edisi : Jumat 10 Mei 2019

Hal : 4



Pemkot Denpasar Dukung Pengembangan PLTSa Sarbagita ✓

DENPASAR, NusaBali

Pembahasan status kemajuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) memasuki babak baru. Pemkot Denpasar mendukung adanya PLTSa saat rapat koordinasi pembahasan proyek di Gedung Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KP-PIP), Gedung Pos Ibukota, Jakarta, Rabu (22/5).

Adanya PLTSa dianggap akan memberikan dampak positif untuk mengurai sampah yang selama ini menjadi permasalahan di Kota Denpasar. Selain itu, PLTSa juga sejalan dengan adanya Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pengembangan proyek Instalasi Pengolahan Sampah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sarbagita ini rencananya akan dikembangkan di kawasan TPA Suwung, Denpasar yang ditargetkan beroperasi mulai tahun 2021 dengan tahap konstruksinya dimulai pada tahun 2019 ini. Dengan nilai investasi mencapai US\$ 120 juta dan dapat menampung 1.200 ton sampah per hari.

Rapat koordinasi pembahasan proyek ini dihadiri Wakil Walikota IGN Jaya Negara, Gubernur Bali Wayan Koster serta sejumlah pimpinan kabupaten lainnya di Bali seperti Bupati Gianyar I Made Mahayastra dan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Rapat dipimpin Direktur Proyek Sektor Energi & Ketenagalistrikan KPPIP, Triharyo Soesilo dan dihadiri juga Kabid Infrastruktur Kelistrikan Kemenko Bidang Kemaritiman Trinaldy Konnery, serta diikuti perwakilan dari Koordinator JAMDATUN, PT Indonesian Power serta PT Waskita Karya.

Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara saat dikonfirmasi, Kamis (23/5) mengatakan, digelar rapat pembahasan status kemajuan PLTSa Sarbagita ini dapat menjadi

langkah maju bagi pengelolaan sampah terpadu khususnya di Kota Denpasar. Mengingat upaya pengelolaan sampah yang baik perlu adanya sinergitas seluruh pihak untuk merumuskan solusinya.

Proyek PLTSa Sarbagita ini, kata Jaya Negara sejalan dengan komitmen Pemkot Denpasar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya dengan penerapan Perwali 36 Tahun 2018 saat ini. Adanya proyek ini diharapkan sampah khususnya di Kota Denpasar akan bisa terurai secara lebih signifikan.

Penanggulangan sampah menurut Jaya Negara, merupakan isu strategis yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak segera ditanggulangi akan membawa berbagai dampak yang tidak menguntungkan bagi Kota Denpasar dan Bali pada umumnya.

Dari pengembangan PLTSa, Jaya Negara mengatakan, pemerintah akan bekerjasama dengan PT Waskita Karya dan PT Indonesia Power terkait pengembangan TPA Regional Sarbagita Bali yang sudah menandatangani kerjasama pada 29 Januari 2019 lalu. "Sudah diputuskan PT Indonesia Power akan bekerja sama dengan PT Waskita Karya dalam membangun proyek ini dengan kerjasama BUMN. Juga dikoordinasikan dengan PT PLN dan berkonsultasi dengan Kementerian ESDM," ungkapnya.

Saat ini, Pemkot Denpasar dan Pemrov Bali sudah menandatangani Momenandum of Understanding (MoU) terkait pasokan sampah yang akan disalurkan ke PLTSa. Pendanaan proyek ini akan menggunakan empat sumber pemasukan yakni penjualan listrik, rencana kontribusi wisatawan, Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan bantuan BLPS dari dana alokasi khusus non fisik serta usulan dukungan pemerintah dari dana dukungan tunai infrastruktur untuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha. **mis**

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 3



Sekolah Gratis, Setiap Siswa Disiapkan Bosda Rp 900.000 Per Tahun

Pemprov Bali Wacanakan Anggaran Rp 22 Miliar

dalam Setahun untuk SMA/SMK Swasta

Gubernur Koster memastikan semua sekolah negeri dan swasta akan diberikan dana Bosda, sehingga pendidikan di Bali nantinya bisa gratis dan berkualitas

DENPASAR, NusaBali

Para orangtua siswa di Bali tidak perlu khawatir lagi harus keluar biaya sekolah banyak jika anak mereka tidak diterima masuk di SMA/SMK Negeri. Pasalnya, Pemprov Bali akan siapkan anggaran Bantuan Op-

erasional Sekolah Daerah (Bosda) sekitar Rp 22 miliar untuk SMA/SMK swasta se-Bali, sehingga siswa bisa sekolah tanpa

dikenai pungutan alias gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, mengatakan kebi-

jakan Bosda untuk SMA/SMK swasta di Bali ini rencananya akan diberlakukan tahun depan. Menurut Ngurah Boy, kebijakan

ini merupakan usulan Gubernur Bali Wayan Koster.

"Menurut Bapak Gubernur, tidak ada yang namanya sekolah negeri dan swasta. Yang ada adalah sekolah pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus diayomi," ujar Ngurah Boy di sela-sela acara sosialisasi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2019/2020 di Aula

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis (23/5).

Ngurah Boy menyebutkan, untuk SMA swasta, setiap siswa dianggarkan Pemprov Bali dapat Bosda sebesar Rp 900.000 per tahun. Sedangkan setiap siswa SMK swasta, dianggarkan Bosda lebih besar dari Rp 900.000 per tahun, karena kebutuhan mereka memang lebih besar untuk biaya kegiatan praktik.

Total anggaran Bosda untuk siswa SMA/SMK swasta dan bantuan bagi siswa miskin yang disiapkan Pemprov Bali dalam setahun, dirancang mencapai sekitar Rp 22 miliar. "Kita sedang rancang ini. Tapi, karena sekarang tahun anggaran sudah berjalan, tentunya Bosda baru bisa direalisasikan melalui APBD Perubahan 2019," tegas Ngurah Boy.

Kenapa dikeluarkan kebijakan Bosda? Menurut Ngurah Boy, persoalan yang sering muncul saat PPDB adalah orangtua menginginkan anaknya masuk sekolah negeri, dengan alasan biaya sekolah di swasta mahal. Sedangkan PPDB sendiri bermaksud untuk pemerataan, agar tidak numpuk di satu sekolah dan menekad paradigma lama tentang sekolah unggulan. Saat ini, sekolah SMA/SMK di Bali jumlahnya 360 unit, terdiri dari 140 sekolah negeri dan 220 sekolah swasta.

Meski Bosda diperuntukkan bagi SMA/SMK swasta, kata Ngurah Boy, bukan berarti kebijakan ini akan diberikan ke semua sekolah swasta. Pihaknya juga akan

melihat sekolah tersebut dari sisi finansial. Sebab, ada juga sekolah swasta yang bertaraf internasional dan cukup mapan. "Kita lihat juga itu, tidak asal-asalan. Kita lihat dulu kemampuan sekolah tersebut," katanya.

Di sisi lain, persoalan tenaga pengajar di sekolah swasta kadang juga menjadi pertimbangan para orangtua untuk menyekolahkan anak mereka di sana. Terkait hal tersebut, menurut Ngurah Boy, guru-guru negeri yang berprestasi bisa diperbantukan di swasta.

"Istilahnya, ada pemerataan. Guru-guru negeri yang memang berprestasi bisa diperbantukan. Jangankan guru negeri ke swasta, antar sekolah negeri saja guru yang memiliki kemampuan lebih agar diputar (di-rolling) ke sekolah-sekolah yang masih perlu dikembangkan prestasinya," terang Ngurah Boy.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Kamis kemarin, Gubernur Wayan Koster memastikan semua sekolah negeri dan swasta akan diberikan dana Bosda. Dengan begitu, pendidikan di Bali nantinya bisa gratis dan berkualitas. Berapa besaran anggarannya, akan dibahas bersama legislatif. "Kita akan kasi Bosda semuanya, supaya adil. Nanti dibahas dulu," tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Sementara itu, Asisten Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widiyanti, yang diundang dalam acara sosialisasi kemarin, mengingatkan agar pelaksanaan PPDB dilakukan dengan konsisten. Jangan sampai

di tengah jalan nanti malah terjadi kisruh, seperti pelaksanaan tahun lalu hingga harus membuka PPDB gelombang kedua.

"Kami ingin standar operasional prosedur dilaksanakan lebih konsisten untuk diterapkan, agar jangan seperti tahun lalu. Sudah membuat reguasi dan teknis, tapi di tengah perjalanan ada persoalan teknis pelaksanaan, lalu terjadi kisruh lagi sampai buka gelombang kedua," pinta Sri Widiyanti.

Pihak sekolah juga diminta jujur dalam menyampaikan kuota di sekolahnya. Jangan sampai terkesan pemaksaan menerima siswa melebihi daya tampung, sehingga berdampak mengurangi mutu pendidikan. "Sekolah harus benar-benar menyampaikan daya tampungnya. Kalau daya tampung 400, ya sampaikan 400, jangan bilang 300, sehingga ada sisa untuk gelombang berikutnya."

Selain itu, Sri Widiyanti juga menyoroti masalah penerimaan lewat jalur prestasi yang kerap menuai keluhan masyarakat, hingga kemudian dilaporkan ke Ombudsman. Sri Widiyanti pun meminta ada verifikasi peserta lewat jalur kurang mampu, meskipun sudah terverifikasi sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar.

"Kalau sekarang sudah jelas melalui verifikasi sertifikat. Kalau tahun sebelumnya, sempat ada yang menggunakan piagam Pesta Kesenian Bali (PKB), yang kemudian menimbulkan keributan. Belum lagi mengenai dinas yang mengesahkan atau mengetahui piagam tersebut," tegas Sri Widiyanti. [ind,nat](#)

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 1 dan 15



Sempat Gagal Tender, Gedung PMI[✓] Kembali Dianggarkan Rp 2,9 Miliar

TABANAN, NusaBali

Sempat gagal tender di 2018, pembangunan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tabanan saat ini sedang proses tender. Gedung yang dibangun di areal Rumah Sakit Nyitdah, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, itu dianggarkan Rp 2,9 miliar.

Menurut data di website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pembangunan gedung PMI ini masih proses tender. Sudah ada 31 peserta tender yang mengajukan dan selanjutnya tinggal tunggu pemenang.

Ketua PMI Tabanan yang juga Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya men-

gatakan gedung PMI sebenarnya direncanakan dibangun tahun 2018. Karena ada persoalan teknis sehingga gagal tender. Oleh karena itu pembangunan ditunda dan dikerjakan di 2019. "Gedung PMI sudah kami presentasikan dan sudah siap. Tahun lalu karena ada persoalan teknis yakni gagal tender, maka dibangun tahun ini," ujarnya, Kamis (23/5).

Dikatakan target pembangunan gedung tersebut dilaksanakan antara Mei atau Juni. Gedung PMI menggunakan anggaran BKK Kabupaten Badung. "Dan nanti dari PAD Tabanan menyiapkan alat-alat semua. Semoga nanti memiliki

kantor baru dilengkapi sarana dan prasarana s supaya pergerakan di PMI bisa membantu masyarakat," tandasnya.

Gagal tender gedung PMI ini sempat terungkap saat dilakukan pembahasan di DPRD Tabanan pada 2018. Saat itu lelang proyek pembangunan dilakukan Juni 2018. Proyek yang rencanakan dikerjakan pada 2018 itu juga menggunakan anggaran BKK Badung 2018 sebesar Rp 2,9 miliar. Ternyata proses lelang yang memakan waktu satu setengah bulan mengalami gagal tender. Padahal jika tidak alami gagal tender, jadwal pengerjaan 120 hari kalender. **des**

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 7



Gubernur Koster Minta BPK Tak Ragu Berikan Opini Berdasarkan Kondisi Riil

DENPASAR, NusaBali

Setelah menyelesaikan proses pemeriksaan di Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali melakukan exit meeting dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran. Exit meeting dilakukan di ruang tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (8/5).

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso mengatakan, setelah pemeriksaan ini pihaknya akan melakukan pembahasan secara internal untuk membuat laporan akhir yang akan disampaikan kepada Pemprov Bali dan DPRD Provinsi Bali. Rencananya laporan akhir akan diserahkan pada tanggal 27 Mei 2019 mendatang.

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi atas pemeriksaan BPK RI di Pemprov Bali yang telah berlangsung dengan lancar.

Ia berharap pemeriksaan ini menghasilkan opini yang memang berkualitas dan mencer-

minkan kondisi riil atau sesungguhnya. "Saya sudah meminta kepada Pak Sekda dan jajaran agar betul-betul memberikan pelayanan informasi yang akurat sehingga mencerminkan situasi yang sesungguhnya," kata Gubernur Koster.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini meminta BPK RI tidak ragu dalam membuat laporan akhir pemeriksaan di Pemprov Bali. Ia mengaku senang jika memang BPK menyampaikan ada hal-hal yang perlu dirapikan dan ditata lagi di Pemprov Bali. "Saya harap Bapak tidak perlu ragu, karena memang kita butuh pengukuran kinerja administrasi secara baik," ujarnya.

Dalam pertemuan ini tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada, Kepala BPKAD Provinsi Bali Dewa Sunarta, Kepala Bapenda Provinsi Bali Made Santha serta tim pemeriksa BPK RI. @

Edisi : Kamis 9 Mei 2019

Hal : 3



Jelang PPDB, Sarana dan Prasarana di Dua SMPN Baru Belum Jelas

TABANAN, NusaBali

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 di Kabupaten Tabanan rencananya akan dilaksanakan Juli mendatang atau sekitar dua bulan lagi. Namun untuk sarana dan prasarana di SMP baru yakni SMPN 6 Tabanan dan SMPN 5 Kediri belum jelas. Terutama bangku dan meja belajar siswa belum lengkap.

Kepala SMPN 6 Tabanan I Ketut Sedana, menerangkan

sampai saat ini sarana dan prasarana (saprasi) di sekolahnya masih kurang. Terutama saat penerimaan siswa baru nanti kekurangan meja dan kursi belajar sebanyak 160 pasang. "Masih banyak yang kurang," ujarnya, Rabu (15/5).

Tak hanya sapras, meja dan kursi untuk tenaga pendidik juga kurang sebanyak 10 set. Terkait itu diakui Sedana sudah dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan Tabanan dan diminta

untuk menunggu. "Info dari Disdik akan diusahakan di (anggaran) perubahan, dan mudah-mudahan akhir Juni 2019 sudah dikirim ke sekolah," tuturnya.

Sedana menambahkan untuk jumlah ruangan di SMPN 6 Tabanan saat ini tersedia 9 kelas. Kondisinya masih bagus namun ada sedikit reng yang dimakan rayap serta genteng pecah. Kerusakan ini akan diservis saat liburan sekolah. "Termasuk juga kami lakukan

pegecatan ruangan," tegasnya.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala SMPN 5 Kediri I Nyoman Sutarya. Menurutnya sapras khususnya untuk siswa baru nanti belum ada. "Kalau dapat lima kelas lagi, berarti lima kelas kurang meja dan kursi. Kalau dapat empat kelas lagi, berarti empat kelas kurang kursi dan meja," ujarnya.

Selain kekurangan kursi dan meja untuk siswa, di SMPN 5 Kediri juga kekurangan ru-

ang perpustakaan, laboratorium, dan gedung ruang kelas. Sutarya mengaku hal tersebut sudah dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan. "Sudah berkoordinasi, mudah-mudahan secepatnya ada solusi," tandasnya.

Terkait hal tersebut Plt Dinas Pendidikan I Wayan Miarsana dan Sekdis Dinas Pendidikan Tabanan belum bisa dimintai komentar. Saat dikonfirmasi, kedua pejabat tersebut tidak mengangkat telepon. **des**

Edisi : Kamis 16 Mei 2019

Hal : 7



Radar Bali

PLT'Sa Suwung Butuh Rp1,7 Triliun

Pemkot Mendukung, Dokumen Kajian C itarget Juli 2019

DENPASAR - Rencana pembangunan Pemangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT'Sa) Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) di Suwung, Denpasar Selatan ternyata membutuhkan investasi yang tak sedikit. Anggaran yang dibutuhkan mencapai USD 120 juta atau Rp1,7 triliun lebih.

Hal itu terungkap usai adanya rapat koordinasi pembesaran proyek ini di Gedung Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Gedung Pos Ilukota, Jakarta, Rabu (22/5) kemarin.

Dalam rapat ini, Pemerintah Kota Denpasar dihadiri Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara. Hadir juga Gubernur Bali, Wayan Koster serta sejumlah pimpinan Kabupaten/Kota di Bali seperti Bupati Gianyar, I Made Mahayatra serta Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Rapat dipimpin Direktur Proyek Sektor Energi dan Ketenagalistrikan KPPIP, Triharyo Soesilo dan dihadiri juga Kabid Infrastruktur Kelistrikan Kemenko Bidang Kemaritiman Trinaldy Konnery, serta diikuti perwakilan dari Koordinator JAMDATUN, PT. Indonesian

Power serta PT. Waskita Karya. Wakil Wali kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyatakan rapat pembahasan status Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sarbagita yang dapat menjadi langkah maju bagi pengelolaan sampah terpadu khususnya di Kota Denpasar. Kata dia, mengingat upaya pengelolaan sampah yang baik merupakan hal kompleks dan perlu sinergitas seluruh pihak untuk merumuskan solusinya.

"Tentu pengembangan proyek PLT'Sa Sarbagita ini sejalan dengan komitmen Pemkot Denpasar dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti juga yang telah dilakukan dengan penerapan Perwali 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan juga sejumlah program pelestarian

lingkungan strategis lainnya yang menggandeng seluruh lapisan masyarakat," ujar Jaya Negara. Ditambahkan dengan adanya proyek ini dirinya berharap sampah khususnya di Kota Denpasar akan bisa terurai secara lebih signifikan.

Penanggulangan sampah menurut Jaya Negara adalah merupakan isu strategis yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, karena kalau tidak segera ditanggulangi akan membawa berbagai dampak yang tidak menguntungkan bagi Kota Denpasar dan Bali pada umumnya.

Sementara, Direktur Proyek Sektor Energi & Ketenagalistrikan KPPIP, Triharyo Soesilo, mengatakan telah dilaksanakan sebelumnya Penandatanganan Head of Agreement antara PT.Waskita

Karya dan PT Indonesia Power terkait pengembangan PLT'Sa TPA Regional Sarbagita Bali pada 29 Januari 2019 lalu. "Indonesia Power akan bekerja sama dengan PT.Waskita Karya dalam membangun proyek ini dengan sinergi BUMN. Serta juga dikoordinasikan dengan PT.PLN serta berkonsultasi dengan Kementerian ESDM" ujar Triharyo Soesilo.

Lebih lanjut dikatakannya, dari rapat kali ini telah disepakati sejumlah poin di antaranya Dokumen Kajian diselesaikan pada bulan Juli 2019, Legal Opinion dari JAMDATUN untuk kerjasama antara PT. Indonesia Power dengan PT. Waskita Karya untuk pengembangan PLT'Sa Sarbagita Bali akan

diselesaikan secepatnya.

Pemprov Bali dan Pemkot serta Pemerintah Kabupaten lainnya telah juga menandatangani MoU Pasokan Sampah pada Mei 2019 lalu.

Pengembangan Proyek Instalasi Pengolahan Sampah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT'Sa) Sarbagita ini rencananya akan dikembangkan di kawasan TPA Suwung, Denpasar yang ditargetkan akan beroperasi mulai Tahun 2021 dengan tahap konstruksinya dimulai pada tahun 2019 ini. Dengan nilai Investasi mencapai USD 120 Juta dan dapat menampung 1200 ton sampah per hari. (feb/yor)

Pakai Dana Kontribusi Wisatawan

SOAL sumber pendanaan proyek ini akan menggunakan dari berbagai sumber. Sedikitnya ada empat sumber pemasukan PLT'Sa yakni penjualan listrik, rencana kontribusi wisatawan, biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) dan bantuan BLPS dari Dana ALokasi Khusus Non Fisik serta usulan dukungan pemerintah dari Dana Dukungan Tunai Infrastruktur untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Penggunaan kontribusi wisatawan ini tentunya cukup menarik, karena belum lama ini Pemprov Bali memang berencana mengenakan kepada wisatawan kontribusi masuk ke Bali. Per orang adalah USD10.

Untuk persiapannya diharapkan PT Indonesia Power dan PT Waskita Karya tidak hanya menyiapkan kajian tetapi juga perencanaan lainnya. KPPIP juga akan membantu untuk memberi dokumen studi terbuka untuk umum" ungkap Triharyo Soesilo. (feb/yor)

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 4



Gaji segera Dibayar, tapi Guru Abdi Di-Warning

NEGARA - Guru abdi seluruh Jembrana akhirnya mendapat gaji setelah tiga bulan tidak pernah mendapat upah dari mengajar mereka. Sayangnya, pembayaran gaji itu disertai warning dari pihak-pihak terkait karena membocorkan pada media mengenai gaji yang belum dibayar selama tiga bulan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jembrana I Nyoman Wenten mengatakan, gaji guru abdi sudah disiapkan. Gaji guru abdi tersebut sudah masuk pada keuangan, sehingga dalam waktu dekat siap dibayarkan. "Sudah masuk keuangan," ujarnya.

Sayangnya, ditanya jumlah total gaji dan jumlah keseluruhan guru abdi, Wenten mengaku belum memegang data karena sedang melakukan sembahyang. "Lupa, tidak hafal berapa," ungkapnya. Wenten membantah kabar bahwa guru abdi mendapat peringatan agar tidak membicarakan masalah keterlambatan gaji pada orang lain, terutama pada media. "Tidak ada itu, tidak ada yang memberi peringatan seperti itu pada guru abdi," tandasnya. (bas/gup)

Edisi : Kamis 16 Mei 2019

Hal : 5



PENERANGAN JALAN

Dishub Klungkung Butuh Rp 20 M

SEMARAPURA- Jalan di kabupaten Klungkung belum seluruhnya dilengkapi lampu penerangan jalan (LPJ). Sebab, untuk memenuhi kebutuhan LPJ, Pemkab Klungkung membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah. Lantaran anggaran terbatas, Pemkab akhirnya menerapkan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan LPJ.

Kepala Dinas Perhubungan Klungkung I Nyoman Sucitra mengakui belum semua jalan di Klungkung dilengkapi penerangan yang memadai. Tidak heran jika banyak permohonan pengadaan LPJ dari pihak desa masuk ke Dishub Klungkung. "Banyaknya usulan permohonan LPJ yang masuk. Sampai ratusan," kata Sucitra di Kantor Bupati Klungkung, Rabu (15/5).

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, Dishub Klungkung membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Nah, karena anggaran terbatas, pihaknya harus menerapkan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan LPJ. Jalan menuju objek pariwisata merupakan jalan-jalan yang masuk skala prioritas tersebut. "Pemenuhan LPJ ini kami lakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan. Anggarannya bisa dengan APBD Klungkung, Provinsi Bali atau pusat. Tergantung status jalannya," jelas dia.

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan, tahun ini anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan LPJ mencapai Rp 950 juta yang tersebar di Kecamatan Klungkung sebanyak Rp 150 juta, Kecamatan Banjarangkan Rp 175 juta, Kecamatan Dawan Rp 175 juta dan Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp 450 juta. (ayu/dot)

Edisi : Kamis 16 Mei 2019

Hal : 2



Trotoar Jebol Bahayakan Pejalan Kaki

AMLAPURA-Banyak trotoar berlubang di kota Amlapura. Kondisi ini jelas sangat mengganggu pejalan kaki. Seperti terlihat di depan Pasar Amlapura.

Dari pantauan koran ini trotoar berlubang juga terlihat di Jalan Teuku Umar tepatnya depan kantor Bawaslu Karangasem, Jalan Ngurah Rai dan di Jalan Gajah Mada Amlapura.

Trotoar jebol pun dikeluhkan warga pejalan kaki. Sebab, dianggap sangat membahayakan keselamatan pejalan kaki. Salah satu warga yang protes adalah Ketut Sudarma. Dia berharap Pemkab Karangasem memperhatikan persoalan tersebut. "Kami berharap agar segera diperbaiki," ujarnya kemarin (15/5).

Sementara itu, Kabid Binamarga PUPR Karangasem Ketut Prama Budarta mengakui masih ada trotoar yang berlubang belum mendapat perbaikan. Dia mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan. Perbaikan akan dilakukan khusus di dalam Kota. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 200 juta. "Anggaran ini khusus untuk pemeliharaan saja," ujarnya. (tra/dot)

Edisi : Kamis 16 Mei 2019

Hal : 2



Anggaran Dipotong, Penyelenggara Waswas

NEGARA - Rencana pemangkasan anggaran pilkada 2020 dari yang diusulkan, membuat KPU Jembrana dan Bawaslu Jembrana waswas. Pasalnya, apabila anggaran dikurangi dari sudah diajukan, dikhawatirkan pelaksanaan tahapan pilkada tidak berjalan karena kekurangan anggaran.

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara mengatakan, anggaran sebesar Rp 25 miliar yang telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten Jembrana sudah sesuai dengan pos anggaran kebutuhan selama pilkada, mulai dari tahapan awal hingga penghitungan. "Kalau dikurangi lagi, anggaran pasti kurang," ujarnya, Rabu (22/5).

Menurut Tangkas, anggaran pilkada 2020 digunakan untuk kebutuhan logistik pemilu, mulai dari surat suara hingga kotak suara. Karena untuk kotak suara yang telah digunakan untuk pilpres sudah tidak boleh digunakan, sehingga harus mengadakan lagi sesuai dengan jumlah



M.BASIR/RADAR BALI

DIKURANGI: Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara

tempat pemungutan suara (TPS) se Jembrana sebanyak 550 buah.

Selain kebutuhan logistik, honor penyelenggara dari tingkat kecamatan, desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS jumlahnya ribuan. Sebagian bekerja selama 9 bulan, kecuali KPPS. Sehingga membutuhkan honor penyelenggara yang cukup banyak. "Kalau kami di KPU sudah tidak ada honor, karena sudah menerima gaji dari pusat," terangnya.

Senada disampaikan Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan yang khawatir jika anggaran yang telah diajukan masih dikurangi lagi.

Sebelumnya usulan Rp 7,2 miliar sudah dirasionalisasi menjadi Rp 5,7 miliar. Anggaran tersebut untuk kebutuhan pengawasan selama pilkada 2020 mendatang. Porsi anggaran terbanyak untuk honor dari jajaran pengawas dari tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara.

Pelaksanaan pilkada 2020, lanjutnya, berbeda dengan pilkada 2015, dimana jajaran pengawas hanya tingkat desa. Sedangkan pada pilkada 2020 mendatang, pengawas hingga tingkat TPS satu orang pengawas. Tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membayar honor pengawas tingkat kecamatan, desa dan TPS. "Pengawas tingkat TPS diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya, sekretaris Daerah Jembrana I Made Sudiada menambahkan, pada pemilu 2015 lalu anggaran total sekitar Rp 17 miliar lebih. Rinciannya, KPU Jembrana sekitar Rp 11 miliar, Bawaslu Jembrana sekitar Rp 3,8 miliar, Polres Jembrana Rp 2,5 miliar dan Kodim 1617 Jembrana Rp 400 juta. "

Namun pengajuan untuk Pilkada 2020, semua anggaran yang diajukan naik menjadi sekitar Rp 33 miliar lebih. KPU Jembrana terbesar Rp 25 miliar, Bawaslu Jembrana setelah dirasionalisasi Rp 5,7 miliar, Polres Jembrana Rp 3 miliar dan Kodim 1617 Jembrana Rp 450 juta.

Berdasarkan ketersediaan anggaran, anggaran yang diajukan oleh masing-masing instansi masih terlalu tinggi, sehingga akan mengurangi semua anggaran menjadi Rp 22 miliar, dibagi sesuai kebutuhan untuk semua instansi yang mengajukan anggaran. (bas/rid)

Edisi : Kamis 23 Mei 2019

Hal : 8



Radar Bali

APBD Besar, DLHK Kurang

Armada Angkut Sampah

MANGUPURA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia, ternyata tak membuat pelayanan persampahan di Badung dapat diandalkan. Buktinya, masih banyak tempat pembuangan sampah yang liar. Celakanya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung mengaku tak bisa menjangkau seluruh Badung karena kekurangan armada.

Hal itu dibenarkan Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan kemarin. Pengakuan ini terkait dengan masih beroperasinya tempat pembuangan sampah di Desa Kekeran, Mengwi. Tempat pembuangan sampah itu liar dan tidak dilakukan pengangkutan ke

TPA Suwung. Anehnya lagi, belum ada solusi atas persoalan ini.

"Ya benar (TPS di Kekeran melanggar). Ini opsinya tidak ada, kalau kita tutup (TPS) di mana mereka akan membuang sampah. Karena layanan DLHK belum sampai di sana. Hal ini karena kekurangan armada. Kami mengangkut pada jalur utama kalau Kekeran kan jalannya ke tengah," jelas dia.

Sebelumnya TPS Kekeran itu ditutup karena ketahuan dipakai untuk membuang sampah medis. Kenyataannya, sampai saat ini, pembuangan sampah ke tempat itu masih berjalan.

Perbekel Desa Kekeran I Nyoman Suarda mengakui semenjak kejadian

dengan ditemukannya sampah medis sudah ada penyampaian dari Kadis DLHK untuk dilarang membuang sampah kembali di TPS tersebut. "Sesuai dengan komitmen dari DLHK akan memberikan dermaga untuk pengangkutan dari sampah rumah tangga yang ada di Desa Kekeran. Namun hingga kini belum ada," jelas I Nyoman Suarda, Selasa (14/5) kemarin.

Karena janji belum ditepati, sampah masih dibuang di tempat semula. Pihaknya mengaku akan menganggarkan armada di desa secara langsung pada anggaran perubahan 2019. Itu pun kalau anggaran APBDes mencukupi. Pihaknya berharap,

Pemerintah Kabupaten Badung bisa memfasilitasi desa dalam pengadaan TPS. Setidaknya setiap kecamatan ada satu TPS sehingga bisa lebih cepat desa membuang sampahnya. "Kalau per kecamatan ada (TPS) itu sangat kami harapkan. Kalau misalkan kita di desa membuang sampah ke Suwung itu kan lama. Armada juga lebih banyak yang dibutuhkan, karena kan di sana sifatnya ngantrean," tungkasnya.

Eka Merthawan menambahkan, pihaknya tidak bisa menutup TPA liar itu karena mereka tidak ada tempat lain. "Hal ini juga layanan DLHK sampai saat ini belum ada hingga sampai Desa Kekeran," jelasnya. (dwi/yor)

Edisi : Rabu, 15 Mei 2019

Hal : 4



Kinerja DPRD Provinsi Dipertanyakan

Setahun, Pesangon Karyawan Perusda Tak Terbayar

NEGARA - Kinerja Wakil Rakyat Provinsi asal pemilihan Jembrana dipertanyakan. Ini terkait kasus pesangon karyawan yang belum dibayar perusahaan daerah (Perusda) Provinsi Bali unit Perkebunan Pekutatan. Pasalnya, masalah yang berkaitan dengan hak karyawan ini sudah terjadi sejak setahun lalu dan saat ini bertambah masalah pesangon karyawan yang pensiun.

Ketua Komisi B DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusuma Yasa

mengatakan, masalah pesangon mantan karyawan yang pensiun, Suheng mengaku mendapat keterangan dari Perusda Bali dan PT. CIPL, saat ini keuangan perusahaan belum mampu membayar sekaligus. Perusahaan akan membayar pesangon secara bertahap. "Kami akan ingatkan lagi," janji dia.

Masalah Perusda ini, setahun lalu tepatnya 19 Februari 2018, komisinya sudah melakukan inspeksi ke perusahaan yang mengelola perkebunan karet di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan. Saat itu terjadi masalah hak karyawan yang belum dipenuhi perusahaan, mulai mengenai cuti dan gaji



M. BASIR/RADAR BALI

yang tidak dibayar sepenuhnya serta pemotongan tunjangan. "Sejak setahun lalu sudah kami ingatkan untuk memperbaiki manajemennya," ujarnya, kemarin (14/5).

Menurutnya, Perusda Provinsi Bali yang bergerak



Kami sudah sering sampaikan pada mereka (DPRD Provinsi) agar masyarakat Jembrana hak-haknya jangan diabaikan. Ngapain mereka tidak pernah ngomong, ngapain saja mereka sebagai wakil rakyat dari Jembrana."

I NYOMAN SUTENGSU KUSUMA YASA
Ketua Komisi B DPRD Jembrana

bidang perkebunan karet bekerjasama dengan PT Citra Indah Prayasa Lestari (CIPL) merupakan kewenangan dari Provinsi Bali. Akan tetapi, DPRD Jembrana sering memperingati perusahaan karena karyawannya merupakan warga Jembrana. "Kami hanya berkepentingan

dari sisi pekerjaannya. Harus segera diselesaikan masalahnya," terangnya.

Sebelum masalah pesangon pensiun ini mencuat, pihaknya sudah mendorong DPRD Provinsi khususnya dari daerah pemilihan Jembrana untuk mengingatkan perusda

Provinsi Bali ini. Karena dewan asal Pekutatan ini menduga ada masalah administrasi yang serius di Perusda Bali, jadi bila perlu harus diganti semua. "Kami sudah sering sampaikan pada mereka (DPRD Provinsi) agar masyarakat Jembrana hak-haknya jangan diabaikan. Ngapain mereka tidak pernah ngomong, ngapain saja mereka sebagai wakil rakyat dari Jembrana," ungkapnya.

Masalah pesangon pensiun mantan karyawan Perusda Provinsi Bali unit Perkebunan Pekutatan, disampaikan ke DPRD Jembrana. Sebanyak 7 orang karyawan yang pensiun

sejak Januari lalu belum dapat pesangon yang nilai totalnya Rp 300 juta lebih. Saat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana, melakukan mediasi mantan karyawan dengan perusda Provinsi Bali dan PT. Citra Indah Praya Lestari (CIPL), selaku pihak swasta yang bekerjasama mengelola perkebunan milik Perusda. Setelah dua kali mediasi, tanggal 9 dan 23 April lalu, pihak perusda dan PT. CIPL, berjanji akan membayar 30 April. Namun hingga saat ini belum ada pembayaran dari perusahaan plat merah tersebut. (bas/gup)

Edisi : Rabu 15 Mei 2019

Hal : 5



Rumah Potong Hewan Temesi Lama Mangkrak

Pemkab Sebut Akan Diaktifkan

GIANYAR- Rumah potong hewan (RPH) di Desa Temesi, Gianyar sudah bertahun-tahun mangkrak. Rencananya akan diaktifkan kembali. Pemkab Gianyar kini sedang menunggu proses hibah dari pemerintah provinsi ke kabupaten. Apabila proses lancar, rencananya pada 2020 mendatang RPH tersebut sudah bisa beroperasi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gianyar Gede Widarma Suharta menyatakan, RPH Temesi akan dikelola oleh perusahaan daerah. Antara RPH Gianyar dan RPH Denpasar akan bekerja sama. "Dari provinsi kami ditunjuk sebagai tempat pembuatannya yakni RPH itu sendiri. Sedangkan Pemkot Denpasar sepertinya ditunjuk sebagai tempat pemasaran sejenis supermarket daging," ujar Widarma Suharta, Selasa (14/5).

Menurutnya dalam proses pengkajian bangunan dan



DOK.RADAR BALI

LAMA MANGKRAK: Rumah potong hewan Temesi segera diaktifkan kembali.

peralatan masih dicek. Mengenai apa saja yang harus diganti dan harus dibeli, pihaknya memastikan dengan anggaran yang akan dihabiskan nanti. Pemerintah menganggarkan Rp 3 miliar sebagai dana penyetaraan. "Tapi tidak semuanya diperuntukan dari dana penyetaraan untuk RPH, melainkan salah satunya

terdapat digunakan sebagai modal untuk mengelola RPH tersebut," terangnya.

Terkait kepemilikan tanah sejak awal merupakan milim Pemkab Gianyar. Namun, peralatan dibeli oleh pusat. Sedangkan bangunannya milik provinsi. Namun untuk saat ini rencananya semua aset tersebut akan dimiliki oleh Pemkab Gianyar dan sudah

diurus bidang aset. "Secara prinsip tidak masalah, tinggal administrasi saja," ujarnya.

Soal daging sapi pihaknya akan bekerja sama dengan hotel dan restoran yang tersebar di kabupaten Gianyar dan sekitarnya. "Meningkatkan juga dengan Pergub yang terdapat di dalamnya mengutamakan pemanfaatan produksi Bali," ungkapnya.

Edisi : Rabu 15 Mei 2019

Hal : 2



Klaim Perawatan Pengungsi Gunung Agung Segera Dibayarkan

AMLAPURA- Biaya perawatan pengungsi Gunung Agung sekitar Rp 4,2 miliar lebih yang tersebar di sejumlah rumah sakit di Bali mulai menemui titik terang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mencairkan dana klaim perawatan kesehatan dalam waktu dekat ini. Hanya saja baru sebagian usulan saja yang akan dcairkan.

Kalaksa BPBD Karangasem Ida Bagus

Ketut Arimbawa mengatakan, bersama Dinas Kesehatan Karangasem pihaknya bertemu dengan tim dari BNPB di kantor Dinas Kesehatan pada Senin (20/5) lalu. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa BNPB akan segera mencairkan dana klaim perawatan pengungsi Gunung Agung dalam waktu dekat ini. "Nanti pencairannya melalui BPBD Karangasem. Untuk itu kami membuka rekening baru untuk pener-

imaan dana ini," katanya.

Namun dari total klaim biaya perawatan pengungsi Gunung Agung di RSUD se-Bali yang mencapai Rp 4,2 miliar lebih itu, hanya sekitar Rp 883 juta saja yang dalam waktu dekat ini akan dcairkan berdasar hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Yang lolos verifikasi saat ini pada saat tanggap darurat saja. Padahal lebih panjang siaga (status

siaga) dari pada tanggap darurat. Nanti dana yang cair ini akan dibayarkan terlebih dahulu ke RSUD yang klaimnya lolos verifikasi," terangnya.

Menurutnya masalah ini akan dibahas kembali antara BPKP, RSUD se-Bali dan BNPB. Pembahasan akan difasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tanggal 29 Mei mendatang. "Semoga seluruh klaim bisa dibayarkan semuanya," tandasnya. (ayu/dot)



Jembrana Tak Kebagian Anggaran

Untuk Bangun Senderan Penahan Abrasi

NEGARA - Harapan masyarakat pesisir Jembrana ada program pembuatan senderan pantai untuk menahan abrasi pupus. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2019 ini tidak mengalokasikan anggaran untuk membuat senderan pantai untuk menahan abrasi.

Padahal, berdasarkan data dari dinas pekerjaan umum Jembra-

dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jembrana I Wayan Darwin mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada pusat agar beberapa titik pantai yang abrasi mendapat

na, abrasi pantai di sepanjang pantai Jembrana sekitar 76 kilometer dari Desa Pengragoan hingga Kelurahan Gilimanuk, sekitar 30 kilometer lebih di 22 titik kritis pantai sudah kritis. Abrasi terparah di Pantai Pebuahan dan Pantai Gilimanuk. Abrasi di pantai ini sudah membuat puluhan rumah warga hancur.

Sehingga, Pantai Pebuahan sekitar 2,2 kilometer kritis dan perlu penanganan cepat agar abrasi segera teratasi sehingga tidak merusak pemukiman warga. Berkurangnya daratan akibat abrasi di Pantai Pebuahan ini sekitar tiga meter setiap tahun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

bantuan senderan pantai. Namun ternyata, tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk pembuatan senderan pantai Jembrana. "Wilayah pantai Bali hanya Buleleng yang dapat,"

jasnya, Selasa (28/5).

Menurutnya, pembuatan senderan abrasi dengan membuat tanggul memerlukan anggaran cukup besar. Sehingga, pemerintah pusat harus membagi anggaran untuk wilayah yang terdampak abrasi. "Mungkin karena keterbatasan anggaran," duga dia. Darwin menambahkan, mengatasi abrasi dengan senderan memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, pantai tidak akan tergerus abrasi lagi karena tertahan armor atau batu-batu berukuran besar. Namun dampak negatifnya, armor yang biayanya mahal dan merusak lingkungan karena memerlukan batu yang besar yang saat

ini sulit didapat. Sehingga salah satu solusi yang saat ini tengah uji coba adalah geotextile tube yang sudah terpasang di empat titik abrasi di Pantai Pebuahan, Desa Banyubiru. Empat buah empat geotextile tube dipasang sekitar 20 meter dari garis pantai sejak 2018 tersebut, sudah ada hasil. Terlihat garis pantai sudah ada perbedaan, antara yang terpasang geotextile tube dan tidak dipasang. Menurutnya, geotextile tube tersebut untuk mengumpulkan pasir ke pesisir pantai. Semakin banyak pasir yang terkumpul di pantai, sehingga daratan tidak lagi tergerus abrasi. (bas/gup)

Edisi : Rabu, 29 Mei 2019

Hal : 5



INFRASTRUKTUR

Keretakan Tebing Uluwatu Tak Kunjung Diperbaiki

MANGUPURA - Keretakan tebing di Pura Uluwatu, Ungasan, Kuta Selatan sampai saat ini belum bisa dilakukan penataan dan perbaikan. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung masih proses analisis manajemen konstruksi penguatan dinding tebing Uluwatu yang melibatkan Konsultan Konstruksi PT Inakko Internasional Konsulindo. Setelah itu, baru bisa dilakukan proses lelang untuk penataan keretakan tebing objek wisata tersebut.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR Badung A.A Gede Agung Dalem tak menampik belum bisa dilakukan proses lelang untuk penataan keretakan tebing Uluwatu. Karena penataan keretakan tebing masuk dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Sehingga pihak PUPR Badung harus melakukan analisis terlebih dulu dengan konsultan selesai. Setelah itu baru bisa melakukan penataan. "Saat ini sedang dipertimbangkan dari segi teknis. Bahan apa yang akan digunakan untuk lelang konstruksi. Nanti akan dilelang *design and build*, mulai dari perencanaan hingga pembangunan," terang pria yang akrab dipanggil Gung Dalem, Jumat (17/5).

Gung Dalem mengakui konsultan yang dilibatkan tersebut telah bekerja sejak awal bulan. Di target dalam satu bulan pengerjaan setidaknya mampu menelurkan kriteria dan syarat-syarat untuk proses lelang. "Konsultan masih bekerja untuk mencari tahu kondisi dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk proses lelang. Kira-kira parameter apa saja yang dipakai pekerjaan itu. Kalau sudah selesai itu, baru kita lakukan proses lelang untuk mencari kontraktor yang memungkinkan," jelasnya.

Ia memastikan, proyek yang menelan puluhan miliar itu akan dikerjakan dalam tahun ini. kemudian, proses lelang dapat segera dilakukan setelah proses pengumpulan data terkait bahan-bahan yang akan digunakan. "Setelah masuk lelang, kira-kira dua sampai 3 bulan lagi sudah bisa dikerjakan. Itu pun kalau ada kontraktor yang berminat karena ini masuk dalam pekerjaan khusus," terangnya.

Jasa konsultan, sebut Gung Dalem menelan anggaran Rp1,3 miliar. Sementara untuk pengerjaannya rencananya dianggarkan Rp30 miliar lebih. (dwi/yor)

Edisi : Sabtu 18 Mei 2019

Hal : 4



Miris! Jalan Desa Rusak Sepanjang 31 Km

Terparah di Desa Tianyar Barat

AMLAPURA- Jalan rusak masih saja ditemukan di kabupaten Karangasem. Bahkan, jalan rusak mencapai puluhan kilometer (Km). Jalan rusak terparah berada di Desa Tianyar Barat yang terletak di kecamatan Kubu, Karangasem.

Dari pantauan di lapangan, jalan rusak karena belum tuntas dikerjakan. Baru sebatas lapisan penetrasi macadam (*lapen*), belum di hotmix. Lebih parahnya lagi jalan desa masih berupa jalan tanah. Seperti yang terlihat di jalan banjar Munti Gunung Kauh, Munti Gunung Induk, Munti Gunung Kangin dan Bukit Sari.

Terkait banyaknya jalan rusak tak dibantah Perbekel Tianyar Barat, I Gde Agung Pasrisak Juliawan. Menurut Agung jalan-jalan yang rusak di desanya mencapai 31 kilometer. Agung mengatakan dari 31 kilometer jalan rusak, terdapat 15 Km jalan desa dan 16 Km merupakan jalan Kabupaten. "Di Tianyar barat jalan-jalan hampir merata rusak," ujar pria asal Munti Gunung kepada koran ini, Jumat (17/5) kemarin.

Sementara itu, jalan kabupetan yang rusak juga cukup panjang. Di antaranya adalah jalan Munti Gunung-Bukit Catu; Munti Gunung Tengah menuju Bukit Catu; Munti Gunung Tengah menuju Bukit Sari dan jalan Munti Gunung ke jalan nasional jalan raya Amlapura—Buleleng.

Sedangkan untuk jalan desa yang rusak di Banjar Munti Gunung Kauh sepanjang 5 kilometer, Munti Gunung Tengah 2 Km, Munti Gunung Induk 1 Km, Munti Gunung Kangin 1 Km, dan sisanya terse-

bar di beberapa Banjar Dinas lainnya.

Untuk perbaikan jalan rusak tersebut diakui Agung sudah mengusulkan ke pemerintah kabupaten. Hanya saja, sejauh ini pihak Dinas PUPR belum bisa merealisasikan perbaikan jalan-jalan tersebut. "Ya, belum bisa terealisasi karena kalah diverifikasi," tambahnya.

Tahun 2019 ini, lanjutnya, Dinas PUPR berencana akan melakukan perbaikan jalan di Munti Gunung menuju Bukit Sari. "Panjangnya sekitar 4 km," kata Agung.

Agung berharap Pemkab Karangasem bisa segera menuntaskan perbaikan jalan-jalan rusak di desa. Sebab, jalan akan sangat mendorong perekonomian warga desa. Terlebih lagi warga di Munti Gunung yang selama ini dikenal dengan "Desa Gepeng". Tanpa sentuhan pembangunan di desa tersebut, lanjutnya, akan sulit mengajak warga yang doyan mengemis untuk kembali ke desanya untuk membagun. "Nah, dengan adanya jalan bagus nantinya diharapkan warga Munti Gunung bisa kembali membagun desa mereka. Dengan demikian ekonomi pedesaan akan menggeliat dan hidup," bebernya.

Terkait anggaran, dana desa tahun 2019 ini akan dilakukan perbaikan jalan sepanjang 6 km. Di antaranya 1 km jalan Batu Meyeh, 3 km jalan Banjar Munti Gunung Kauh dan Munti Gunung induk sepanjang 1 km. Sementara di Munti Gunung Kangin akan diperbaiki sepanjang 1 km.

Untuk jalan Desa diakui Agung, pihaknya secara rutin melakukan perbaikan setiap tahunnya. Desa Tianyar Barat mampu memperbaiki jalan desa 6 km. Perbaikan jalan diakuinya menjadi prioritas utama untuk menopang perekonomian desa. (tra/dot)

Edisi : Sabtu 18 Mei 2019

Hal : 2



Mantan Karyawan Perusda Mesadu ke Dewan

Janji April, Pesangon Tak Kunjung Dibayar

NEGARA - Mantan karyawan perusahaan daerah (Perusda) Provinsi Bali Unit Perkebunan Pekutatan, menuntut perusahaan untuk membayar pesangon yang belum dibayar sejak pemberhentian dengan hormat atau pensiun 2 Januari lalu. Sebanyak tujuh orang karyawan yang pensiun belum dapat pesangon dengan total Rp 300 juta lebih.

Ketut Sudarma, mantan karyawan Perkebunan Pekutatan mengatakan, masalah tersebut sudah disampaikan kepada Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Jembrana. "Sebagai warga Jembrana, saya juga minta bantuan wakil rakyat membantu masalah ini," ujarnya, usai menyerahkan surat pengaduan ke dewan kemarin (13/5).

Pria yang sebelumnya menjabat supervisi teritorial selama 35 tahun di perusahaan plat merah tersebut menjelaskan. Semestinya pesangon dibayar sejak pensiun awal Januari 2019 lalu. Nilai totalnya sebesar Rp 49 juta lebih. Selain Sudarma, masih ada 6 karyawan lain yang juga belum dibayar pesangonnya. Jadi total pesangon sebesar Rp 346 juta lebih. "Pada saat mediasi perusahaan memang mengakui pengajiannya ti-

dak sesuai dengan standar upah," ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana sudah mediasi mantan karyawan dengan Perusda Provinsi Bali dan PT. Citra Indah Praya Lestari (CIPL), selaku pihak swasta yang bekerjasama mengelola perkebunan milik Perusda. Setelah dua kali mediasi. Tepatnya pada 9 April dan 23 April lalu, pihak perusda dan PT. CIPL, berjanji akan membayar pesangon 30 April. "Janjinya 30 April. Tapi sampai sekarang tidak ada yang dibayar," terangnya.

Di bagian lain Kepala Unit Perkebunan Pekutatan Perusda Provinsi Bali Ketut

Kami sudah koordinasi dengan direksi. Belum bisa memastikan kapan dibayar (pesangon). Tapi tetap akan kami bayar."

KETUT NASA
Kepala Unit

Nasa mengakui bahwa sampai saat ini pesangon mantan karyawan yang sudah pensiun belum dibayar. "Tetap kami bayar pesangonnya," jawabnya dari balik telepon genggamnya. Baik Perusda maupun PT.CIPL masih terkendala keuangan. Sehingga menunggak pembayaran pesangon mantan karyawan yang nilainya Rp 300 juta lebih. "Kami



Janjinya 30 April. Tapi sampai sekarang tidak ada yang dibayar."

KETUT SUDARMA
Mantan Karyawan

sudah koordinasi dengan direksi. Belum bisa memastikan kapan dibayar (pesangon). Tapi tetap akan kami bayar," tegasnya. (bas/gup)

Edisi : Selasa 14 Mei 2019

Hal : 5



Komitmen Pemkab Buleleng Penuhi Hak Kesehatan Warga

Siapkan Tambahan Rp 28,5 Miliar untuk Program UHC

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan komitmennya dalam menjamin hak kesehatan masyarakat Buleleng. Rencananya pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 28,5 miliar pada APBD Perubahan mendatang.

BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana sadar betul, kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satu upaya pemerintah ialah melindungi masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam program jaminan kesehatan. Bukan hanya

segelintir orang saja, namun seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pada APBD Induk 2019 lalu, Pemkab Buleleng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar. Rencananya pada APBD Perubahan 2019 nanti, pemerintah akan kembali memasang tambahan

anggaran sebesar Rp 28,5 miliar.

Anggaran itu dipasang sebagai komitmen pemerintah melindungi seluruh masyarakatnya dalam program *Universal Health Coverage* (UHC), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

► **Baca *Siapkan...* Hal 11**

PRO RAKYAT: Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana berkomitmen untuk melindungi seluruh masyarakat Buleleng dalam bidang kesehatan.

■ SIAPKAN...

Sambungan dari hal 1

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bupati Agus Suradnyana mengatakan, aspek kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diurus oleh pemerintah daerah karena menyangkut pelayanan dasar yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Buleleng.

Menurutnya saat ini pemerintah memang baru bisa mengalokasikan dana sebesar Rp 14,5 miliar. Sebab ada sejumlah kegiatan lain yang membutuhkan dana cukup besar. Meski begitu, ia berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,5 miliar pada APBD Perubahan tahun ini.

"Kami masih ada anggaran perubahan, dan kami sudah upayakan sumber-sumber pendapa-

tan di tengah ini dengan baik. Ini (program UHC) pasti akan tercover di APBD perubahan. Itu tanggung jawab pemerintah daerah," kata Agus di sela-sela Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sehat (JKN-KBS) di RSUD Buleleng pagi kemarin (20/5).

Menurutnya pemerintah sudah melakukan inventarisasi sumber dana, dalam menyusun APBD Perubahan nanti. Ia pun meminta masyarakat tidak khawatir atas ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemkab Buleleng. Apalagi Bupati Agus telah menandatangani pernyataan komitmen pemerintah daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Buleleng yang terdaftar dalam program UHC.

Agus juga meminta agar BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, memberikan pelayanan yang optimal. Ia berharap jenjang rujukan dapat dipermudah, sehingga masyarakat yang mencari rujukan dari puskesmas,

dapat langsung dirujuk ke RSUD Buleleng demi mendapatkan pelayanan yang paripurna. "Saya minta ini (akses masyarakat ke RSUD) segera dibuka, jangan menunggu bulan Juni. Bila perlu, besok saya perintahkan Wakil Bupati untuk ke Jakarta agar bisa membuka ini," katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Elly Widiani mengungkapkan, pihaknya memberikan apresiasi atas upaya Pemkab Buleleng untuk menjamin seluruh penduduk Buleleng dalam program UHC ini. Elly pun meyakini komitmen dari pemerintah. "Sampai saat ini kepesertaan masyarakat Buleleng yang sudah ber-JKN sebanyak 96,58 %. Jadi penduduk yang belum ber-JKN sekitar 3%," ungkapnya.

Disinggung terkait akses masyarakat ke RSUD, Elly menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan sistem rujuk terintegrasi dan sistem rujukan berjenjang secara *online*. Menurutnya, seluruh peserta JKN-KIS sudah

didaftarkan pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bisa Puskesmas, Klinik, dan Dokter Keluarga. Untuk segmen yang didaftarkan olah Pemda, peserta itu didaftarkan pada faskes tingkat pertama di Puskesmas.

Dalam hal peserta JKN tidak bisa ditangani di faskes pertama, Elly melanjutkan, yang bersangkutan berhak dirujuk ke fasilitas pelayanan lanjutan, yaitu Rumah Sakit (RS). Namun, seperti diketahui bahwa RS sendiri terdiri dari Tipe D, Tipe C, Tipe B, dan Tipe A. "Sebenarnya, dari Puskesmas bisa saja langsung dirujuk ke rumah sakit Tipe B apabila kompetensi dokter yang dibutuhkan tidak ada di rumah sakit Tipe C atau Tipe A. Contohnya, spesialis Onkologi dan Urologi, adalah dokter-dokter yang tidak ada di rumah sakit Tipe C dan Tipe D. Jadi untuk *case* seperti ini, masyarakat dari faskes pertama bisa langsung dirujuk ke rumah sakit Tipe B," jelasnya. **(eka prasetya/rba/gup)**

Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 1 dan 11



SKY GARDEN Masih Ngeemplang Pajak, Izin juga Mentok ✓

MANGUPURA - Keberadaan kelab malam Sky Garden di Jalan Legian, Kuta, Badung masih mendapat keistimewaan dari pemerintah. Meski telah diketahui kedaluwarsa, dan mengemplang pajak, sampai saat ini belum ditindak tegas. Tidak ada penutupan total terhadap usaha ini, melainkan hanya ditutup setengah.

Kasatpol PP Badung IGA Suryanegara mengakui, sekarang belum ada perkembangan pembayaran cicilan tunggakan pajak. Karena kabarnya mereka membayar piutang pajak secara mencicil tapi pembayarannya juga harus ada rincian neraca laporan kegiatan club malam tersebut. Nah, pertanggungjawaban manajemen lama tidak ada neraca tersebut. Sehingga Bapenda tidak bisa memastikan jumlah total piutang dan dendanya. "Dari tanggal 5 Mei sampai sekarang belum kelar, mereka belum juga bisa membayar karena terbentur administrasi neraca laporan internal mereka," ungkap Suryanegara, Senin (20/5).

Mengenai izin operasional yang kedaluwarsa, Suryanegara mengakui mereka sudah melakukan permohonan pendaftaran perizinannya. Lebih lanjut, mengenai masalah diproses atau tidaknya itu kewenangan di Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Badung. Namun untuk bisa diproses tentu pihak Sky Garden juga harus membayar piutang pajak. "Karena minimal ada pembayaran pajak dan bikin surat pernyataan, baru bisa diproses. Karena belum ada (pembayaran pajak), jadi kemungkinan belum bisa diproses," ungkapnya.

Imbuhnya, langkah Satpol PP saat ini tentu mereka mengejar agar segera membayar piutang pajak. Mengenai izin, mereka sejatinya tidak punya izin tetapi izin operasionalnya kedaluwarsa dan ada kebijakan sembari mereka menunggu proses pengurusan izin. "Kalau dalam perjalanannya permohonan perizinan ditolak oleh Dinas PMPTSP, baru kami bertindak (penyegehan). Kami masih menunggu," tegasnya.

Sementara masih dilakukan penutupan setengah operasional Sky Garden. Kalau mereka tetap membandel Satpol PP juga bisa langsung menindak. "Yang jelas kami tetap melakukan tindakan sesuai aturan. Kalau sudah benar-benar permohonan izin ditolak dan kami langsung menindak tegas," terangnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan juga mengakui Sky Garden belum ada tindak lanjut untuk melakukan perpanjangan izin operasional yang sudah kedaluwarsa tersebut. "Sampai saat ini (Senin, kemarin) belum ada progress," pungkasnya. **(dwi/yor)**

Edisi : Selasa 21 Mei 2019

Hal : 4



Akhirnya Diperbaiki 14 Kali Disurati,

SINGARAJA - Dinas Perhubungan Buleleng bahkan sudah 14 kali menyurati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Bali-NTB terkait rusaknya traffic light di Simpang Penarukan, Singaraja. Sekian lama menunggu, akhirnya kemarin (27/5) tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Tiang traffic

light sudah dilepas. Lubang-lubang galian juga nampak di setiap sudut persimpangan. Baik itu di arah Jalan Sam Ratulangi, maupun dari arah Jalan WR. Supratman.

Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan mengatakan, perbaikan traffic light itu dilakukan BPTD. Mengingat traffic light itu

ada di jalur nasional, sehingga perbaikannya pun menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPTD.

"Perbaikannya sebenarnya sudah dari tanggal 22 Mei kemarin. Rencananya proses perbaikan itu memakan waktu selama 4 bulan," kata Gunawan. Berdasarkan informasi dari BPTD, perbaikan

traffic light itu memakan anggaran Rp 1,7 miliar. Proyek dikerjakan PT. Mortex yang memenangkan tender. Anggaran Rp 1,7 miliar itu bukan hanya untuk mengganti traffic light saja. Namun juga ada pengadaan rambu lalu lintas mulai dari Kota Singaraja hingga Kota Amlapura. (eps/gup)

Edisi : Selasa 28 Mei 2019

Hal : 10



Radar Bali

KEPENDUDUKAN

Blangko Minim, 3.873 Warga Belum Miliki e-KTP

AMLAPURA-Persediaan blangko e-KTP di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Karangasem sempat habis awal Mei lalu. Menurut Kadisdukcapil Karangasem I Wayan Sumidia, stok blangko habis. "Sempat kosong sekitar tiga minggu," ujarnya didampingi Kasi Identitas Penduduk Ni Made Winartini kemarin (27/5).

Sumidia mengatakan stok blanko menipis terjadi karena pemberian blangko dari pemerintah pusat dikirim sedikit. Saat ini masih ada stok sebanyak 1.006 keping pada 24 Mei lalu.

Sementara itu, untuk perekaman e-KTP sendiri masih terus dilakukan. Rata-rata setiap harinya 30- 40 orang yang melakukan perekaman e-KTP.

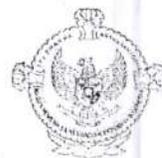
Saat ini, lanjut dia, warga yang sudah merekam dan belum mendapatkan e-KTP sebanyak 3.873 orang.

Kekosongan blangko sempat terjadi bulan April lalu selama tiga minggu. "Kita mengajukan 5.000 blanko. Namun hanya dipenuhi 500 keping," ujarnya.

Sedangkan untuk KTP Anak atau Kartu Identitas Anak (KIA) dianggarkan 18 ribu keping. Saat ini sudah ada 6.000 KIA yang mendaftar dan baru berhasil dicetak 1000 keping. Untuk KIA diakui Winartini karena terbatasnya mesin cetak. "Ya alatnya yang terbatas," tukasnya. (tra/dot)

Edisi : Selasa 28 Mei 2019

Hal : 2



Jembatan sebagai Jalur Evakuasi Segera Rampung

AMLAPURA-Tim *Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)* Karangasem bersama warga Bukit Galah akhirnya membangun jembatan dan jalan baru di tepi barat desa. Jembatan tersebut beberapa kali sempat putus saat terjadi banjir lahar hujan di Gunung Agung. Terakhir jembatan tersebut putus saat hujan lebat September 2018 lalu.

Awalnya, warga bukit Galah memilih mengungsi ke Dusun Teguh, Desa Amerta Bhuana, Selat. Mereka ogah kembali ke desanya. Sebab, warga takut kalau Gunung Agung erupsi. Lebih-lebih jembatan serta jalur evakuasi masih rusak parah. Jembatan ujung barat desa putus sehingga sulit pulang ke kampung.

Saat itu, BPBD Karangasem sempat meminta ban-



WAYAN PUTRA/RADAR BALI

INFRASTRUKTUR: Pembangunan jembatan di Banjar Bukit Galah, Sebudi, Selat yang menghubungkan Jalan Geriana Kangin dan Geriana Kauh segera rampung. Jembatan tersebut penting karena sebagai jalur evakuasi.

tuan alat berat ke Dinas PUPR. Bahkan, membangun jembatan darurat. Namun, saat banjir datang jembatan tersebut kembali hanyut. Bersamaan dengan itu jembatan darurat yang menghubungkan Jalan Geriana Kangin dan Geri-

ana Kauh melintas di atas Tukad Sabuh atau Tukad Panti juga hanyut. Warga Bukit Galah saat ini sudah bisa kembali ke kampung halamannya. Mereka adalah pengungsi terakhir Gunung Agung 2018.

Menurut Kepala Pelaksana

BPBD Karangasem IB Ketut Arimbawa, jembatan yang dibangun sangat penting untuk jalur evakuasi jika suatu waktu terjadi bencana Gunung Agung erupsi.

Dia berharap dengan dibangunnya jembatan tersebut selain sebagai akses evakuasi, juga bisa dipergunakan warga Bukit Galah untuk pergi ke pasar dan kota. "Dengan adanya jembatan ini diharapkan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat disana. Mereka bisa pergi ke pasar dengan lancar untuk menjual hasil kebunnya," ujarnya.

Seperti diketahui, pengerjaan jembatan tersebut menggunakan anggaran dana desa. Pengerjaan jembatan berlangsung selama 56 hari kalender. Dan kemarin masih dalam tahap pengerjaan akhir. (tra/dot)



Radar Bali

KARYA NYEKAH KURUNG KINEMBULAN DESA ADAT TAMAN

Bupati I Nyoman Giri Prasta Menyerahkan Bantuan Rp 900 Juta

MANGUPURA - *Krama* Desa Adat Taman, Abiansemal, Badung, melaksanakan *Karya Pitra Yadnya, Nyekah Kurung Kinembulan*. Rangkaian upacara dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, di Lapangan Desa Taman, Jumat (3/5). Mendukung *karya* ini, Bupati menyerahkan dana *upakara* Rp 900 juta.

Bendesa Adat Taman I Made Kupasada didampingi ketua panitia *karya*, Bagus Putu Suparta, menyampaikan, terima kasih atas kehadiran Bupati, sekaligus membantu penuh *karya* ini. Bantuan dari Bupati

Badung ini, sangat meringankan beban masyarakat Taman. "Atas program dari Pemkab Badung, kemajuan pembangunan di Taman sangat dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Terkait *karya* dijelaskan, sesuai agenda desa adat, *karya nyekah* bersama ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Bila *sawa* sudah melebihi dari 25 *sawa*, *nyekah* boleh diambil pada tiga tahun. "Nyekah kali ini, diikuti sebanyak 65 *sawa*. Sehingga, dapat dilaksanakan di tahun ketiga," imbuhnya.

Rangkaian *karya* dimulai sejak 4 April lalu. Puncak *karya*

nyekah bertepatan *rahina tilem desta*, Sabtu (4/5). Pada puncak *karya*, diawali upacara *ngulapin*, raja sewala/raja singa, mendak *tirta ning murwa daksina*. Dilanjutkan *mesangih*, *mepetik/telubulan*, *pengaskaran*, dan *prelina*. Kemudian Minggu (5/5), *nyegara gunung* ke Goa Lawah, *mepamit ring peyadnyan*, *kahyangan tiga* dan *nilapati*. *Nyekah* diikuti 65 *sawa*, *mesangih* 53 orang, *mepetik lan metelubulan* 46 orang, dan 37 orang *meraja sewala*.

Bupati Giri Prasta merasa

bangga berkaitan *karya nyekah* bersama. Yaitu; *atiwa-tiwa*, *atma wedana*, dan *sarwa prakti*. Hal ini, sejalan prioritas program pembangunan Pemkab Badung dalam melestarikan seni, adat, agama, dan budaya. Bupati juga menyampaikan secara umum proses *nyekah*. Di mana, ada upacara *murwa daksina* dengan menggunakan sapi hitam (*selem*) sebagai lambang linggih betara Siwa mengantarkan *atma* menuju surga. *Meajar-ajar* ada empat tempat yang disebut *catur loka pala*. Yaitu; barat ke Batukaru, utara ke Beratan, selatan ke

Uluwatu, timur ke Goa Lawah. Setelah selesai *meajar-ajar*, kembali ke *bale peyadnyan*, ke Siwa, *pura kahyangan tiga*, dan *merajan/rong tiga* rumah masing-masing disebut *Dewa Pretista*. "Kami harapkan, upacara *nyekah* ini, dilaksanakan berdasarkan atas sastra-sastra agama Hindu," harapnya. (ad-vertorial/dwi/djo)

SUPPORT PEMERINTAH: Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan untuk *Karya Pitra Yadnya, Nyekah Kurung Kinembulan* di Lapangan Taman, Abiansemal, Jumat (3/5).

Edisi : Senin 6 Mei 2019

Hal : 8



RAMBU LALU LINTAS

Dishub Tempuh Upaya Perbaikan

SINGARAJA - Dinas Perhubungan Buleleng terus menempuh upaya-upaya untuk melakukan perbaikan pada *traffic light* di Simpang Lovina, yang padam sejak dua pekan terakhir. Mulai dari perbaikan secara swadaya hingga menyurati Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali-Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan mengatakan, pihaknya telah menyurati Balai Pengelola Transportasi Darat pada 29 April lalu. Dishub Buleleng terpaksa menyurati Balai karena tak berhasil melakukan perbaikan. Mengingat kerusakan yang terjadi kompleks. "Mengingat *traffic light* tersebut berlokasi pada ruas jalan nasional, daerah pariwisata, serta rawan kecelakaan. Kami mohonkan kepada balai agar *traffic light* itu bisa segera diperbaiki," kata Gunawan.

Lebih lanjut Gunawan mengatakan, *traffic light* tersebut sempat berfungsi pada 2 Mei lalu, setelah pihak vendor melakukan perbaikan. Namun kembali terjadi kerusakan. Kondisi itu pun telah disampaikan secara lisan maupun secara tertulis pada pihak balai. (eps/dot)

Edisi : Senin 6 Mei 2019

Hal : 9



**BUPATI GIRI PRASTA HADIRI MAMUNGKAH
DI BATUCULUNG, KUTA UTARA, BADUNG**

Serahkan Hibah Rp 400 Juta

MANGUPURA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta hadir Karya *Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan, Ngentegang Bale Kulkul, lan Padudusan Alit Medasar Tawur Madurga Jangkep*. Yang digelar *krama* Banjar Batuculung di Pura Begawan Penyarikan Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kamis (16/5).

Bupati didampingi tokoh masyarakat Batuculung, tandatangani prasasti, berikut menyerahkan bantuan *upakara* Rp 400 juta.

Parwartaka karya I Gede Sumadi berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pekab) Badung. Menurutnya, *Karya Mamungkah* dilaksanakan berdasarkan rampungnya Bale Banjar Batuculung dan Pura Begawan Penyarikan Banjar Batuculung. Dijelaskan, balai banjar itu, direncanakan 2014, melalui dua tahap.

Pertama, pada 2016, membangun bale paruman atau wantilan, bale gong, pewaregan, dan bale kulkul. Habiskan Rp 1,6 miliar lebih. Dananya dari hibah Pekab Badung 2016 sebesar Rp 500 juta. Dari kas *krama* banjar Rp 300 juta, *punia* dari *krama* banjar Rp 550 juta. Serta, dari LPD Desa Kerobokan Rp 300 juta.

Pada 2018 dilanjutkan pembangunan tahap kedua; linggih parahyangan, bale gede, gedong simpen, candi bentar, dan tembok penyengker. Menghabiskan Rp 1,3 miliar. Dibantu hibah Pekab Badung 2018 sebesar Rp 1 miliar lebih, dan dari LPD Desa Kerobokan Rp 250 juta.

Desember 2018 mecaru, melaspas, mendem pedagingan, lan *ngunggahang bale kulkul*. Habiskan Rp 150 juta, dari *krama* Banjar Batuculung.

Lantas, pada *rahina* Buda Kliwon Sinta, gelar *karya mamungkah, ngenteg linggih, mupuk*

pedagingan, ngantegang bale kulkul, lan padudusan alit medasar tawur madurga jangkep. Habiskan Rp 500 juta, bersumber bantuan Pekab Badung Rp 400 juta dan *punia krama* banjar Rp 100 juta.

Bupati Giri Prasta men-

gapresiasi rasa persatuan masyarakat Banjar Batuculung. Dikatakan, dalam konsep Hindu, ada tiga pilar; *Wimuda, Winata, dan Wiwerda*. *Wimuda* itu anak-anak, *Winata* itu remaja atau *yowana*. Karena, sudah bisa membedakan yang baik dan benar. Sedangkan, *Wiwerda* merupakan para orang tua. "Maka dari itu, untuk permasalahan yang ada di desa maupun di bale banjar, ketiga pilar ini harus bisa bersatu untuk bisa membangun di daerahnya masing-masing," pintanya.

Di akhir kegiatan, Bupati Giri Prasta serahkan *punia* Rp 10 juta untuk mendukung *sekaa* gong Banjar Batuculung dan Rp 20 juta untuk PKK Banjar Batuculung. (advertorial/dwi/djo)



Proyek Puskesmas Diduga Rekayasa

AMLAPURA Sejumlah kontraktor lokal di Karangasem merasa kecewa terhadap lelang proyek pembangunan Puskesmas Selat (DAK) yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pasalnya, lelang ini diduga penuh dengan rekayasa dan "pengaturan" serta permainan Pokja untuk memenangkan satu peserta lelang, terutama dari segi persyaratan

Dugaan itu terbaca pada laman LPSE Karangasem dengan menyebutkan, untuk dokumen penawaran pokja mempersyaratkan harus memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 90001, ISO 14001, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001) yang terakreditasi KAN terhadap penyedia

barang dan jasa untuk usaha kecil, dan mempersyaratkan SKA untuk usaha kecil. Sedangkan berdasarkan permen PU NOMOR 07/PRT/M/2019 sudah jelas untuk usaha kecil tidak mempersyaratkan persyaratan tersebut, namun pokja berdalih dan menganggap pekerjaan ini kompleks dan berisiko tinggi.

Menurut sejumlah kontraktor, pekerjaan tersebut semestinya tidak bisa dianggap pekerjaan kompleks/berisiko tinggi. Sejumlah Kontraktor menilai lelang proyek Puskesmas Selat tidak beres. Sebab, pokja sengaja menambahkan persyaratan yang tidak diatur dalam Permen PU, utamanya dalam jumlah personil dan penyedia harus memiliki Surat Referensi Kinerja dari pemberi kerja sebelumnya maksimal 2 (dua) tahun ter-



ISO 14001 dan OHSAS 18001 menjadi persyaratan dalam kegiatan ini. Yang persyaratan tersebut termasuk syarat dokumen lain atau tambahan syarat sesuai dengan Permen PUPR yang berlaku."

KETUT SURANATA
Pokja 2 ULP Karangasem

akhir dengan menyatakan kinerja minimal memuaskan, untuk pekerjaan bangunan gedung, sekurang-kurangnya 2 (dua) Surat Referensi Kinerja dari Instansi (Pemerintah/Swasta) yang berbeda.

Hal tersebut kesannya sangat dipaksakan mengingat pada acara anwizing sejumlah kontraktor mempertanyakan atau mengusulkan agar tidak mempersyaratkan seperti tersebut karena dinilai bertent-

gan dengan Permen PU atau peraturan lain terkait dengan pengadaan barang dan jasa. "Padahal persyaratan referensi perusahaan seharusnya tidak di persyaratan" ungkap sejumlah Kontraktor di Karangasem, Kamis (30/5).

Akibat pengaturan yang dibuat-buat, papar sumber, seluruh kontraktor lokal Karangasem tak bisa mengikuti lelang kegiatan tersebut. Kecuali hanya satu perusahaan/kontraktor luar Kab./Kota yang bisa mengikuti lelang. Diduga ada permainan dan "kongkalikong" antara rekanan dengan pokja.

"Sebaiknya, PPK dan Pokja lebih berhati-hati menyusun dalam dokumen lelang seperti ini. Guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat," keluh sumber.

Karena itu, sejumlah kon-

traktor mengharapkan pihak terkait agar ikut memantau adanya proses lelang terbuka ini. Terkait hal itu, Ketut Suranata dari Pokja 2 ULP Karangasem dalam dokumen penawaran LPSE menjelaskan, persyaratan yang dibuat oleh PPK telah melalui berbagai pertimbangan, sehingga hasil yang diperoleh berkualitas. Sebab itu, dari satu dan dua pekerjaan konstruksi ini memiliki sifat kompleks (berisiko tinggi) oleh karenanya ada SKA. ISO 90001.

"ISO 14001 dan OHSAS 18001 menjadi persyaratan dalam kegiatan ini. Yang persyaratan tersebut termasuk syarat dokumen lain atau tambahan syarat sesuai dengan Permen PUPR yang berlaku," tandas Ketut dalam laman LPSE Karangasem. (tra/rid)

Edisi : Jumat, 31 Mei 2019

Hal : 6



Jalan Kabupaten Rusak Parah

NEGARA - Kondisi jalan kabupaten yang berada di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, hancur sehingga membahayakan pengguna jalan. Kondisi itu sudah terjadi sejak setahun terakhir, namun tidak pernah diperbaiki. Dinas terkait menjanjikan perbaikan pada tahun 2019, karena sudah dianggarkan.

Informasi dari warga, kondisi jalan di kelurahan yang berada di tengah Kota Negara tersebut sudah sering ditambal. Namun, tidak lama kemudian rusak lagi. Kerusakan jalan tersebut di beberapa titik hingga ke wilayah Lingkungan Pancardawa. Akibat jalan rusak, warga jadi korban saat melintas dengan kendaraan. Karena itu, warga berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman Jembrana I Wayan Darwin mengatakan, kerusakan jalan di Kelurahan Pendem sudah direncanakan akan diperbaiki pada tahun 2019 ini. "Sudah direncanakan perbaikan," jelasnya kemarin.

Menurut dia, perbaikan jalan sekitar 3,4 kilometer tersebut menggunakan dana alokasi khusus dengan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar. Pengerjaan tinggal menunggu proses tender selesai. (bas/dot)

Edisi : Jumat, 24 Mei 2019

Hal : 9



Belum Berfungsi Sejak Kelar Dua Tahun Lalu

● Bangunan Pusat Informasi Wisatawan Mangkrak

BANGLI, TRIBUN BALI

- Dua tahun berlalu sejak kelarnya masa renovasi, bangunan Tourist Information Center (TIC) di wilayah Kintamani belum juga memiliki penghuni. Kini bangunan senilai Rp 600 juta itu tampak memprihatinkan.

TIC terletak di areal Pasar Singamandawa, Kintamani, tepatnya di bagian utara pasar. Dari sisi lokasi, bangunan ini cenderung berada di dalam areal pasar sehingga tidak mudah untuk ditemukan. Pantauan *Tribun Bali* Rabu (15/5), bagian depan TIC juga tidak terlihat layaknya ruang penyedia informasi destinasi wisata.

Pada bagian depan justru terlihat seperti rumah kosong serta dijadikan tempat bagi para pedagang meletakkan grobak dagangan. Sedangkan halaman TIC dipenuhi dengan semak belukar yang tumbuh subur. Di sisi kanan maupun kiri pintu masuk. Selain itu bangunan ini juga dipenuhi kotoran hewan dan beberapa sampah.

Kepala Bidang Bina Objek Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli, I Wayan Bona mengakui hingga kini bangunan tersebut belum dihuni. Kata dia, hal ini dikarenakan pihaknya masih menunggu pembentukan kelompok

sadar wisata (Pokdarwis) Kintamani.

"Itu belum dimanfaatkan secara optimal. Rencananya pemanfaatan secara optimal baru bisa dilakukan setelah terbentuknya Pokdarwis. Merekalah yang selanjutnya memanfaatkan bangunan itu," ujar Bona.

Bangunan tersebut mulanya merupakan tempat istirahat atau dikenal dengan pesanggrahan. Oleh pihak dinas, bangunan ini direnovasi hingga pada tahun 2017 berubah menjadi TIC. Namun demikian, sejak tahun 2017 hingga kini belum pernah dianggarkan biaya pemeliharaan rutin bangunan itu. Sedangkan disinggung lamanya operasional TIC dibandingkan dengan masa renovasi, Bona enggan menjawab dengan alasan hal tersebut merupakan kebijakan.

"Mudah-mudahan tahun ini Pokdarwis Kintamani bisa terbentuk. Namun mengenai alasan mengapa direnovasi tahun 2017, coba tanya ke pak kadis (kepala dinas) karena ini berkaitan dengan kebijakan," ucapnya. Namun Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Bangli, I Wayan Adnyana tidak bisa dikonfirmasi oleh *Tribun Bali* melalui telepon maupun via pesan singkat. (mer)

Edisi : Kamis 16 Mei 2019

Hal : 5



Proyek GOR Sading Tak Tuntas

PUPR Kembali Anggarkan Rp 2,8 Miliar untuk Finishing

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di kelurahan Sading, Mengwi hingga target *deadline* November 2018 belum juga tuntas hingga Mei 2019. Kini pengerjaannya bakal dilanjutkan dengan tahap *finishing* dengan anggaran tambahan Rp 2,8 miliar.

Dari pantauan *Tribun Bali*

di lapangan, GOR Sading sudah berdiri. Namun beberapa tembok hanya sebagian yang dipasang batu paras putih. Pada bagian lantai juga masih kotor dan *basement* masih ditutup dengan pintu yang berbau seng. Pada lobi depan dua pilar masih kelihatan beton, dan tangga juga belum bersih.

Kepala Bidang, Tata Ru-

ang Dinas PUPR Kabupaten Badung, Larasati Adnyana, tak menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku pada pembangunan sebelumnya hanya dilakukan pembangunan GOR yang terdiri dari *basement* dan lantai satu. "Rencananya tahun ini akan dilanjutkan," ujarnya

BERSAMBUNG • HAL 7

Sabtu (4/5).

Menurutnya, tahun ini akan kembali dianggarkan untuk pembangunan tersebut. Sehingga secepatnya bisa dipakai warga setempat. Lanjutan Pembangunan Gor Sading kata dia sudah dalam tahap tender pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung. "Semoga secepatnya bisa diselesaikan," tambahnya.

Dalam LPSE Badung, tender dengan naman Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Olah Raga - Lanjutan Pembangunan GOR Sading itu digelontorkan nilai pagu Rp 2.831.383.634, dengan Nilai Hasil Perkiraan Sementara (HPS) Rp 2.636.941.578.

"Nanti ini rencananya untuk perbaikan yang belum selesai, seperti pembersihan tembok, lantai dan sebagainya. Selain itu *finishing* dan penataan halaman di sekitar GOR," tegasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IB Surya Suamba membenarkan

adanya pembangunan GOR tersebut. Pihaknya mengatakan Dinas PUPR yang merupakan *leading sector* proyek bahkan telah memasang tender untuk pembangunan GOR itu mulai dari Selasa 3 Mei 2018.

Pembangunan Gor ini merupakan usulan dari masyarakat setempat. Pasalnya Desa Sading sampai sekarang belum memiliki tempat olahraga yang representatif. "Sehingga kami lakukan pembangunan GOR dengan nilai kontrak Rp 7,8 miliar," paparnya. (gus)

Edisi : Minggu 5 Mei 2019

Hal : 7 dan 8



Proyek Gedung Mangkrak Sejak Pembunuhan Prabangsa

● Bangunan TK/SD Internasional Kubu Tak Jelas Peruntukannya

BANGLI, TRIBUN BALI - Bangunan TK/SD Internasional Kubu Bangli tidak jelas peruntukannya hingga kini. Sejatinya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bangli mengincar bangunan yang sempat menjadi lokasi mengungsi warga terdampak erupsi Gunung Agung ini.

Satu di antaranya dari Dinas Satpol PP dan Damkar yang sempat mengutarakan keinginannya belum lama ini. Bahkan sempat direncanakan akan menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bangli.

Kabag Umum Setda Bangli, Kadek Mahindra Putra mengatakan, gedung tersebut memang belum selesai masa pembangunannya.

Ini dikarenakan terkendala kasus yang dialami oleh Nyoman Susrama (mantan Bupati Bangli yang menjadi terpidana kasus pembunuhan wartawan, Anak Agung Gede Narendra Prabangsa).

"Bangunan itu sudah ada sekitar tahun 2008 saat kepemimpinan pak Bupati Arnawa. Persentase pembangunannya kala itu sudah hampir mencapai 70 persen. Karena ada kasus dan masih dalam proses hukum, makanya tidak dilanjutkan," ungkapnya, Selasa (14/5).

Gedung dua lantai ini tampak memperlihatkan. Bagian genting di telah rontok dan terlihat struktur rangka bajanya. Sedangkan gedung

lain, beberapa kacanya telah pecah.

Mahindra mengatakan, bangunan yang berdiri di lahan seluas 12,5 hektare ini beberapa sudah dimanfaatkan. Seperti beberapa gedung yang kini digunakan sebagai kampus IHDN, SD 4 Kubu, serta Gedung sebelah utara yang digunakan sebagai Kantor Dinas Perpustakaan Bangli.

"Beberapa bangunan lain itu sejatinya tinggal proses finishing saja seperti pemasangan kramik, plafon, perbaikan kamar mandi," ucapnya.

Mahindra tidak memungkiri terkait kerusakan yang terjadi seperti adanya genting bocor yang tentunya menambah biaya perbaikan

gedung. Sedangkan disinggung kelanjutan pembangunan gedung tersebut, pria asal Desa Kedisan, Kintamani ini mengatakan ada rencana kelanjutannya. Meski demikian pihaknya tidak mengetahui secara pasti kapan bisa direalisasikan rencana itu.

"Kalau tahunnya kami kurang tahu karena kewenangannya ada di disdik (Disdikpora Bangli). Apakah diusulkan atau tidak, kami juga kurang tahu," ungkapnya. Sementara itu, Kadisdikpora Bangli, I Nyoman Suteja tidak bisa dikonfirmasi, terkait rencana kelanjutan finishing gedung yang rusak dimakan usia tersebut. (mer)

Edisi : Rabu 15 Mei 2019

Hal : 4



Utang Dinsos Berdampak ke Pasien

Hanya Dapat Pelayanan Jika Kondisi Darurat

Tunggak Rp 677 Juta ke RSUD Sejak Tahun 2017

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem belum bisa mencairkan dana bantuan sosial tak terencana. Ihwal ini membuat operasional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem terhambat.

Direktur RSUD Karangasem, Wayan Suardana menjelaskan, utang Dinsos mencapai Rp 677.890.906. Rinciannya tahun 2017 sebanyak Rp 107.694.733, tahun 2018 sebesar Rp 501.492.740. Sedangkan tahun 2019 sampai Februari Rp 68.703.495.

Piutang ini muncul sebelum Karangasem dinyatakan UHC (*Universal Health Coverage*). Kondisi ini mengakibatkan operasional RSUD terhambat. Dampaknya juga ke pasien, terutama yang biaya pengobatan belum dibayar Dinsos.

"Pasien yang biaya pengobatannya belum dibayar Dinsos otomatis masuk utang di aplikasi. Kalau pasien mau berobat harus buka billing sistem, caranya dengan membayar utang. Tapi kalau pasien darurat tetap dilayani," ungkap Suardana di ruang kerjanya, Kamis (9/5).

Pejabat asal Klungkung ini berharap, Dinas Sosial segera membayar utangnya ke RSUD Karangasem sehingga operasional bisa berjalan lancar. Billing pasien juga bisa terbuka serta bisa terlayani kembali. "Masalah ini sudah dilaporkan ke BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar Suardana.

"Pasien yang pembayarannya ditanggung Dinsos Karangasem mencapai ratusan orang. Masalah ini sudah kami koordinasikan dengan Dinsos. Katanya masih dalam proses pencairan," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinsos Karangasem, Ni Ketut Puspakumari tak menampik adanya tunggakan di RSUD Karangasem. Ini karena bantuan sosial tak terencana belum cair lantaran belum ada disposisi bupati.

Pencairannya membutuhkan waktu lama. Prosedur awal yakni pemohon ajukan proposal ke bupati. Lalu usulan itu diteruskan ke Dinsos Karangasem untuk diverifikasi. Jika yang bersangkutan benar tidak mampu, maka Dinsos akan membuat telaah.

Hasil verifikasi dan telaah diserahkan ke bupati melewati sekda dan asisten. Jika sudah disetujui, bantuan sosial tak terencana bisa dicairkan. "Dana ini diberi ke pemohon. Setelah itu pemohon yang membayarkan ke RSUD," jelas Puspakumari.

"Sekarang masih menunggu disposisi bupati. Kalau sudah ada disposisi baru bisa dicairkan. Setiap pemohon nominalnya beda-beda tergantung tagihan dari RSUD Karangasem," sambung Puspakumari. **(ful)**

Operasional dan Pengadaan Obat Jadi Terkendala

SELAIN dana bantuan sosial tak terencana, dana siap pakai untuk biaya pengobatan para pengungsi Gunung Agung di RSUD Karangasem juga belum cair. Tunggakan terhitung sejak akhir 2017 hingga awal 2018. Padahal dari RSUD Karangasem telah ajukan klaim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dirut RSUD Karangasem, I Wayan Suardana menjelaskan, klaim dana siap pakai mencapai Rp 1.423.148.600

untuk dua tahun 2017 dan 2018. Namun Suardana tidak mengetahui apa penyebab dana tersebut belum cair. "Kami sudah mengajukan ke BNPB," kata dia.

Belum cairnya dana siapa pakai ini juga berpengaruh ke operasi RSUD Karangasem. Selain itu pengadaan obat juga jadi terhambat. Masalah ini juga sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait agar proses pencairan dipercepat. **(ful)**



Proyek Rest Area di Selabih Mangkrak

● Menanti Turunnya Rp 300 Juta untuk Bangun Toilet

TABANAN, TRIBUN BALI

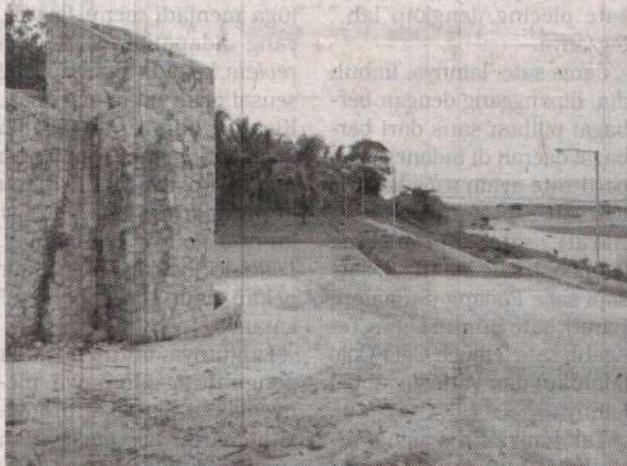
Pembangunan rest area atau tempat istirahat di areal Perbatasan Tabanan-Jembrana, Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, hingga saat ini belum jelas. Proyek yang sudah digarap sejak oktober tahun 2018 ini belum juga difungsikan.

Pihak desa menyebutkan hingga saat ini proyek tersebut masih kekurangan sejumlah fasilitas. Satu di antaranya toilet. Pantauan *Tribun Bali*, kawasan rest area ini tampak sepi. Proyek yang dibangun dengan anggaran Rp 800 juta lebih ini hingga kini belum jelas peruntukannya.

"Rest area masih belum lengkap fasilitasnya. Toilet belum ada, tapi tahun ini rencannya dibangun dengan anggaran tahap kedua," ujar Perbekel Selabih, I Wayan Suyadnya Putra, Senin (6/5).

Ia mengatakan, toilet merupakan satu fasilitas yang wajib disediakan di tempat umum. Karena tidak mungkin akan membiarkan para pengunjung bunag air sembarangan di areal rest area. Ini yang membuat bangunan tersebut belum dioperasikan.

Kata dia, sesuai gambar di awal kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya selain toilet seperti ada bangunan pos tempat berjualan, gazebo dan taman. "Namun anggaran yang kemarin itu (Rp 800 Juta) hanya sebatas untuk di bawah itu untuk tembok. Tahun ini rencananya akan diberikan anggaran Rp 300 juta untuk pembangunan toilet, kemudi-



TRIBUN BALI/MADE PRASETYA ARYAWAN

MANGKRAK - Kondisi proyek rest di areal Perbatasan Tabanan-Jembrana, Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Sabtu (4/5).

an tahun 2020 mendatang kami akan ajukan lagi untuk sesuai gambar semula ang dilengkapi dengan toko tempat berjualan dan taman," sebutnya.

Lalu kapan rencana kawasan tersebut mulai beroperasi? Suyadnya tak berani memastikan. Sebab setelah terbangunnya toilet nanti akan dikonsultasikan lagi dengan Pemkab Tabanan dalam hal ini Dinas PU untuk kelanjutannya.

"Saya juga belum tahu ini, yang jelas setelah ada toilet akan dikonsultasikan lagi ke Dinas PUPR apakah bisa dimanfaatkan oleh kami di desa atau menunggu hibah dari bagian aset. Kami masih belum tahu," tandasnya.

Kepala Bidang Bangunan Gedung, Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Penataan Kawasan pemukiman (PUPRKP) Tabanan,

Kadek Faridatini Suweca belum bisa dihubungi *Tribun Bali*. dihubungi beberapa kali, ia tak menjawab.

Sebelumnya, Pemkab Tabanan membangun rest area bernilai Rp 819 juta lebih. Anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk servis tapal batas. Sejumlah bangunan seperti candi pintu masuk ke kawasan tersebut sudah mulai berdiri. Kemudian fondasi bangunan seperti tempat berjualan atau warung sudah dikerjakan. Hanya saja, tapal batas Kabupaten Tabanan belum dilakukan perbaikan.

"Yang dikerjakan di sana (perbatasan) adalah servis tapel batas, dan membuat gerbang masuk menuju kawasan peristirahatan atau rest area. Yang jelas menata kawasan perbatasan," ujar Kadek Faridatini Suweca beberapa waktu lalu. (mpa)

Edisi : Selasa 7 Mei 2019

Hal : 4



Jalannya Seperti Kolam Ikan

TABANAN, TRIBUN BALI - Ruas jalan di Banjar Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Tabanan, rusak parah. Di beberapa titik tampak berlubang. Bahkan ketika hujan, lubangnya dipenuhi dengan air sehingga menyerupai kolam.

Namun tahun ini jalan yang menghubungkan Desa Perean, Kecamatan Baturiti dengan Desa Tua, di Kecamatan Marga itu, belum mendapatkan perbaikan. Rencananya pemerintah akan menguruk lubang tersebut dengan batu kapur. "Ba cara kolam be jalan ne" ujar seorang pengendara yang melintas, Senin (13/5).

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP) Tabanan, I Wayan Partana menyatakan, kerusakan jalan di Banjar Bunyuh tersebut belum masuk dalam daftar perbaikan tahun 2019.

"Untuk sementara jalan berlubang tersebut akan di urug dengan limestone (batu kapur). Karena jalur tersebut belum mendapat perbaikan tahun ini," ujar Partana.

Ia berharap, dengan di uruk batu kapur untuk sementara bisa mengurangi kerusakan yang ada karena jalan berlubang sampia nanti mendapatkan anggaran untuk perbaikan. Pihaknya akan berusaha memasukan dalam perbaikan di anggaran perubahan.

Apalagi anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Badung sampai kini belum masuk. Ia katakan nantinya dari anggaran tersebut, jalur yang belum tersentuh perbaikan termasuk di Bunyuh bisa mendapatkan perbaikan. "Kami akan upayakan di anggaran per-

ubahan apalagi dana dari BKK Badung belum masuk," tandasnya.

Untuk diketahui, menurut data yang berhasil diperoleh dari Dinas PUPRPKP Tabanan, kondisi jalan yang rusak berat sepanjang 133 kilometer terdapat di seluruh kecamatan yang ada.

Rinciannya, rusak berat paling panjang ada di Kecamatan Selemadeg Timur yakni mencapai 37 kilometer. Selanjutnya, terdapat di Selemadeg Barat 23 kilometer, Penebel 18 kilometer, Kediri 15 kilometer, Pupuan 12 kilometer, Marga 10 kilometer, Tabanan 5 kilometer, Kerambitan 5 kilometer, Selemadeg 5 kilometer, dan Baturiti sepanjang 3 kilometer.

Selain kondisi rusak berat, jalan di Tabanan masuk dalam kategori baik 76 persen, sedang 1,5 persen dan ringan 5,81 persen. Untuk perbaikan tahun 2019, Pemkab Tabanan mengusulkan anggaran senilai Rp 151 miliar dengan target perbaikan jalan sepanjang 74 kilometer.

Rincian sumber anggaran yang diusulkan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat sebesar Rp 23 Miliar untuk perbaikan jalan sepanjang 13 kilometer, dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Rp 85 Miliar dengan perbaikan jalan 44 kilometer lebih, BKK Badung Rp 38 miliar digunakan perbaikan jalan sepanjang 16 kilometer dan dari APBD Tabanan diusulkan Rp 3,9 miliar untuk perbaikan pengamanan badan jalan seluruhnya.

"Dengan anggaran tersebut, kami target akan lakukan perbaikan sepanjang 74 kilometer dengan catatan usulan tersebut terpenuhi," ujarnya. (mpa)



Dinas PU Paparkan 2 Kendala

● Penyebab Mandeknya Realisasi Proyek di Bangli

BANGLI, TRIBUN BALI

- Beragam kegiatan pembangunan di Bangli yang sempat dijanjikan berjalan tahun 2019, tanpa kabar. Peralnya hingga akhir bulan Mei, tak satu pun kegiatan pembangunan direalisasikan.

Kegiatan pembangunan yang sempat dijanjikan realisasi pada tahun 2019, di antaranya program lanjutan revitalisasi drainase di Kota Bangli. Ini merupakan kegiatan yang disebut menjadi prioritas. Sebab dinilai mampu meminimalisir persoalan banjir yang kerap melanda Kota Bangli.

Di lain sisi, APBD induk tahun 2019 juga telah sudah diketok palu akhir bulan November 2018 lalu dengan harapan proses pembangunan di Bangli tidak lagi mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Pemukiman (PUPRKim) Kabupaten Bangli, I Made Soma, Senin (27/5)

tidak memungkiri, keterlambatan realisasi proyek ini merupakan masalah klasik tiap tahun.

Kendala lambatnya proses realisasi kegiatan di antaranya aturan yang mengalami perubahan tiap tahun. Seperti tahun ini, ada perubahan dari Menteri PUPR terkait harga satuan barang di RAB. Sebab itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Kendala lainnya, adalah kesalahan yang dilakukan oleh beberapa konsultan sehingga wajib dilakukan pengecekan ulang.

Soma juga tidak memungkiri libur panjang awal bulan Juni mempengaruhi lambatnya realisasi kegiatan di Bangli. Diketahui, memasuki awal bulan Juni sejumlah OPD akan cuti bersama mulai dari tanggal 3 Juni, dan kembali bekerja tanggal 10 Juni. "Tentunya jika libur panjang, proses kegiatan akan pengaruh. Salah satunya pada proses tender, jika seharusnya

sudah diproses, maka akan tertunda," ucapnya.

Mengenai kegiatan yang akan berjalan di tahun ini, Soma menyebut ada belasan kegiatan. Empat kegiatan di antaranya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, telah diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Bangli. Sedangkan kegiatan sisanya, baik yang didanai dari APBD maupun BKK, beberapa diantaranya masih dalam tahap revisi Detail Engineering Design (DED).

"Seluruhnya yang menggunakan DAK merupakan kegiatan peningkatan jalan. Kita dituntut, untuk DAK bulan Juli sudah menjadi kontrak. Untuk yang lainnya masih kita lakukan revisi, serta turun ke lapangan untuk memastikan kekurangan-kekurangan DED yang telah dibuat oleh konsultan. Seperti kegiatan revitalisasi trotoar maupun peningkatan jalan di Sulahan, kalau sudah selesai proses revisi akan langsung diajukan ke ULP," jelasnya. (mer)

Edisi : Selasa 28 Mei 2019

Hal : 4



Anggaran Tianyar Barat Berkurang Rp 700 Juta

● DPMD: Pengurangan Menyesuaikan dengan Indikator

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2019 dari pemerintah untuk beberapa desa di Karangasem dikurangi hingga ratusan juta rupiah. Satu di antaranya di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Perbekel Tianyar Barat, Agung Pasrisak Juliawan, mengaku untuk Desa Tianyar Barat dikurangi sebesar 700 juta. Awalnya ADD Rp 2,3 miliar, sekarang hanya mendapat Rp 1,6 miliar. Apa penyebabnya? Ia belum memastikan detailnya.

"Pengurangannya cukup besar. Seharusnya ADD ditambah, bukan dikurangi," kata APJ sapaan Agung Pasrisak.

Akibat pengurangan ADD, beberapa kegiatan pembangunan yang ditarget tahun 2019 diundur untuk sementara. Termasuk pembangunan Dewi Danu, pengerjaan jalan di pantai, dan jalan di Desa Tianyar Barat. Rencananya pada tahun 2020 akan kembali dianggarkan.

Kabid Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem, Gede Kaneka Setiawan mengaku, desa di Karangasem yang dikurangi anggaran ADD sekitar 12 desa. Sisanya dinaikkan hingga ratusan juta.

Pengurangan itu menyesuaikan dengan indikator. Perhitungannya meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, serta jumlah penduduk miskin. Pengurangan langsung oleh pemerintah pusat. "Persentase pengurangan ADD kecil," aku Gede Kaneka.

"Setiap tahun berubah-ubah komposisinya. Desa

Pengurangannya cukup besar. Seharusnya ADD ditambah, bukan dikurangi

Agung Pasrisak

Juliawan

Perbekel Tianyar Barat

ini naik, desa lainnya dikurangi. Semua tak tetap. Bisa jadi desa yang sekarang dikurangi, tahun depan dinaikkan lagi. Tergantung perhitungan pemerintah pusat dan indikator," ungkap Kaneka.

Pihaknya mengaku pengurangan anggaran ADD telah disosialisasikan ke masing-masing desa. "Masalah anggaran ADD sudah disosialisasikan ke perbekel di akhir tahun 2018, dan awal 2019. Ini kebijakan dari pemerintah pusat," imbuhnya. (ful)

Edisi : Senin 20 Mei 2019

Hal : 5



Ruas Jalan di Klungkung Masih Minim LPJ

SEMARAPURA, TRIBUN

BALI- Warga masih mengeluhkan kondisi penerangan jalan di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra wilayah Klotok menuju Desa Tojan, Klungkung. Meskipun sudah ada beberapa lampu penerangan jalan di ruas jalan tersebut, namun beberapa di antaranya rusak.

"Di lokasi ini memang ada beberapa lampu, tapi beberapa mati karena rusak. Padahal jalan ini ramai dilintasi warga saat malam hari," ujar warga setempat, Putu Wiryana, Minggu (19/5).

Jalanan yang gelap membuat warga was-was. Tidak hanya khawatir mengalami kecelakaan, tapi juga dengan kemungkinan terjadinya tindak kriminal.

"Bypass ini kan jalan lintas kabupaten, kondisi jalan gelap tentu membuka peluang

bagi tindakan kriminal. Dulu ada warga mengaku jadi korban begal di ruas jalan ini dan sempat viral di medsos," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, I Nyoman Sucitra tidak menampik hingga saat ini belum semua jalan di Kabupaten Klungkung dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Tahun ini saja, pihaknya baru mengalokasikan anggaran Rp 950 juta untuk pengadaan LPJ di empat kecamatan di Klungkung.

"Pemenuhan LPJ ini kami lakukan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan. Anggarannya bisa dengan APBD Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali atau pusat. Tergantung status jalannya," ungkap Sucitra.

Menurut Sucitra, usulan dari desa terkait LPJ di Klung-

kung mencapai ratusan. Terbatasnya anggaran menyebabkan tidak semua usulan itu dapat direalisasikan tahun ini. Pemerintah harus menerapkan skala prioritas untuk pemenuhan LPJ tahun ini.

"Misal daerah yang pariwisata berkembang, itulah yang kami tangani terlebih dahulu. Berdasarkan pemetaan, untuk memenuhi seluruh kebutuhan LPJ di empat kecamatan di Klungkung mencapai puluhan miliar," jelas Sucitra.

Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan LPJ ini baru mencapai Rp 950 juta. Rinciannya, pemenuhan LPJ di Kecamatan Klungkung dianggarkan Rp 150 juta, Kecamatan Banjarangkar Rp 175 juta, Kecamatan Dawan Rp 175 juta dan Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp 450 juta. (mit)